



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA (VIRTUAL)
KOMISI XI DPR RI DENGAN MENTERI KEUANGAN RI, GUBERNUR
BANK INDONESIA, KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN RI, DAN KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 6 April 2020
W a k t u	: 13.00 s.d. 18.05 WIB
T e m p a t	: Virtual
Ketua Rapat	: H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Ketua Komisi XI DPR RI)
Acara	: Perkembangan Kondisi Industri Jasa Keuangan di Tengah Wabah COVID -19.
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Hadir	: 1. MENTERI KEUANGAN RI 2. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK 3. GUBERNUR BANK INDONESIA 4. KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

JALANNYA RAPAT:

KETUA KOMISI XI (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F-PG)

...(Rekaman terputus)... Virtual sebanyak 40 anggota Komisi XI DPR-RI yang terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 254 peraturan DPR RI tentang tata tertib dan sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 27 Maret 2020 telah terpenuhi.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ijinilah kami membuka rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, ketua dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan ketua dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat kerja hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-nya pada hari ini kita dapat melaksanakan melalui video conference rapat kerja Komisi XI DPR-RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, ketua dewan Komisioner otoritas jasa keuangan, dan ketua dewan komisaris Lembaga Penjamin Simpanan dalam keadaan sehat.

Kami juga ingin berbela sungkawa atas meninggalnya korban dari Covid 19 dan semoga hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara di tengah wabah Covid 19. Adapun tata cara rapat melalui video conference sebagai berikut satu rapat kerja dibuka dengan pendahuluan oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota yang hadir. Peserta rapat dapat mengikuti rapat di tempat tertutup atau tempat yang tidak bising tidak ramai kami mohon untuk dapat di mute. Peserta rapat tidak berbicara terlebih dahulu sebelum dipersilahkan rapat oleh pimpinan dan pimpinan rapat akan menanyakan dan memberikan hak untuk interupsi dan memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi. Jadi setelah kami melakukan pembukaan kemudian kami mempersilakan pemerintah untuk memberikan pemaparannya selama pemerintah memberikan pemaparannya kami mohon dengan sangat kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR-RI untuk tidak melakukan interupsi.

Kemudian setelah selesai pemaparan kami persilahkan akan pendalaman dilakukan oleh anggota Komisi XI DPR-RI melalui kapoksi akan kami putar dari posisi satu persatu jadi kapoksi yang akan mengatur untuk berbicara, kemudian mungkin kalau masih diperlukan di putaran kedua kapoksi yang akan mengatur anggota yang akan berbicara. Itu untuk itu kepada para anggota yang ingin mengajukan pendalaman dapat menjapri langsung melalui wa kepada kapoksinya sehingga nanti kapoksi bisa mengatur mekanisme pada

putaran-putaran yang ditunjuk diatur oleh kapoksi dan berbicara paling lama 5 menit.

Apabila ada peserta yang rapat sedang berbicara peserta rapat yang lain dapat mematikan audionya atau di-mute. rapat secara visual dengan rancangan kesimpulan yang dibacakan oleh pimpinan rapat. jadi demikianlah tadi kami telah bacakan tata cara untuk melakukan rapat virtual pada siang hari apakah tata cara melalui video conference tersebut dapat disetujui? jadi karena tidak ada suara Kalau setuju begini kalau tidak setuju ... ini. Setuju pak ...? (setuju pak) setuju semua? (setuju) oke.

Ini ...(suara tidak jelas)... nya dari DPR asli. Hadirin yang kami hormati, agenda hari ini adalah perkembangan kondisi perekonomian perekonomian nasional di tengah wabah Covid 19. peningkatan eskalasi pandemic Covid 19 di Indonesia telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan dan penurunan penerimaan negara, peningkatan Belanja Negara, sehingga perlu berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian dengan fokus pada belanja untuk kesehatan sosial safety net serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 tersebut di Indonesia sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Selanjutnya ada rapat kerja siang hari ini Gubernur Bank Indonesia, ketua dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan ketua dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perkembangan kondisi perekonomian nasional di tengah wabah Covid-19 tersebut. selanjutnya kami persilahkan kepada saudara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, ketua dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyampaikan penjelasannya. Waktu kami persilahkan kepada ibu Sri Mulyani.

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI)

Terima kasih Pak Dito,
Pimpinan Komisi XI dan para kapoksi serta anggota Komisi XI yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Izinkan kami pada yang pertama ini untuk menyampaikan salam kepada seluruh Pimpinan dan Komisi XI semoga bapak dan ibu sekalian pimpinan dan anggota Komisi XI selalu di mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa dari ancaman Covid-19 untuk bapak ibu dan seluruh anggota keluarga. Kami ingin menyampaikan pada rapat kerja Komisi XI ini perkembangan ekonomi dan langkah-langkah pemerintah yang telah dilakukan di di dalam menyikapi pandemi Covid-19. nanti kami akan sampaikan langkah-langkah yang terutama sudah dilakukan semenjak Januari pada saat Outbreak Covid-19 itu dimulai dengan situasi di

Pertama kita menyampaikan mengenai perkembangan Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia. tadi baru saja Pagi ini kita rapat kabinet yang reguler untuk mendapatkan update dari gugus tugas penanganan Covid nasional. dimana disebutkan penyebaran Covid telah jadi di 207 negara atau teritori dan jumlah kasus baru setiap harinya sudah mencapai 100.000. Jumlah 10 negara dengan jumlah tertular atau dalam hal ini jumlah yang terpapar Covid 11 termasuk di antaranya adalah Amerika Serikat, Italia, Perancis. termasuk dulu yang pertama kali adalah RRT namun RRT itu sekarang bukan menjadi negara yang paling besar penyebarannya. justru di negara-negara seperti di Amerika Serikat, di Jerman, Perancis, Itali, Spanyol ini yang sekarang dan UK adalah yang paling besar. total kematian adalah sekitar 60.000 atau 5,4%. Dengan Jumlah pasien yang sembuh 234.000 atau 21%. jumlah kasus aktif adalah sekitar 822.000 Kalau tidak salah bahkan sudah mencapai 1 juta kemarin disampaikan Untuk Indonesia tidak terkecuali kasus dari penyebaran Covid itu mulai dideteksi atau dalam hal ini diidentifikasi awal Maret atau secara persisnya tanggal 2 Maret. Jadi walaupun Covid ini sudah mulai semenjak Desember di RRT dan mulai diberitakan Januari Indonesia adalah termasuk negara yang baru mendapatkan kasus positif diidentifikasi tanggal 2 Maret.

Perkembangan dari penularan mengalami eskalasi eksponensial dengan konsentrasi memang ada di DKI Jakarta yang merupakan disebut sebagai kawah kawasan Pusat konsentrasi penyebaran Covid atau di sini disebutnya zona merah.

DKI plus bodetabek adalah juga merupakan kawasan terkonsentrasi namun karena Jawa Barat daerahnya besar sehingga secara persentase menjadi lebih kecil dengan penduduk yang besar maupun Banten. namun dalam hal ini terlihat di dalam gambar ini bahwa konsentrasi sampai hari ini pun masih tetap terbesar adalah di DKI Jakarta.

Menurut berbagai model yang dikembangkan termasuk dalam hal ini oleh Badan Intelijen Nasional bekerjasama dengan UI dan ITB untuk melihat pola penyebaran dan Puncak penyebaran diperkirakan akan terjadi tadi pagi di update next halaman 4 adalah sekitar akhir Mei dengan jumlah estimasi jumlah yang akan terpapar adalah sekitar 95.000 prediksi dari BIN dengan modelling yang dikembangkan dengan universitas ITB dan UI. dari berbagai model memang menggambarkan termasuk yang dilakukan oleh Menko PMK sebagai ketua dewan pengarah dari Covid puncak dari penyebaran Covid ini akan terjadi memang Pada bulan April dan Mei ini. Di mana jumlahnya akan melonjak dan oleh karena itu langkah-langkah strategis sangat urgent dibutuhkan untuk bisa mencegah Apa yang disebut Puncak penularan dengan apa yang disebut di dalam literatur Covid ini membuat kurvanya lebih landai jadi tidak eksponensial memuncak seperti gunung yang tinggi namun diupayakan supaya kurva nya melandai. artinya meningkat pasti terjadi tapi tidak secara kecepatan maupun luas penyebaran tapi diupayakan untuk dilakukan penyebarannya itu melambat atau melandai.

Inilah yang dilakukan oleh pemerintah melalui langkah-langkah yang nanti kami sampaikan. Dengan adanya Covid-19 ini dan dampaknya terhadap kesehatan, keselamatan manusia, dan dampak terhadap sosial ekonomi dan keuangan terlihat bahwa pandemi Covid 19 mampu menciptakan gejolak di pasar keuangan dan disrupti Ekonomi global. ini disebabkan untuk mencegah

penurunan dilakukan langkah-langkah drastis seperti social distancing atau bahkan sampai kepada karantina dan Lockdown. Yang menyebabkan kemudian memunculkan disrupsi di dalam sektor produksi dan volatilitas di sektor pasar keuangan. volatility indeks yang diukur dengan fix indeks kalau bapak dan ibu lihat di dalam kurva ini yang tadinya pada tahun lalu hingga awal Februari atau akhir Februari masih di Kisaran 20 melonjak sampai di tingkat 80 atau 4 kali lipat volatilitasnya. move indeks juga meningkat dari kisaran sekitar 40, 50 sempat melonjak pada 160. PMI, Purchasing Manager Indeks yang menggambarkan kegiatan produksi mengalami kejatuhan dibawah 50 berarti adalah kontraksi atau resesi. dalam hal ini sektor jasa Terpukul paling dalam ya itu turun menjadi dari di atas 50 menjadi 37. sektor manufaktur juga mengalami penurunan. MSCI yaitu indeks saham negara-negara maju maupun emerging market juga mengalami dampak negatif ini terlihat terutama akselerasinya terjadi pada bulan Maret. ini bukan tanpa keinsiden kalau dilihat perkembangan semenjak awal Maret atau sepanjang bulan Maret itu adalah waktu profit melanda secara hebat di Italia, Eropa secara umum dan Amerika Serikat termasuk Inggris.

Sehingga bursa mengalami dampak yang sangat dalam secara global dan sentimen kepada emerging market menjadi semakin negative. dengan Gejolak ini proyeksi berbagai negara akan mengalami Resesi harga komoditas juga mengalami kejatuhan. Khusus untuk harga minyak ini diakibatkan oleh juga perang antara perang harga atau perang produksi antara Saudi dengan Rusia. yang kemarin sempat sedikit jeda waktu Donald Trump presiden Trump intervensi namun hanya dalam waktu sehari kemudian Saudi dan Rusia kembali saling bersengketa mengenai Siapa yang menyebabkan harga minyak mengalami kejatuhan hingga dibawah 30 dolar per barel. pertemuan OPEC yang sedianya akan dilakukan kemarin ditunda karena dispute itu masih sangat tinggi.

Bapak dan ibu sekalian dengan situasi keuangan dan Gejolak ekonomi global seperti ini Indonesia tidak ... meskipun kita memiliki fundamental makro selama ini cukup baik dan kita memiliki berbagai kinerja ekonomi yang cukup baik. harga saham kita mengalami penurunan, nilai tukar Rupiah kita mengalami tekanan, yang nanti pak Gubernur akan bisa menyampaikan, dan terjadi arus modal keluar yang sangat tinggi, terutama di pasar surat berharga negara. hingga mencapai 126,8 triliun. minus ini bisa dibayangkan Bank Indonesia sudah melakukan apa yang disebut intervensi melalui pembelian surat berharga negara untuk ikut menstabilkan harga yang mengalami kejatuhan atau Hill dari surat berharga mengalami kenaikan akibat adanya ketakutan dan capital outflow.

Bila dilihat di sebelah kanan yield dari obligasi 10 tahun Republik Indonesia dengan us treasury bonds 10 tahun terjadi yield yang melonjak besar terutama akselerasinya terjadi pada bulan Februari, Maret. Pada reserve yang sudah menurunkan suku bunga tidak mampu menstabilkan harga dari US treasury ini sehingga terjadi pembelian yang luar biasa namun menyebabkan treasury yield justru mengalami penurunan di bawah 1 ini adalah termasuk terendah di dalam history ekonomi Amerika Serikat. negara berkembang atau negara lain justru mengalami yield yang meningkat. yang kalau bapak dan ibu sekalian di dalam tabel selanjutnya semenjak tanggal 18 Februari hingga akhir

Maret yaitu dari surat berharga kita yang 10 tahun sudah mengalami 130 basis poin kenaikan, dan kalau dilihat dari gambar sebelah kiri antara kuning dengan merah menggambarkan jumlah incoming ... dari setiap pelelangan-pelelangan atau penawaran surat berharga kita maka terlihat semenjak 18 Februari jumlah incoming Mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari tadinya selalu di atas 80 atau bahkan pernah mencapai 127 triliun untuk sekali penawaran lelang, lelang terakhir pada tanggal 31 Maret ... hanya mendapatkan incoming sebanyak 34 triliun. itupun kita masih mengambil 22 triliun dengan tadi jumlah yaitu yang harus kita bayar menjadi lebih mahal.

Asing tercatat melakukan penjualan bersih hingga mencapai 130 triliun year to date di pasar SBN kita, kita sampaikan di sini hingga tanggal 2 April yang lalu. inilah Gejolak yang kita terus sepanjang february-maret bersama Bank Indonesia OJK dan LPS terus menangani memantau dengan ketat dan terus melakukan koordinasi di dalam kita untuk melihat apakah sistem keuangan kita dalam situasi normal, waspada, atau siaga atau kemungkinan akan merambat menjadi krisis yang mengancam stabilitas sistem keuangan. karena sebetulnya dalam situasi ini pergerakan bisa terjadi begitu sangat cepat seperti yang Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat hanya dalam waktu kurang 1 bulan terjadi perubahan mood dan pricing dan Gejolak yang begitu sangat tinggi.

Bapak dan Ibu sekalian Pimpinan dan para anggota Komisi XI

Berbagai negara yang juga menghadapi situasi seperti kita yaitu dari sisi kesehatan ancaman keselamatan masyarakat namun juga dari sisi ekonomi terjadi ancaman yang sangat serius mereka melakukan langkah-langkah kebijakan untuk menangani Covid 19. Melalui kombinasi berbagai instrumen ekonomi atau kebijakan. instrumen non ekonomi atau kebijakan non ekonomi adalah melakukan kebijakan sosial dalam bentuk Lockdown melakukan rapid dan masif tes, melakukan travel dan restriction atau penutupan sama sekali. sekarang semua negara menutup negaranya dari orang-orang asing, penerbangan dari luar Practically semuanya di stop. Kemarin Perdana Menteri Australia sudah menyampaikan kepada Bapak presiden kemungkinan mereka akan memulangkan semua atau sebagian besar student-student asing yang ada di Australia dan ini berarti akan menimbulkan implikasi. Work from home, study from home, physical distancing, melarang terjadi kegiatan pengumpulan masa dan memberikan hukuman atau denda bagi yang tidak patuh itu dilakukan oleh hampir semua negara. Implikasinya seperti kami sampaikan tadi sektor jasa seperti restoran, bioskop, hotel langsung mengalami collapse atau penurunan drastic.

Di bidang ekonomi kebijakan fiskal moneter dan sektor keuangan mencoba meminimalkan dampak dari kebijakan kesehatan dan kebijakan sosial tersebut . dari fiskal dilakukan stimulus melalui peningkatan anggaran terutama untuk kesehatan, memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga maupun pekerja yang mengalami PHK dalam bentuk cash transfer maupun jaminan sosial dan membantu sektor-sektor yang mengalami dampak negative. Itu bisa dalam bentuk penundaan pajak memberikan penjaminan pinjaman memberikan hubungan unsur strukturisasi. di bidang moneter dan sektor keuangan Nanti Pak Gubernur maupun OJK dan LPS akan menyampaikan namun ini adalah yang dilakukan oleh 193 negara. langkah-langkah penurunan

suku bunga, quantitative easing penundaan dan pelonggaran pembayaran kredit. Pemberian fasilitas pinjaman dan penjaminan itu dilakukan oleh 193 negara di dunia.

Kalau kita bandingkan stimulus fiskal didalam rangka memberikan dukungan dan mitigasi dampak negatif Covid 19 dan dalam rangka mencegah krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi atau krisis keuangan banyak negara telah mengumumkan langkah-langkah yang sifatnya ekstra ordinary. Australia yang terakhir mengumumksn hampir 11% fiskal stimulus atau tambahan belanja. Singapura yang selama ini sangat disiplin di dalam mengelola fiskalnya dan tidak membolehkan terjadinya defisit dalam 5 tahun satu pemerintahan sekarang melakukan defisit hingga sampai 11%. kurang dari 3 bulan Singapura mengalami tiga kali perubahan APBN nya, Amerika Serikat 10,5% atau 2 triliun US dollar, Malaysia 10% dari GDP-nya, Kanada 6%, Jerman 4,5. Indonesia saat ini dihitung dari stimulus 123 kira-kira adalah 2,5% dari GDP.

Setiap negara ini bapak bapak dan ibu sekalian melakukan reporting dan announcement dan ditrack oleh G20 maupun AFF mengenai respon setiap negara di dalam melakukan mitigasi dan menangani dampak Covid 19 ini. beberapa langkah kebijakan yang sifatnya Extraordinary selain fiskal juga nonfiskal. ini termasuk Australia memberikan insentif pajak, bantuan langsung tunai kepada UMKM, memberikan subsidi upah, memberikan bantuan langsung pada pengangguran, PHK, pensiunan, dan juga memberikan jaminan pinjaman untuk bisnis Artinya mereka di dijamin bahwa kredit lain tetap terbuka, melakukan tambahan untuk fasilitas, penurunan suku bunga oleh bank sentral nya sebanyak 50 pieces poin tapi sebagian besar dari negara-negara ini suku bunganya sudah mendekati 0% sehingga mungkin tidak mungkin lagi diturunkan dari sisi suku bunga.

Kalau dilihat di sini Amerika Serikat melakukan emergency spending yang sebesar 2 trilyun dan memberikan cash transfer dan juga penurunan dari Federal Reserve suku bunganya hingga mendekati 0 sampai 0,25. suku bunga turun belum cukup di tambah dengan mencetak dolar lebih banyak melalui kuantitatif easing dan penjaminan. termasuk bank sentral di Amerika Serikat dimungkinkan untuk membeli bonds tidak hanya pemerintah tapi juga bonds dari municipal dan korporasi.

Singapura juga melakukan secara sangat agresif bantuan sosial diberikan cash transfer ke masing-masing rumah tangga dan sektor yang terkena langsung seperti pekerja-pekerja yang kena PHK atau penurunan kegiatan ekonomi. dilakukan moratorium pembayaran utang bagi perusahaan dan individu yang terdampak Covid, juga diberikan fasilitas Likuiditas ... di Korea selain di bidang kesehatan juga memberikan yang sama penundaan pajak penurunan suku bunga dan meningkatkan plafon fasilitas pinjaman. juga ada paket khusus mengenai stabilisasi sistem keuangan. demikian juga dengan Jerman refinancing likuiditas jangka pendek selain adanya subsidi dan cash transfer kepada pekerja. Malaysia juga melakukan hal yang sama.

Bapak dan ibu sekalian terlihat bahwa langkah yang dilakukan semua negara biasanya terdiri dari instrumen fiskal Apakah itu memberikan insentif pajak atau tax break, memberikan tambahan belanja umumnya di bidang

kesehatan dan bantuan sosial dan juga membantu dunia usaha termasuk menjaga sistem keuangan supaya tidak mengalami potensi krisis ini yang dilakukan oleh semua negara melalui penjaminan memberikan jaminan pinjaman tetap kredit tetap mengucur atau memberikan fasilitas refinancing maupun restructuring.

Dari berbagai langkah ini tidak bisa mencegah proyeksi ekonomi tahun ini seluruh dunia pasti akan mengalami penurunan. AMF yang pada pertemuan G20 di Riyadh akhir Februari masih optimis hanya dalam waktu kurang 2 minggu waktu kami melakukan pertemuan virtual G20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, langsung menyampaikan tahun 2020 yang tadinya diperkirakan dunia bisa tumbuh 3% kristalina menyampaikan tahun ini sudah pasti negatif growth jadi merosotnya lebih dari 3%.

JP Morgan memprediksikan Global growth minus 1,1 info economics intelegensi unit minus 2,2. di sebelah kanan kami menyampaikan proyeksi untuk asia Termasuk Indonesia dari 2 institusi yaitu World Bank dan PDB dan untuk Economic intelligence unit hanya melakukan untuk G20 dimana hanya tiga negara yang masih diperkirakan bertahan diatas 0% atau positif teritory yaitu Indonesia Tiongkok dan India. kalau dilihat dari proyeksi world bank skenario base line turun ke 2,1 worst case minus 3,5 untuk Indonesia. PDB hanya mengeluarkan 1 proyeksi base line turun dari 5 di atas 5 menjadi hanya 2,5%. Negara yang lain juga mengalami penurunan proyeksi dan tingkat kedalaman atau negatif growth nya tergantung dari masing-masing negara seperti yang terlihat didalam tabel tersebut.

Nah untuk indonesia kami kementerian keuangan bersama-sama dengan BI, OJK, LPS juga terus melakukan kajian bersama membuat asesmen Bagaimana dampak konflik ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia termasuk dari sisi pertumbuhan ekonomi. saat ini skenario baseline kita sudah turun di 2,3%. ini adalah berdasarkan dampak dari Covid yang mungkin akan paling severe atau paling parah terjadi di Kuartal kedua tahun ini dan mungkin akan kontinu di Kuartal ketiga dan baru mungkin agak mulai membaik di Kuartal keempat. kelihatan Di Sini dari sisi agregat demand konsumsi rumah tangga akan mengalami penurunan cukup signifikan. investasi akan masuk negatif teritori pada Kuartal kedua dan kuartal ketiga dan export yang selama 2019 sudah mengalami negatif growth mungkin akan tetap mengalami kontraksi bahkan makin dalam pada Kuartal kedua dan kuartal ketiga.

Impor yang tahun 2019 juga mengalami negatif growth sepanjang tahun, tahun ini masih akan tetap berlangsung negative. sehingga kami memperkirakan base line baru kita adalah di 2,3%. kami bersama BI dan OJK dan LPS memang juga melakukan forward looking assessment berdasarkan berbagai contingency atau kemungkinan. termasuk tentu kemungkinan yang lebih buruk dari kondisi baseline yang sedang kita atau yang sudah kita assest saat ini.

Memang Covid 19 menimbulkan dampak negatif yang cukup dalam semua negara namun tidak semua sektor mengalami dampak negatif dari Covid 19. Ada sektor yang diperkirakan menjadi Winner atau yang menjadi loser. pariwisata jelas merupakan sector yang terkena paling dalam karena tidak adanya traffic atau travelling maupun bahkan keluar ini termasuk Jasa

Hotel, restoran. Transportasi dengan demikian juga akan terkena. pertambahan ini karena permintaan terhadap komoditas keuangan kemungkinan menghadapi second round efek sesudah sektor riil nya dan rumah tangga yang mengalami penurunan aktivitas yang kemudian memungkinkan terjadinya kenaikan non Performing loan atau resiko. sektor otomotif juga diperkirakan menurun, usaha kecil menengah yang kalau tahun 97, 98 itu sangat ... karena krisis terjadi di sektor keuangan besar dan korporasi untuk profit ini mereka adalah yang terdepan terkena dampak dikarenakan tidak adanya kegiatan sosial atau yang disebut work from home dan social distancing yang kemudian menciptakan kesulitan kepada UMKM. sektor pertanian dan UMKM ini mungkin ada juga sektor yang tetap mengalami booming, dan sektor-sektor lain yang diperkirakan bisa mendapatkan potensial winning atau manfaat dari Covid ini adalah sektor jasa logistic, jasa telekomunikasi, elektronik, makanan dan minuman, pharmaceutical dan tekstil. ini di Indonesia terasa sekali waktu kita bicara tentang produksi APD dan masker. Dimana seluruh industri di Indonesia sekarang dalam situasi highly demanded yang jadi konstrain adalah bahan baku sekarang.

Tadi pagi di dalam sidang kabinet dibahas mengenai bahan baku yang kita peroleh dari Korea akan habis dalam waktu 2 minggu ke depan dan sekarang sedang dikembangkan untuk mendapatkan atau menciptakan bahan baku lokal yang disertified atau akseptabel dari standar WHO untuk alat pelindung diri. Karena di semua negara termasuk di Amerika Serikat pada hari ini mereka sangat kekurangan APD ini, masker, maupun ventilator yang sekarang menjadi komoditas rebutan seluruh dunia. Amerika baru saja memutuskan ventilator tidak boleh diekspor meskipun sudah dipesan oleh Jerman. jadi Ibu dan Bapak sekalian beberapa sektor akan mengalami booming yang luar biasa karena permintaan hari ini hampir tidak terbatas. namun ada sektor-sektor yang mengalami situasi yang sangat sulit inilah yang menjadi perhatian dari kami di pemerintah kami dengan kabinet Menko Perekonomian, Menko investasi dan Menko PMK serta Menko politik sosial Hankam untuk melihat dan memformulasikan kebijakan apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan mitigasi dari risiko krisis kesehatan ini menjadi krisis ekonomi dan krisis keuangan.

Dengan kebijakan fiskal untuk bisa mendukung dan membuat masyarakat maupun perekonomian serta negara bisa merespons baik di pusat dan daerah maka sudah bisa diprediksi APBN kita mengalami tekanan yang luar biasa. penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor mengalami ... yang sangat dalam. sehingga outlook kita APBN untuk 2020 penerimaan negara bukannya akan tumbuh namun malah mengalami kontraksi. outlooknya hingga hari ini dengan baseline di 2,3% maka pendapatan negara kita hanya akan mencapai 1760,9 trilyun rupiah. Atau ini turun 10%. sementara dari sisi belanja kebutuhan untuk segera meningkatkan kesiapan sektor kesehatan dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak dan terutama karena akibat langkah-langkah seperti melakukan work from home, sosial distancing dan berbagai langkah-langkah pembatasan mobilitas membutuhkan jaminan social yang harus ditingkatkan secara ekstra ordinary. Juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan kebutuhan untuk mendorong atau melindungi

dunia usaha, baik dalam bentuk pajak maupun tambahan atau pemberian relaksasi.

Dengan Outlook belanja kita melebihi yang sudah ada di dalam APBN dari 2.540 sebelumnya sebelumnya outlooknya ke 2613 triliun maka deficit diperkirakan akan mencapai 5,07% dari PDB atau meningkat dari 307 triliun menjadi 853 triliun.

Pimpinan dan para anggota yang kami hormati

Ini adalah skenario yang kami terus sedang bekerja kami tidak mengatakan ini adalah sudah pasti karena sudah sangat pasti kita melihat pergerakan ekonomi dan sosial masih akan bergerak terutama pada bulan april dan Mei ini yang semuanya menyampaikan sebagai puncak dari penyebaran akan terjadi dan bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengendalikan Covid. sehingga walaupun kami menyampaikan asesmen ini dan prediksi ini kami ingin menyampaikan ini adalah Outlook basisnya adalah skenario yang kita lihat berdasarkan asumsi yang kita kembangkan. setiap minggu dan kemudian setiap bulan kami akan terus mengupdate outlook dari APBN yang masih mungkin bergerak dan berubah, tapi untuk hari ini kami akan jelaskan basis dari perhitungan Outlook penerimaan atau pendapatan negara, belanja negara dan defisit ini.

Pertama untuk pendapatan negara, kami memperkirakan pendapatan negara tumbuh 10, minus 10%. Tadi yang kami sampaikan berarti penerimaan 1760 triliun itu hanya 78, 9% dari target APBN 2020 awal. perhitungan Kami adalah dari penerimaan pajak yang mengalami negatif growth minus 5,4 perpajakan ini karena pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan, perang harga minyak yang menyebabkan komoditas menurun juga karena kita memberikan fasilitas pajak dalam bentuk insentif bagi dunia usaha di tahap kedua dan sekarang di tahap ketiga kita menambah relaksasi fasilitas pajak itu untuk hampir semua dunia usaha yang terdampak. kita memberikan juga pengurangan tarif PPH badan dari 25% menjadi 22% dan penundaan PPH dividen karena adanya kalau omnibus law disepakati. Ini telah menyebabkan perusahaan atau individual kemudian menahan menahan dividennya untuk tidak dibagikan tahun ini tapi ditunda tahun depan karena berharap pajak penghasilan untuk dividen akan dibebaskan.

Bea Cukai juga mengalami proyeksi penurunan 2,2% dengan memperhitungkan stimulus dalam bentuk pembebasan bea masuk untuk 19 industri atau diperluas dan untuk PNBPN kita diperkirakan akan mengalami penurunan 26,5% karena harga ICP kita yang di dalam APBN kita perkirakan 6 menggunakan asumsi 63 dolar sekarang harganya dibawah 30% atau di sekitar 30%. SDA non migas juga mengalami penurunan karena harga batubara juga mengalami penurunan. Nah dengan penerimaannya yang turun 10% di sisi belanja kami mengalami tekanan ini masih di dalam proses untuk kami terus melakukan penyempurnaan. langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang telah kita lakukan atau sedang kita lakukan belum memasukkan langkah-langkah yang masih akan dilakukan karena bapak presiden dan sidang kabinet akan terus melakukan berbagai langkah-langkah seperti tambahan Bansos atau penghematan belanja. kami saat ini sedang bersama Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-

13, Apakah perlu untuk dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja Negara yang meningkat. jadi sesuai instruksi nomor 4 presiden untuk meminta seluruh KL dan daerah melakukan refocusing dan realokasi kami sekarang melakukan untuk seluruh KL dan untuk daerah bersama Menteri Dalam Negeri membuat surat edaran dan memantau APBD setiap daerah.

Kita perkirakan penghematan negara mencapai 190 triliun ini masih menggunakan skenario awal hingga awal April ini. Yaitu Kementerian lembaga bisa dikurangi belanjanya 95,7 triliun, TKDD 94,2 triliun, dan sudah memasukkan realokasi dari belanja sebesar 54,6 triliun untuk tahap pertama dan kedua.

Bapak Presiden telah menyampaikan ke publik instruksi agar kita meningkatkan belanja untuk kesehatan dan bansos serta mendukung dunia usaha. maka dikeluarkanlah instruksi untuk tambahan belanja 75 triliun untuk kesehatan, social safety net atau Bansos dinaikkan 110 triliun dan dukungan dunia usaha 70 triliun. kita akan melihat dana bagi hasil bagi daerah pasti mengalami penurunan karena pendapatan negara mengalami kontraksi. DAU pun dalam hal ini akan mengalami penurunan karena penerimaan dalam negeri netto kita mengalami penurunan yang cukup tajam. DAK fisik sekarang sudah dikendalikan paling tidak 25% terutama akan dipotong atau dikendalikan pada bidang-bidang yang selain bidang Pendidikan dan kesehatan. DAK nonfisik kan turun tapi sudah memperhitungkan tambahan belanja operasional kesehatan terutama di dalam rangka memberikan insentif bagi tenaga medis di daerah yang akan kira-kira membutuhkan 3,7 triliun. DID dan Dana Desa juga akan mengalami penurunan dan sekarang kami sedang diinstruksikan oleh bapak presiden untuk menghitung Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Desa serta Menteri Sosial untuk mengubah sebagian dari Dana Desa dijadikan bantuan social cash transfer.

Ini terutama mengantisipasi kalau Desa akan menerima muntahan dari mereka yang pulang dari kota maupun TKI kita yang berasal dari luar terutama Malaysia mengalami pemulangan. Outlook dari defisit yang naik menjadi 5,07% dengan skenario belanja dan pendapatan yang Kami sampaikan. ini meningkat lebih tinggi dari awal rencana kita di APBN yang hanya sebesar 1,76%. dengan situasi pasar surat berharga di dalam negeri dan volatilitas global pembiayaan akan menjadi sangat-sangat menantang. pembiayaan akan meningkat sangat besar yaitu sebesar 545,7 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang 654,5 triliun dan pembiayaan non utang sebesar 108,9 triliun.

Pembiayaan ini akan kami upayakan mendapatkan financing-nya dari berbagai sumber yang paling aman duluan dan yang memiliki tingkat biaya paling kecil. termasuk pertama kita akan menggunakan saldo anggaran lebih kita, Sal kita bahkan juga sudah akan mempertimbangkan penggunaan seluruh dana Abadi pemerintah, dan dana-dana yang dikelola oleh BLU. Itu sudah masuk di dalam First Line of financing untuk pembiayaan yang diperkirakan meningkat, namun itu pasti tidak memadai. maka masih diperlukan penambahan penerbitan surat berharga negara. di dalam kondisi pasar domestik dan global yang sangat volatile kami terus akan berikhtiar mencari kesempatan yang terbaik untuk bisa mendapatkan biaya atau harga yang terbaik bagi surat berharga negara kita. jangan lupa di dunia ini sekarang terjadi

stain still beberapa negara bahkan sudah klaim menjadi default yang tadinya mereka dalam situasi investment grade.

Jadi kami juga harus sangat hati-hati didalam mengelola dan menavigasi situasi yang sangat-sangat tidak biasa. saya pada bulan Maret awal Februari yang lalu menyampaikan Covid ini jauh lebih kompleks dan lebih berat dari krisis keuangan 2008,2009. Karena Covid mengancam jiwa manusia, betul-betul mematahkan semua fondasi ekonomi di semua negara dan menimbulkan ... atau dalam hal ini anxiety ketidakpastian dan gejolak di pasar modal yang tidak ada ankernya tidak ada jangkarnya. Kalau dulu surat tahun 2008 itu jelas karena ini adalah penyebabnya lembaga keuangan dan korporasi , sehingga kalau lembaga keuangan korporasi nya itu sudah di declare Langsung dihitung berapa kerugian itu sudah muncul anker. ini sekarang tidak ada jangkar nya karena nggak ada yang tahu pasti sampai hari ini kapan Covid berhenti. Apakah berhentinya sesudah mengalami Puncak yang mengerikan atau dia berhenti dalam situasi yang jauh lebih baik. setiap negara punya skenario dan ini yang terus menjadi bayang-bayang bagi sektor keuangan seluruh dunia.

Maka Pimpinan dan para anggota kami menyampaikan memang Covid ini jauh lebih kompleks dibandingkan bahkan 97 98 yang mengalami situasi krisis karena kalau paling tidak 97 98 kita tahu penyebabnya dan itu bisa di contain. Kalau yang ini penyebabnya masih belum bisa dicontain. banyak skenario mengenai containment yang masih perlu untuk diuji. bahkan di RRT sendiri yang katanya Wuhan sudah bisa dibuka sekarang Muncul kasus baru di mana salah satu daerah lain juga mengalami penutupan.

Untuk kajian Covid ini banyak versinya bapak dan ibu sekalian ada yang menggunakan optimistic langsung bisa di-contain. ada yang sifatnya kemudian terjadi resurgence artinya kambuh kembali. Ada yang sifatnya adalah akan menjadi jauh lebih buruk. Jadi kami juga melihat semua skenario yang ditulis oleh berbagai Lembaga.

Nah, dalam suasana ini maka pemerintah tetap akan opportunistic untuk bisa melakukan pembiayaan defisit yang meningkat, dan tentu sangat berhati-hati. termasuk kita akan menggunakan semua line of Credit yang kita bisa peroleh dari lembaga multilateral dan bilateral yang biasanya memiliki tingkat harga jauh lebih baik karena mereka tidak bergerak sesuai market. ADB, world bank, AIRB sudah menaikkan line of creditnya kepada kita untuk defisit financing. kita juga didalam Perpu memungkinkan menerbitkan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia langsung di pasar primer, namun kami sangat sadar bahwa kemungkinan ini harus kita jaga bersama pak Gubernur dengan kami Menteri Keuangan untuk tidak menimbulkan credibility issue dari pengelolaan makro Indonesia yang selama ini termasuk dianggap sangat Saya dan Pak Gubernur sedang di dalam proses untuk membuat mekanisme agar mekanisme untuk pembelian SBN oleh Bank Indonesia Apabila dibutuhkan dia tetap mengikuti rambu-rambu, prudent dan yang disebut sebagai sharing risk maupun sharing cost yang responsible.

Dan kami akan sangat transparan kepada dewan maupun BPK maupun pihak manapun di market supaya ini tetap menjaga kredibilitas dari kebijakan moneter dan fiscal, karena di dalam situasi ini tidak ada yang menang tidak ada

yang kalah. Fiscal policy dan monetary policy kami sama-sama ada di dalam perahu yang sama. tidak ada yang menang tidak ada yang kalah, kalau kita menghadapi ombak kita menghadapinya Bersama-sama.

Ibu dan bapak sekalian meskipun kondisi APBN dalam situasi tekanan yang luar biasa, kami tetap harus melakukan langkah-langkah untuk menolong dan menjaga dunia usaha. termasuk kami akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha kami akan sampaikan beberapa stimulus yang sudah kita luncurkan.

Pertama stimulus 1 yang dikeluarkan pada bulan Januari untuk memberikan konteks kepada bapak dan Ibu sekalian Komisi XI. Januari itu situasinya Covid hanya di RRT dan respon seluruh dunia termasuk di Indonesia menutup jalur tourism dari RRT ke Indonesia. fokus kita di Januari adalah menolong daerah-daerah yang terkena dampak dari penutupan tourism. makanya fokusnya di insentif sektor pariwisata, waktu itu belum ada yang disebut Apa yang disebut social distancing secara meluas. kita sudah menaikkan kartu sembako, kita juga menyampaikan kepada daerah-daerah bisa mendapatkan DAK tourism untuk dijadikan countercyclical, dan kita juga memberikan percepatan penyaluran bantuan sosial termasuk PBI untuk JKN, dan kita bahkan menginstruksikan seluruh Kementerian lembaga sesuai bapak presiden sampaikan di sidang kabinet agar pemerintah daerah dan KL segera melakukan belanja untuk countercyclical itu Januari, karena waktu itu perhitungannya kondisinya ini hanya akan di Wuhan atau di RRT dan tidak meluas ke seluruh negara.

Jadi kita menggunakan APBN sebagai countercyclical, namun ternyata perubahan terjadi begitu cepat. waktu Februari sesudah Tahun Baru Cina selesai pabrik-pabrik di Indonesia menyampaikan bahwa mereka bahan bakunya sudah makin menipis kalau di RRT penutupan masih terjadi. jangan lupa waktu itu isolasi dari Wuhan terjadi lebih dari hampir satu setengah bulan atau bahkan sampai dengan Maret. sehingga terjadi distribusi supply chain maka kami meluncurkan stimulus yang kedua dimana fokusnya adalah pada sektor yang waktu itu menurut Kadin dan apindo disebutkan ini adalah sektor industri yang paling terdampak akibat disrupsi dari supply Chains karena adanya penutupan dari produksi di RRT terutama di Wuhan.

Maka kami memfokuskan pada 19 sektor manufaktur yang mengalami dampak paling besar dengan memberikan relaksasi PPh pasal 21 untuk kepada mereka yang penghasilannya dibawah 200 juta, pajak PPh 21nya ditanggung pemerintah. Kita membebaskan PPh pasal 22 untuk impor bahan baku dari 19 sektor tersebut termasuk yang di kite dan kite IKM. kita memberikan pengurangan pajak masa PPh 25 30% kepada 19 sektor ini dan kita memberikan restitusi PPN yang dipercepat kepada 19 sektor ini. totalnya adalah 8,6 plus 8,15 plus 4,2 plus 1,5 hanya untuk 19 sektor yang terdampak pertama dan paling besar akibat Covid yang terjadi di RRT. kita juga memberikan insentif non fiskal dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan untuk import barang-barang bahan baku dan untuk ekspor. serta memberikan layanan serta penurunan larangan terbatas. ini Waktu itu Februari kita fokusnya adalah sektor industri manufaktur yang menurut Kadin apindo mereka yang terdampak, namun seperti yang kami sampaikan tadi begitu terjadi Covid teridentifikasi positif di Indonesia pada bulan Maret yang kemudian eskalasinya

terjadi di minggu ke-2 dan ke-3 dengan terjadinya work from home dan yang lain-lain maka dampak Covid mulai melebar ke semua sektor tidak hanya tourism, restoran, dan industri manufaktur tapi sudah sampai kepada sektor transportasi dan sector perdagangan karena mall-mall kemudian dilakukan penutupan.

Maka pemerintah memutuskan untuk membuat paket kebijakan desain stimulus yang ketiga sekaligus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mencegah agar krisis kesehatan ini tidak melebar menjadi krisis ekonomi yang meluas dan kemudian berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. stimulus yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Presiden mencakup tadi yang sudah saya sampaikan 75 triliun untuk kesehatan terutama untuk pemberian insentif kepada tenaga medis pembelian alat-alat kesehatan seperti APD, rapid test, sarana dan prasarana kesehatan. Termasuk kepada 132 rumah sakit yang dijadikan rujukan.

Kita juga membayar BPJS akibat Keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan kelas tiga untuk pekerja bukan penerima upah. kita memberikan subsidi mereka karena mereka hanya membayar 25.500 sementara tarif kelas 3 seharusnya menjadi 42.000. untuk social safety net 110 triliun ini adalah untuk menambah jumlah PKH dari 9 juta menjadi 10 juta. kita juga menambahkan manfaatnya dengan pembayaran bulanan. tambahan untuk kartu sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima dengan nilai manfaat 200.000 atau naik 50.000 untuk 9 bulan artinya sampai Desember. kartu pra kerja yang tadinya hanya 10 triliun anggarannya dinaikkan dua kali lipat. ini dalam rangka mengantisipasi banyaknya PKH dan pekerja informal yang mengalami dampak terutama pengemudi ojek, warung kaki lima atau penjaga toko-toko di mall yang bisa mendapatkan kartu pra kerja ini dengan mendapatkan pelatihan 1 juta plus uang saku Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. tambahan ini akan memungkinkan kita menampung 5,6 juta pekerja. Presiden juga memutuskan untuk memberikan pembebasan tarif listrik bagi 405 VA pelanggan sebesar 100% dan diskon 50% untuk pelanggan 900VA, dan ini sudah mulai April ini untuk pelanggan yang prabayar atau pascabayar.

Ini berarti akan dinikmati 24 juta pelanggan, 450 VA dan 7 juta pelanggan rumah tangga dengan 900 VA bersubsidi. kita memberikan tambahan insentif untuk perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan menambahkan 1,5 triliun bagi BTN sehingga bisa menambah jumlah unit 175.000 unit dan masih ada jaring pengaman sosial lainnya seperti DKI kemarin menyampaikan bahwa mereka untuk menjaga agar orang-orang yang bekerja informal apa pengemudi ojek itu tetap bisa mendapatkan pendapatan DKI memiliki 3,7 juta yang hanya mampu dibayar oleh DKI sebesar 1,1 juta. Kami sedang terus menghitung kebutuhan Bansos bagi mereka ini nanti ada kaitanya dengan tidak boleh mudik atau diminta untuk tidak mudik namun mereka harus tetap bisa hidup di di Jakarta atau Jakarta Bogor Tangerang Bekasi walaupun pekerjaannya mereka menurun atau hilang.

Kita juga memberikan cadangan 25 triliun bagi logistik dan kebutuhan pokok ini karena diperkirakan dengan adanya karantina sifatnya lokal maka arus logistik dan kebutuhan pokok menjadi sangat-sangat besar, dan kita sudah bicara Menteri Sosial dalam hal ini sekarang terus berkomunikasi dengan bulog dan pasar-pasar mengenai masalah beras dan kebutuhan pokok

lainnya seperti gula minyak goreng, dan lainnya. untuk dukungan industri 70 triliun ini terutama dari sisi belanja adalah untuk cadangan pajak yang ditanggung pemerintah untuk tadi yang termasuk PPh pasal 21 dan PPN yang ditanggung pemerintah untuk sektor usaha yang lebih luas dari 19 sektor awal yang tadi diidentifikasi di stimulus 2.

Saat ini kami dengan Menko Perekonomian menerima banyak sekali usulan organda minta Hotel minta juga sama sector yang lainnya juga minta tadi bahkan wartawan pun sektor industri percetakan minta jadi banyak sekali yang kemudian akan ini yang menjadi salah satu yang sedang kita kaji bersama Menko Perekonomian mengenai kriteria sektor Seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya.

Saya sudah menginstruksikan kepada Dirjen pajak bahwa insentif ini juga harus dikaitkan dengan track record dari wajib pajak dan termasuk compliance mereka. ini supaya pada saat kita memberikan insentif kita juga akan membangun basis pajak baru untuk kedepannya. bea masuk yang ditanggung pemerintah kita perkirakan akan menelan 12 triliun sendiri karena sektornya tadi juga diperluas termasuk tadi sektor-sektor tekstil yang mungkin mengalami ...(suara tidak jelas)..... tapi dari sisi bahan bakunya mereka masih harus import.

Kami juga memasukkan stimulus untuk kredit usaha rakyat dalam bentuk penundaan cicilan dan bunga ini 6,1 triliun. di atas semua belanja ini kami Masih mencadangkan 150 triliun dukungan dunia usaha yang saat ini masih di dalam proses desain. ini nanti kita akan di dalam internal kami dengan(suara tidak jelas).... atau bank-bank lembaga keuangan dan bagaimana kriteria untuk bisa mengikuti program dukungan dunia usaha ini. ini yang sedang kita diskusikan kira-kira mungkin pemikirannya seperti ini.

Program dukungan dunia usaha ekonomi nasional yang tadi 150 triliun bisa dalam bentuk penyertaan modal pemerintah yang kemudian melalui BUMN yang ditunjuk untuk menjadi eksekutor dari program restrukturisasi ini. Atau melakukan dalam bentuk penempatan dana pemerintah yang bisa dilakukan langsung oleh pemerintah atau lembaga keuangan atau manajer investasi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah. ini bisa dalam bentuk penempatan dana atau investasi pemerintah dan juga untuk dukungan itu juga bisa dalam bentuk penjaminan yaitu memberikan skema penjaminan yang dijalankan langsung oleh pemerintah melalui yang dimiliki maupun oleh badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Ini semuanya masih merupakan pemikiran yang sudah kita mulai diskusikan dengan lembaga-lembaga keuangan termasuk dengan OJK agar kita mampu untuk menolong dunia usaha yang bentuknya mungkin akan berbeda-beda, namun prinsip-prinsip yang sangat penting selain kita ingin melindungi dunia usaha seperti kami sampaikan adalah untuk menciptakan mekanisme yang betul-betul dapat membantu dunia usaha dan prefer b adalah mereka yang memiliki track record yang baik. Bukan pengusaha yang bermasalah bahkan sebelum profit terjadi kita juga akan mempertimbangkan apakah usaha itu di sektor yang betul-betul terdampak karena Covid baik itu sektor terdampak atau areanya terdampak atau sector tersebut adalah sektor strategis. untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. kami juga

mendesain supaya moral hasad bisa diminimalkan atau dihilangkan, track record menjadi sangat penting dan kita akan melakukan berdasarkan rules based dan juga risk sharing sehingga institusi yang ditunjuk juga memiliki tanggung jawab dan ownership yang baik.

Tujuan dari pemberian stimulus dunia usaha ini adalah untuk membantu pelaku ekonomi agar bisa bertahan menghadapi kondisi ekonomi dan market yang mengalami depression atau penurunan yang sangat signifikan dan dalam waktu yang begitu cepat. ini untuk UMKM maupun pelaku ekonomi lainnya, kita juga ingin meminimalkan kemungkinan terjadinya PHK dan untuk membantu perbankan di dalam kemampuan memberikan relaksasi dan dukungan likuiditas meskipun ini Bank Indonesia pasti akan melakukan langkah-langkah di bidang kebijakan moneter namun ini di dalam rangka untuk menjaga agar sektor perbankan tidak mengalami tekanan likuiditas dalam rangka memberikan relaksasi bagi dunia usaha yang sedang mengalami ancaman atau kemungkinan non performing loan yang meningkat.

Dukungan bagi UMKM akan kami juga berikan dalam hal ini untuk memberikan dampak atau memberikan dukungan agar UMKM memiliki daya tahan karena dia merupakan sektor yang memiliki kontribusi lebih dari 60% dari GDP kita dan menyerap tenaga kerja lebih dari 97. Oleh karena itu UMKM juga akan menjadi perhatian kita selain yang tadi kredit usaha rakyat kami melakukannya melalui Dukungan ini. Yaitu dengan cara pemerintah akan menerbitkan bon ini yang nanti akan diberikan atau mampu di channel kan bagi nasabah UMKM existing atau KPR atau kredit motor yang sedang mengalami kesulitan dan sedang menjalankan restrukturisasi seperti yang dituangkan atau diinstruksikan oleh POJK 11 2020.

Kita dapat memberikan likuiditas atau working Capital pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan kebutuhan rutin terutama untuk pembayaran gaji karena ingin agar PHK bisa dicegah. perlu ditetapkan persyaratan bagi nasabah UMKM yang dibantu sekali lagi buat kami track record penting termasuk compliance mereka membayar pajak karena buat kami ini adalah penting uang rakyat diberikan pada rakyat kembali pada saat mereka butuh dan ini adalah sebagai suatu basis bagi perpajakan kita yang makin baik dan tentu ini terutama diprioritaskan pada sektor maupun area yang terdampak. kami melakukan pemetaan terhadap sektor sektor ekonomi yang mengalami dampak eksposur yang paling besar dari Covid. Ini adalah peta hitmap kita yang merah adalah yang highly Expose dengan Covid, yang orange moderate dan yang hijau adalah yang rendah. Terlihat di sini bahwa peta industrinya berbeda tentu Kami nanti akan terus melakukan penelitian lebih dalam di masing-masing industri dan area. kami akan tutup dengan dukungan kepada UMKM kredit usaha rakyat dan Umi didalam mereka menghadapi Covid 19 ini. untuk KUR yang realisasi akumulasi penyalurannya dari tahun 2015 hingga 2020 mencapai 506,65 triliyun outstanding nya sampai dengan 29 Februari adalah sebesar 165 triliyun. target kur tahun 2020 seperti yang bapak presiden sampaikan adalah 190. jadi dalam hal ini realisasi sampai dengan 29 baru mencapai 34,94 atau 18,38. jumlah debitur semenjak dari 2015 hingga 2020 adalah 19,5 juta debitur dan jumlah debitur yang aktif hingga tanggal 29 Februari kemarin adalah 11,9 juta debitur.

Stimulus yang kami berikan untuk debitur KUR ini adalah relaksasi terkait syarat administrasi pengajuan KUR dan kemudahan untuk mengakses KUR di dalam rangka untuk menambah jumlah kredit usaha rakyat calon debitur nya seperti tadi saya sampaikan sampai dengan 29 ini masih 34,94 triliun dan untuk KUR existing debitur yang sudah mendapatkan akses KUR maka kami memberikan relaksasi dengan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan yang terdiri dari 64,68 triliun pokok dan 3,879 bunga untuk 6 bulan kedepan. akibat penundaan ini maka diperlukan tambahan anggaran sebesar 6,1 Triliun rupiah.

Untuk umi dimana 1,98 juta debitur dengan total penyaluran 6 triliun di atas 6 triliun kami memberikan eksisting debitur diberikan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk 1 debitur. yang terdiri dari 1,292 triliun pokok dan 0,323 triliun bunga. untuk calon peminjam kami memberikan relaksasi syarat administrasi ini karena juga merupakan bagian dari Bansos yaitu safetynet bagi mereka yang mengalami PHK atau dalam hal ini mereka mengalami kondisi ekonomi yang berat mereka bisa mengakses ini.

Kebijakan yang sama juga akan dilakukan untuk 10,4 juta debitur Umi yang non PIP yaitu yang diberikan oleh Mekar koperasi yang terdiri dari 3,9 triliun dan 0,976 triliun bunga. penundaan ini akan diberikan kepada 10,4 juta debitur sehingga kita membutuhkan anggaran 3,9 plus 0,97. Ini nanti yang akan masuk di dalam anggaran dukungan kepada sektor usaha.

Kesimpulannya pimpinan dan para anggota Komisi XI yang kami hormati pandemic Covid-19 adalah kejadian yang extra Ordinary dan ini masih belum selesai episode nya masih akan terus berkembang diproyeksikan eskalasi akan memuncak hampir di semua negara pada bulan April dan Mei nanti. Indonesia tidak terkecuali menghadapi kondisi tantangan ini dan sudah melakukan langkah-langkah extra Ordinary di bidang penanganan Covid langsung bapak presiden dengan gugus tugas akan terus melakukan refinement atau penyempurnaan langkah-langkah sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak ada saat ini Apa yang disebut satu rumus yang dianggap sukses. semuanya saling melihat antar negara, Indonesia pun juga melakukan dan bapak presiden selalu menekankan kita melihat sosial kultural dan situasi masyarakat untuk menetapkan langkah-langkah Namun kita tidak boleh panik karena kita tidak ingin menularkan tambahan Covid 19 dengan kepanikan yang akan makin meningkatkan risiko kematian dan itu terjadi di banyak negara. atau salah langkah seperti lockdown yang dilakukan oleh India justru menimbulkan suasana chaos yang makin memperburuk penularan.

Kebijakan fiskal APBN kita didesain untuk mampu mendukung dan merespon kondisi Covid yang Extraordinary ini. pertama kita melakukan refocusing realokasi dan juga melakukan efisiensi dan menyediakan stimulus untuk sektor-sektor yang sekarang ini menjadi prioritas paling tinggi kesehatan dan keselamatan manusia, perlindungan masyarakat dan dukungan dunia usaha. Demikian pimpinan yang kami bisa sampaikan mohon maaf agak panjang kami kembalikan kepada pimpinan Pak Dito makasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang telah menyampaikan paparan pada rapat kerja siang hari ini. Selanjutnya kami persilahkan mungkin dari Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan paparannya Pak Feri silakan.

GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO):

Terima kasih

Bapak Pimpinan yang kami hormati

Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR-RI

Ibu Menteri Keuangan, Ketua OJK, ketua LPS dan beserta seluruh jajarannya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh (Waalaiikumsalam)

Salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu namo buddhaya salam kebajikan salom

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan Ridhonya kita dapat bersilaturahmi dengan Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI dalam kondisi yang sehat dan walafiat kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR-RI atas pelaksanaan rapat kerja ini secara virtual dalam rangka upaya bersama pencegahan Covid19.

Kami seluruh jajaran dari Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah dengan OJK dengan LPS dan seluruh pihak untuk bersama-sama mengatasi pandemic Covid19 ini yang memang merupakan suatu tantangan yang betul-betul tadi disampaikan oleh ibu Menteri Keuangan sangat-sangat Extraordinary karena Covid19 ini betul-betul bergerak sangat cepat sangat luas menimbulkan dampak kesehatan dan kemanusiaan dan harus kita antisipasi dampaknya terhadap ekonomi, terhadap UMKM, terhadap masyarakat dan tentu saja juga bagaimana kita mengantisipasi dan memitigasi dampaknya terhadap stabilitas makro ekonomi dan keuangan. kami akan menambahkan bagaimana Bank Indonesia bersama pemerintah OJK dan LPS menempuh langkah-langkah itu apa yang sudah kami lakukan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. sekaligus ini harapan kami bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan anggota dewan yang terhormat, yang untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Kalau boleh ke slide nomor berikutnya slide berikutnya ya nah Saya ingin tambahkan tadi yang telah disampaikan oleh ibu Menteri Keuangan grafik kiri atas menunjukkan Bagaimana eskalasi yang sangat sangat cepatnya dan sangat meluasnya Covid19 ini di seluruh negara. termasuk juga khususnya di Amerika Serikat dan kemudian juga di Eropa. tadi bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahkan di Amerika kasus positif Covid barangkali juga kalau di-update hari kemarin Bu menteri sudah lebih dari 300.000 ini yang meningkat sangat cepat di Itali di Spanyol di Perancis di Jerman kemudian juga di Inggris ini berarti bahwa negara-negara ini kasus positifnya jauh-jauh lebih tinggi dari

di Tiongkok dan terjadi pada saat dan kurun waktu dan waktu yang sangat cepat khususnya di bulan maret ini dan karena itu ini yang tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan tidak hanya menimbulkan dampak kemanusiaan tapi juga menyebabkan gangguan hubungan berbagai aktivitas ekonomi terhadap tenaga kerja dan pendapatan penurunan pendapatan masyarakat. meskipun otoritas dari berbagai negara mengeluarkan stimulus fiskal dan Bank-bank. Sentral juga menurunkan suku bunga dan melakukan injeksi likuiditas tadi disampaikan Bu Menteri Keuangan juga risiko ekonomi dunia akan mengalami krisis

Di pasar keuangan kalau kita lihat grafik atas Tengah grafik atas Tengah tadi ibu Menteri Keuangan sudah menyebutkan bahwa begitu cepatnya wabah pandemik Covid ini di seluruh dunia selama bulan Maret Ini menimbulkan kepanikan di pasar keuangan global. Investor-investor Global panik dan Karena itu indikatornya adalah indikator risiko keuangan yang tadi sudah sudah disampaikan bu Menteri Keuangan antara lain ada fix fix itulah indikator volatilitas di pasar keuangan di Amerika yang sebelumnya itu dibawah 20 indeksnya, grafik yang coklat kemudian melonjak 4 kali lipat menjadi 82,7, kemudian sedikit menurun setelah adanya stimulus fiskal dari Amerika Serikat dan juga injeksi likuiditas dari Fat. tapi kita lihat bahwa ini masih lebih tinggi dari yang terjadi sebelum Covid. yang biru adalah juga menunjukkan indikator risiko terhadap Global Bond kita yang kita sering sebut adalah CDS credit default swap Indonesia yang sebetulnya yang sebelumnya adalah ini tingkatnya 66 kemudian melonjak menjadi 271 dan kemudian sekarang sedikit menurun meskipun levelnya sangat tinggi.

Kepanikan pemodal-pemodal pasar keuangan Global ini yang kemudian menimbulkan gelombang pelepasan aset aset keuangan seluruh dunia tidak peduli Apakah saham Apakah obligasi Apakah emas seluruh pemodal Global investor Global menarik menukarkan melepaskan menjual obligasi saham emas dan kemudian mereka lebih memilih dalam bentuk tuna. itu yang grafik kanan atas bagaimana mereka melepas saham obligasi dan berbagai asetnya dan menukarkan dalam bentuk tunai yang dalam ini adalah dalam bentuk mata uang Dolar. ingat bahwa mata uang Dolar masih merupakan 80% dari mata uang dunia sehingga yang terjadi tidak hanya gelombang Capital outflow dari seluruh dunia tapi juga kenaikan suku bunga atau yield obligasi penurunan harga saham kiri bawah kalau boleh kawan-kawan pustaka menampilkan yang kiri bawah menunjukkan bagaimana kawan-kawan pustaka kalau bisa menunjukkan grafik apa slide saya menunjukkan Indonesia memang tidak terkecuali.

Kelihatan memang di sini lah tadi bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan di global terjadi kepanikan pasar keuangan Global di Indonesia mulai Maret ini kelihatan grafik kiri bawah yang biru, Bagaimana confirm case kasus positif di Indonesia yang terus meningkat. ini yang kemudian investor Global juga melihat bahwa peningkatan eskalasi kasus positif di Indonesia. nah 2 hal ini kepanikan di investor global dan meningkatnya kasus positif di Indonesia selama bulan Maret ini yang kemudian menimbulkan gelombang capital outflow dari Indonesia yang kelihatan di tabel kiri Tengah. ini kelihatan disitu kami sampaikan aliran modal asing dalam bentuk SBN obligasi korporasi dan saham.

Dalam periode sebelum Covid, tabel bawah Tengah bawah Tengah sebelum Covid di periode 1 sampai dengan 19 Januari menunjukkan ada inflow SBN 22, 29 triliun, inflow saham 3,55 triliun sehingga periode sebelum Covid ada inflow 22,85 triliun. tapi lihat di table bawah ya bawah tengah dikolom tengah periode 20 Januari sampai dengan 1 April periode corona disitu kelihatan SBN itu keluar 157,37 triliun, kemudian saham 13, 26 triliun dalam periode yang singkat ini keluar portfolio inflow dari Indonesia 171,6 triliun. Ini memang terjadinya memang eskalasinya pada minggu kedua Maret dan puncaknya pada minggu ketiga Maret. nah kondisi ini yang kemudian menyebabkan Kenapa di sebelah kanan bawah terjadi pelemahan nilai tukar rupiah.

Ini semua terjadi di seluruh dunia mengalami Pelemahan nilai tukar sebagaimana grafik kanan bawah rupiah dan valuta asing semuanya melemah dan dalam periode ini kalau kita bandingkan nilai tukar Rupiah rupiah itu mengalami Pelemahan point to point 12,03, secara point to point atau 9,3% dalam bulan Maret dibandingkan bulan Februari. meskipun bank Indonesia selama bulan bulan bulan dari Februari dan Maret ini melakukan stabilisasi-stabilisasi nilai tukar Rupiah baik di spot di NDF maupun dengan pembeli pembelian SBN dari pasar sekunder.

Sejak minggu ke empat Maret 2020 Alhamdulillah nilai tukar rupiah itu berangsur-angsur stabil dan dewasa ini diperkirakan diperdagangkan di sekitar 16.400 16.500. dengan demikian memang ini yang tadi kami garisbawahi yang disampaikan oleh bu Menteri Keuangan. pentingnya langkah-langkah untuk mitigasi Covid 19 karena ini betul-betul permasalahannya pencegahan dari dampaknya terhadap ekonomi dan bagaimana kami berkoordinasi dengan pemerintah OJK dan LPS menempuh langkah-langkah untuk stabilitasi di makroekonomi dan sistem keuangan.

Slide berikutnya Bapak Pimpinan dan anggota yang terhormat memang kalau kita lihat sejumlah indikator ekonomi dan keuangan Sampai dengan saat ini memang masih relatif terjaga. inflasi di bulan maret rendah, 0,10% atau year-on-year nya adalah 2,96% neraca perdagangan di Februari masih surplus demikian juga nanti pak ... akan menjelaskan secara stabilitas perbankan terjaga dengan Capital adequacy ratio yang tinggi, NPL yang rendah dan juga likuiditas yang cukup juga di sistem pembayaran.

Yang harus Kita waspadai harus kita lakukan antisipasi adalah tadi eskalasi dari Covid. Penanganan-penanganan di bidang kesehatan kemanusiaan dampaknya terhadap sektor riil dan tentu saja bagaimana kita harus secara bersama melakukan langkah-langkah antisipasi semoga langkah-langkah ini bisa tetap menjaga kondusifnya ekonomi kita dan kemudian berbagai hal yang di kondisi ekonomi kita dan sistem keuangan lebih baik.

Dalam konteks itu sejak awal tahun kami memang berempat terus melakukan koordinasi yang secara erat, pemerintah Bi OJK LPS dan koordinasi itu semakin erat di bulan bulan Maret ini menyikapi eskalasi dari pewabahan pandemic Covid 19. di slide berikutnya Kalau boleh inilah yang memang kami terus lakukan secara bersama-sama. Bu Menteri Keuangan tadi sudah stimulus fiskal tahap 1 tahap 2 dan kemudian tahap 3. Kami di bank Indonesia juga sejak Februari juga sudah melakukan penguatan bauran kebijakan bank Indonesia

untuk mitigasi Covid 19 seluruh instrumen kami arahkan untuk itu dan itu sudah kami umumkan dalam rapat dewan Gubernur 19 20 Februari 2 Maret dan 18 19 Maret 2020 dan tentu saja nanti ada beberapa langkah ke depan yang kami sampaikan.

Esensinya ini menyangkut 5 aspek dan skemudian 6 aspek berikut ini yang pertama kami udah melakukan penurunan suku bunga BI rate 2 kali sehingga kemudian sekarang adalah 4,5%. ini konsisten dengan inflasi yang terkendali dan juga bersama pemerintah mendukung pemulihan ekonomi. Kami menyadari meskipun ruang penurunan suku bunga ini masih terbuka tentu saja bank Indonesia akan tetap prudent sejalan juga menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan juga masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Yang kedua ini yang kemudian kami terus melakukan intensitas intervensi di pasar untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah. tingkatnya terus kami lakukan sejalan dengan tekanan-tekanan yang ada. kami sebut Disini yang kita sebut adalah Tripel intervention kami melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah baik di pasar Spot di domestic non delivery forward maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Tentu saja ini intervensi dari pasar valuta asing di pasar SBN tersebut. dikarenakan tekanan rupiah untuk di Indonesia itu terutama berasal dari pelepasan investor asing yang melepas sahamnya melepas SBN-nya kemudian membeli valuta asing. Oleh karena itu dapat kami laporkan kepada bapak pimpinan dan anggota dewan yang terhormat selama tahun 2020. Bank Indonesia telah membeli SBN dari pasar sekunder sebesar 166 triliun rupiah yang kemudian kami memberli SBN dari pasar sekunder. Inilah yang kami lakukan bersama Bu Menteri Keuangan Bagaimana koordinasi bank Indonesia dengan kementerian keuangan sama-sama menjaga stabilitas pasar khususnya pasar valas, nilai tukar dan juga pasar SBN sekaligus tentu saja pembelian SBN dari pasar sekunder ini ada kuantitatif icing kami. Kuantitaif icing kami agar likuiditas itu lebih dari cukup dan tentu saja koordinasi dengan Pak(suara tidak jelas)... Bagaimana juga OJK secara bersama menstabilkan pasar saham itu yang kedua.

Yang ke 3 kami juga memperluas instrument dan transaksi di pasar uang dan pasar valas. Khususnya kami arahkan kepada para investor asing. Agar investor asing ini lebih banyak melakukan lindung nilai tukar mereka melalui transaksi forward yaitu melalui domestic non delivery forward Oleh karena itu kami sudah melakukan langkah-langkah relaksasi misalnya rekening rupiah investor asing bisa digunakan untuk underline di NDF. juga pelonggaran ketentuan posisi devisa neto dan juga bagaimana investor asing menggunakan pula bank-bank(suara tidak jelas)...domestik untuk melayani kepentingannya.

Yang ke 4 kami melakukan injeksi likuiditas kalau istilahnya di negara lain adalah kuantitatif icing. Ini adalah yang ke empat adalah pelonggaran likuiditas itu istilahnya di negara lain adalah kuantitatif icing itu yang kami lakukan pelonggaran likuiditas atau injeksi likuiditas. kami sudah sejauh ini kami bank Indonesia telah melakukan kuantitatif icing atau injeksi likuiditas Rupiah ke pasar uang dan perbankan hampir 300 triliun, 300 triliun, itu kami lakukan injeksi likuiditas. 300 triliun itu dari tadi pembelian SBN dari pasar sekunder Kalau kami membeli SBN dari pasar sekunder dalam waktu yang sama kami menginjeksi likuiditas ke pasar dan ke perbankan. tadi kami

sampaikan 166 triliun. kami juga menyediakan likuiditas perbankan melalui reflow yang kami sediakan setiap hari kami telah menyediakan likuiditas kepada perbankan lebih dari 56 triliun melalui mekanisme term reflow dengan underline SBN. kami juga sudah menurunkan giro wajib minimum, giro wajib minimum kami turunkan sekaligus menambah likuiditas di perbankan. awal tahun kami sudah menurunkan tambahan likuiditas 53 triliun kemudian per 1 April kami tambah lagi 22 triliun. sehingga ini secara keseluruhan itu sudah hampir 300 triliun.

Di pasar valas kami juga melakukan penurunan giro wajib minimum valas sebesar 4% atau sekitar 3,2 miliar dolar Amerika. sehingga menambah likuiditas di pasar mengurangi keketatan dan juga membantu stabilitasi dari nilai tukar rupiah itu yang ke-4.

Yang ke 5 kami juga berkoordinasi dengan OJK Bagaimana ketentuan-ketentuan apakah di (suara tidak jelas)...di bank Indonesia dan juga di mikro(suara tidak jelas).... di OJK itu betul-betul bisa bersinergi melakukan pelanggaran mendorong pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Tahun lalu kami sudah menurunkan merelaksasi loan to value ratio dan juga financing to funding ratio kami kembali tahun ini melonggarkan ketentuan financing funding ratio yang mencakup pula sumber-sumber pendanaan dari kantor-kantor bank nasional kita yang di luar negeri.

Kami juga penurunan(suara tidak jelas)... rupiah yang efektif per 1 April ini kami juga Arahkan agar perbankan itu juga menyediakan pembiayaan kepada dunia usaha khususnya untuk ekspor impor maupun UMKM dalam rangka mitigasi dampak Covid19. Yang keenam di bidang sistem pembayaran kami memastikan kelancaran dan keamanan sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha melalui perbankan dengan dan lembaga keuangan lainnya

Untuk mencegah penyebaran Covid 19 melalui peredaran uang kami juga sejak awal sudah memahami itu kami lihat kasus-kasus di Cina maupun di Jerman kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi itu. bahwa sejak periode Covid itu kami Bank Indonesia sudah melakukan karantina setiap setoran uang tunai dari perbankan, setoran uang tunai dari perbankan sudah kami lakukan karantina dan kami gantikan dengan uang cetak baru yang higienis. ini bekerjasama dengan perbankan dan asosiasi pembayaran. kami pastikan bahwa Persediaan uang tunai bank Indonesia lebih dari cukup.

Lebih dari 6 bulan untuk keperluan itu dan bekerjasama dengan asosiasi kami juga sudah melakukan front loading penyediaan uang dengan perbankan di mesin-mesin ATM yang kemudian diperbesar baik volume maupun tingkatnya sehingga kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Lebih dari itu bank Indonesia bersama perbankan dan asosiasi mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transaksi non tunai seperti uang elektronik, mobile ataupun internet banking. dalam hal ini katanya you are Indonesia standart yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada awal Maret yang pada waktu itu kami terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi XI yang mendukung kampanye Kris ini sehingga ini bisa juga mempermudah

penggunaan transaksi elektronik di masyarakat disamping mendukung perluasan usaha UMKM.

Bu Menteri keuangan tadi juga menyebutkan banyak program-program sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Apakah PKH, BPNT, kartu pra kerja maupun Kartu Indonesia Pintar. kami juga mendukung elektronifikasi penyaluran program program ini bisa dilakukan secara cepat, terarah dan juga secara elektronik. ini yang terus kami lakukan di bidang system pembayaran. slide berikutnya di bidang sistem pembayaran kami juga melakukan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik bank indonesia berlaku sejak 30 Maret sampai dengan 29 2020 sesuai dengan masa status darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. Kali ini kami tempuh semata-mata mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat dalam memitigasi penyebaran Covid 19 setelah berkoordinasi tentu saja secara erat dengan OJK dengan industri perbankan dengan asosiasi dan penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Kami berkomitmen penuh bahwa pelaksanaan-pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, menjaga pasar uang, pelayanan jasa perbankan, sistem pembayaran akan tetap berjalan baik untuk melayani berbagai transaksi ekonomi dan keuangan masyarakat.

Bapak Pimpinan, Anggota Komisi XI DPR-RI yang kami hormati. Tadi bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan menjelaskan bagaimana eskalasi dari Covid ini harus kita antisipasi secara baik harus kita tempuh langkah-langkah bersama koordinasi yang sangat erat baik pemerintah Bank Indonesia OJK maupun LPS. Ini adalah hal-hal yang kami bahas bersama dan bagaimana kami semuanya melakukan langkah-langkah antisipasi itu. Tentu saja langkah-langkah baik masalah kesehatan, kemanusiaan langkah-langkah pencegahan dan dampaknya terhadap masyarakat, UMKM, terhadap tenaga kerja maupun dunia usaha dan tentu saja rambatannya perlu kita antisipasi dampaknya terhadap perbankan dan sektor keuangan.

Sebagaimana kita sudah ketahui di bidang kesehatan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan atau pengaturan pembatasan sosial berskala besar. ini langkah-langkah yang dilakukan agar mencegah memitigasi pewabahan atau pandemik Covid secara lebih luas sehingga dampaknya terhadap manusia, terhadap ekonomi, bisa diminimalisir. Bu Menteri keuangan tadi sudah menjelaskan bagaimana stimulus fiskal itu diperlukan dan dikeluarkan untuk tentu saja tidak hanya tambahan anggaran kesehatan juga jaring pengaman sosial insentif industri maupun pemulihan ekonomi. ini yang terus dilakukan dari sisi pemerintah tentu saja nanti Pak Bima dan Pak Halim akan menjelaskan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan dari sisi OJK maupun LPS dalam rangka memitigasi dampak Covid tadi terhadap kesehatan perbankan terhadap kemudian bagaimana nanti terhadap stabilitas sistem keuangan.

Dan dalam konteks koordinasi yang sangat erat ini kami akan menyampaikan empat hal yang tentu saja dalam konteks koordinasi yang tadi bagaimana agar Covid 19 ini bisa mencegah penurunan ekonomi lebih lanjut serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan dengan tetap

mendasarkan pada kaidah-kaidah kebijakan yang prudent dan mengedepankan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertama bank Indonesia akan terus mengintensifkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah agar stabilisasi makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga dan kondusif bagi perekonomian. dalam kaitan ini kami berpandangan bahwa ditingkat nilai tukar Rupiah dewasa ini relatif memadai dan secara fundamental itu under value. ke depan dengan langkah langkah tadi kami memperkirakan bahwa rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguap ke arah Rp15.000 per US Dollar pada akhir tahun 2020. Bank Indonesia berkomitmen akan terus berada di pasar melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah melakukan intervensi baik ... secara forward melalui domestic non delivery forward maupun pembelian SBN dari pasar sekunder khususnya pada periode periode terjadinya capital outflow. Kami tegaskan bahwa meskipun jumlah cadangan devisa itu menurun karena ada kebutuhan kebutuhan intervensi Insya Allah besok kami akan umumkan, kami sampaikan di sini bahwa jumlah cadangan devisa yang dimiliki kita saat ini lebih dari cukup, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan impor, Pembayaran utang pemerintah , maupun untuk langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah. dalam hal ini kami juga kalau dalam hal diperlukan Bank Indonesia juga mempunyai kerjasama bilateral swap dengan sejumlah Bank Sentral sebagai second line of Defense. Dengan Tiongkok kurang lebih setara dengan 3 setara dengan 30 dolar 30 milyar dolar Amerika Serikat dengan Jepang setara dengan 22,76 miliar dolar Amerika, dengan Korea Selatan sekitar 10 juta, dengan Singapura itu juga setara dengan 7 milyar dolar Amerika Serikat. Saya ulangi dengan Tiongkok 30 miliar, dengan Jepang 22,76 miliar, dengan Korea Selatan sekitar 10 miliar, dengan Singapura itu ada sekitar 7 miliar dolar Amerika atau 10 miliar dollar singapur. ini yang dapat kami sampaikan.

Yang kedua kami terus akan melakukan quantitative easing pelonggaran likuiditas yang dilakukan oleh bank Indonesia dan secara Sinergi ini di koordinasi kan secara sinergi dengan stimulus fiskal oleh pemerintah dan relaksasi pengaturan kredit perbankan oleh OJK untuk pemulihan ekonomi baik UMKM maupun dunia usaha. Tadi kami sampaikan bahwa bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas perbankan dalam jumlah besar hampir 300 triliun rupiah sejak awal tahun 2020 ini. Kondisi likuiditas perbankan lebih dari cukup yang diperlukan sekarang adalah bagaimana likuiditas di perbankan di pasar keuangan itu bisa mengalir ke sektor riil, bisa mengalir ke sector riil, membiayai dunia usaha, membiayai UMKM, dan seterusnya.

Inilah kenapa stimulus fiskalnya dari Bu Menteri Keuangan sangat diperlukan. Stimulus fiskal yang diarahkan untuk program program sosial produksi dan investasi baik dunia usaha maupun UMKM ini tentu saja akan menopang konsumsi masyarakat, produksi dan investasi, dan tentu saja juga tentu saja sehingga dapat memanfaatkan kuantitatif easing atau injeksi likuiditas yang sudah kami lakukan. Disinilah eratnya hubungan antara moneter dan fiskal. moneter kami sudah injeksi likuiditas, di fiskalnya mendorong stimulus sehingga penggunaan likuiditas di perbankan bisa mengalir ke sektor riil ke dunia usaha juga ke masyarakat maupun yang lain-lain.

Dalam waktu yang sama Pak Bimo nanti akan menjelaskan beberapa pengaturan mikro(suara tidak jelas).... juga direlaksasi oleh OJK agar mempermudah perbankan di dalam pembiayaan kepada UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi dan dampak Covid 19. Pak Bimo Sudah mengeluarkan ketentuan ini kami juga mengajak dan perbankan kami juga mencermati Bagaimana BRI juga sudah Menindaklanjuti ini, mandiri juga sudah menempuh langkah-langkah ini dan ini yang kami lakukan seperti yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan bersama pemerintah bersama OJK ini tadi Sinergi kuantitatif easing yang dilakukan oleh bank sentral kemudian stimulus fiskal dan relaksasi ketentuan dari OJK ini yang secara Sinergi diharapkan bisa menopang ekonomi ke depan.

.... (rekaman terputus)....selanjutnya adalah yang ketiga pembelian Sun SBSN dari Pasar Perdana yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penanganan Covid 19. Bu Menteri Keuangan tadi sudah menjelaskan panjang lebar ini adalah langkah-langkah yang memang harus dilakukan dalam kondisi abnormal dalam kondisi extra Ordinary, dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Tentu saja ini akan kami lakukan tentu saja dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah kebijakan baik moneter fiskal yang prudent dan juga sesuai tata kelola dan tentu saja dalam konteks ini tentu saja dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi. Kalau kondisi kembali normal tentu saja Bank Indonesia tidak akan melakukan pembiayaan defisit fiskal dengan pembelian Sun dari SBN dari Pasar Perdana sebagaimana diatur dalam undang-undang Bank Indonesia.

Nah dalam kondisi yang sekarang ini ya memang Extraordinary tadi Ibu Menteri Keuangan bersama saya sudah mempunyai komitmen Bersama bahwa Menteri Keuangan seperti tadi bu menteri sudah menjelaskan agar memaksimalkan berbagai sumber dana yang ada. tadi sudah dijelaskan apakah siapa maupun yang lain juga dari Bank Dunia dari ADB dan kemudian bagaimana itu selanjutnya akan diterbitkan Sun SBN di pasar baik Global maupun domestic.

Tentu saja kami menyadari dalam kondisi yang sekarang ada kemungkinan bahwa pasar tidak mampu menyerap kebutuhan penerbitan SBN Sun maupun SBSN untuk yang tadi diperlukan untuk pembiayaan fiskal. Dalam hal inilah Kenapa bank Indonesia di dalam Perpu ini dimungkinkan diberikan kekuasaan untuk membeli SBN yaitu sun SBSN di pasar primer. ini yang ini yang sering kami sampaikan bank Indonesia dalam konteks ini berperan sebagai last Resort kalau memang pasar tidak bisa menyerap kapasitas pasar tidak menyerap dalam arti karena mungkin volumenya terlalu besar dan atau kalau menyebabkan kenaikan yield yang terlalu tinggi. Bu Menteri Keuangan menyadari kemungkinan ada kenaikan yield tapi kalau kenaikan yield itu irasional, terlalu tinggi ini yang kemudian kenapa bank Indonesia dapat ikut membeli sebagian dari sun maupun SBSN tersebut di Pasar Perdana.

Ini yang tadi dijelaskan oleh bu Menteri Keuangan secara panjang lebar komitmen kami berdua untuk melaksanakan ini berdasarkan kaidah-kaidah kebijakan. Apakah moneter atau fiskal yang prudent dan tentu saja akan mempertimbangkan berbagai dampaknya. apakah terhadap pasar SBN maupun juga terhadap inflasi. Kami memang dalam waktu dekat akan membicarakan secara detil mengenai mekanisme dan teknisnya seperti apa.

Beberapa waktu hari ini bu Menteri keuangan sedang focus untuk merumuskan fiscal dan sekarang beliau juga sudah siap. Kami juga dalam beberapa hari ini juga fokus bagaimana nanti menyusun mekanisme ini tentu saja setelah Raker ini memang kami sudah mengagendakan untuk detailnya seperti apa, jumlahnya berapa, bagaimana itu bisa dilakukan sehingga ini yang betul-betul Sinergi yang sangat kuat antara kementerian keuangan dengan juga dengan Bank Indonesia. Dalam konteks ini Kami Perlu tegaskan bukan built out. Ini yang perlu kami tegaskan, ini bukan built out mohon dijelaskan bahwa dalam konteks ini tidak ada built out.

Ini yang kami selalu jelaskan tadi tentu saja dalam berbagai hal nanti masalah kaidah-kaidah dan juga tata kelola itu terus dilakukan termasuk tentu saja kemungkinan-kemungkinan kalau pemerintah harus mengeluarkan Sun maupun SBN sbsn maupun nanti dalam konteks-konteks misalnya pemberian pinjaman maupun permodalan kepada LPS tentu saja Nanti Pak Wimboh sama Pak Halim bisa menjelaskan kalau itu diperlukan tentu saja akan dibahas melalui KSSK berapa kebutuhan Sun sama SBSN dan itu tentu saja ini yang kemudian pada waktu-waktu Selanjutnya akan kami kami pada saat ini sedang fokus dengan Bu Menteri Keuangan Bagaimana memastikan kebutuhan anggaran itu dananya itu bisa disediakan, dan memfokuskan bagaimana nanti itu Bagaimana penanganan terhadap dunia usaha yang tadi disampaikan melalui tadi beberapa program pemulihan ekonomi yang dijelaskan oleh Bu Menteri Keuangan. 2 fokus ini yang menjadi jangka pendek tentu saja waktu-waktu berikutnya Akan Kemudian Bagaimana mengantisipasi terhadap perbankan maupun dampaknya terhadap LPS.

Yang keempat bapak Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati. Dalam perpu ini Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk pengelolaan lalu lintas devisa yang diberlakukan hanya terhadap penduduk Indonesia. kami ulangi ini kewenangan dalam perpu ini pengelolaan devisa hanya diberlakukan terhadap penduduk Indonesia. ini bukan kebijakan kontrol devisa, bukan control devisa. Kenapa demikian, Indonesia masih mengalami kesenjangan tabungan dan investasi dan karenanya memerlukan investasi asing. Baik investasi portfolio maupun PMA, penanaman modal asing untuk Bagaimana memulihkan ekonomi apapun juga untuk pembiayaan pembangunan ekonomi. oleh karena itu kebebasan lalu lintas devisa bagi investor asing tetap dijamin. Kewenangan yang diberikan dalam Perpu Nomor 1 tahun 2020 pada bank Indonesia seperti tadi di dalam pengelolaan lalu lintas devisa hanya berlaku bagi penduduk. bentuknya seperti apa, salah satu bentuknya adalah kewajiban para eksportir untuk konversi valuta asing devisa hasil ekspornya ke dalam rupiah sehingga mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Saat ini kami sedang menyusun peraturan pelaksanaannya meskipun kami harus sampaikan disini kami belum ada rencana untuk memberlakukannya dalam jangka pendek, Namun demikian kalau hal diperlukan dalam hal mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan stabilitas perekonomian Indonesia secara keseluruhan, kebijakan tersebut dapat sewaktu-waktu diterapkan dalam konteks ini kami terima kasih kepada para eksportir kepada perbankan para pelaku pasar yang tentu saja kami harapkan terus mendukung langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah ini agar

memang itu bisa tetap dijaga stabilitas nilai tukar nya, stabilitas makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan sehingga kami dapat berfokus bersama pemerintah bersama OJK bersama LPS bagaimana kami memfokuskan diri untuk langkah-langkah, Bagaimana mengatasi masalah UMKM masalah tenaga kerja masalah pendapatan masyarakat masalah dunia usaha ini yang menjadi pusat perhatian kami supaya ini betul-betul bisa kita atasi segera yang sehingga kita bisa sebagai langkah-langkah antisipasi antisipasi. Oleh karena itu kami juga mengajak Pimpinan dan anggota dewan juga masyarakat media Para investor para pengusaha untuk sama-sama menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah ini agar kita semua bisa memfokuskan kepada langkah-langkah di bidang ekonomi.

Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR-RI yang kami hormati demikian beberapa yang dapat kami sampaikan sebagai langkah koordinatif dari bank Indonesia bersama pemerintah OJK maupun LPS. kami menggarisbawahi seperti tadi yang disampaikan oleh bu Menteri keuangan bahwa yang kita hadapi pandemic Covid19 ini sangat kompleks, bergerak sangat cepat dan tentu saja perlu langkah-langkah antisipasi kita harus bersama melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah pandemic Covid19 ini baik dari aspek kemanusiaan maupun terhadap ekonomi maupun terhadap keuangan. langkah-langkah yang tadi disampaikan bu Menteri Keuangan, yang tadi juga sudah saya sampaikan sebagai bagian ini dan tentu saja nanti pak wimboh dan Pak Halim akan juga menjelaskan langkah-langkah antisipasi di bidang perbankan di bidang sector keuangan maupun langkah-langkah yang lain .

Untuk itu tentu saja langkah-langkah kebijakan ini memerlukan dukungan semua pihak termasuk Bapak Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, BPK, aparat penegak hukum dan masyarakat secara luas. lebih dari itu sebagai umat beragama kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang maha kuasa berdoa semoga Allah, Tuhan yang maha kuasa selalu melindungi kita semua pemimpin dan bangsa Indonesia dan diberikan kemudahan dan kekuatan dalam memitigasi dampak Covid 19 ini terhadap kemanusiaan ekonomi dan keuangan kita amin amin ya rabbal alamin sekian terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia pak Bimo yang telah menyampaikan pemaparannya yang sudah sangat detil jadi nanti di dalam pemaparan rapat kerja dengan Bank Indonesia yaitu hari Rabu pukul 11.00 mungkin tidak usah dipaparkan lagi langsung pendalaman saja. selanjutnya kami persilahkan kepada untuk menyampaikan paparannya mungkin bisa disampaikan secara highlight saja dan perlu kami sampaikan disini bahwa Raker nya harus kita akhiri paling lambat adalah pukul 05.30. karena mengingat sekretariat kita sekarang masih bekerja di DPR RI dan ini sesuai dengan protokol Covid 19 tidak boleh terlalu lama berada di sana. Jadi mohon kami persilakan dewan Komisioner OJK maupun LPS nanti disampaikan secara highlight saja karena kita nanti kan masih ada raker lagi dengan OJK hari Selasa dan LPS hari Kamis. Kami persilakan pak Wimboh.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Terimakasih bapak ketua.

Yang kami hormati bapak ketua, wakil ketua, serta Bapak Ibu anggota Komisi XI DPR-RI

Yang kami hormati Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan

Bapak Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia

Bapak Halim Alamsyah Ketua Dewan Komisiner LPS dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore salam sejahtera buat kita semua.

Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama untuk melakukan rapat kerja dengan video conference pada siang dan sore hari ini dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ketua dan wakil ketua Komisi XI serta seluruh anggota yang telah berkenan untuk melakukan Rapat ini dengan video conference. kami akan menambahkan sedikit aja yang telah disampaikan Bu Menteri Keuangan dan pak Gubernur ya tentunya besok kami bisa membahas lebih detail lagi dan untuk itu kami upayakan untuk hanya singkat saja pemaparan kami ya. Dapat kami sampaikan bahwa yang terjadi sekarang ini betul-betul berbeda dengan krisis yang 2008 sama 97 98 betul-betul beda. Kalau krisis itu 97 98 dimulai dari nilai tukar dan juga kalau 2008 dimulai dari Leman di Amerika. Ini sekarang ini pertama terjadinya seluruh dunia kena dan yang kena ini serentak. UMKM kena, mikro kena sektor informal kena, perusahaan korporasi bisa kena juga ya. nah inilah yang kita responnya juga ini betul-betul sangat berbeda. sehingga inilah yang kita lakukan bersama-sama Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia dan LPS ini bagaimana kita yang pertama bisa dampak yang ada sekarang itu bisa diminimalisir. lantas yang kedua Bagaimana sambil menunggu Covid ini selesai ini kita bisa segera bangkit Kembali. Ini 2 hal itulah yang bersama-sama kita lakukan selama ini dan bahkan kita bersama-sama menyiapkan payung kalau kalau kondisinya tetap semakin tidak terkendalikan.

Yang kemarin di beberapa yang dimuat dalam Perpu adalah terutama yang di OJK mengenai merger itu adalah sebenarnya hanya untuk payung apabila nanti ada hujan sehingga masyarakat dan stakeholder bisa positif sentimennya karena yakin bahwa ternyata otoritas siap kalau kalau terjadi tapi kan kita tidak menginginkan itu terjadi sebenarnya. Nah inilah yang itu garis besar di Perpu diantaranya yang di OJK adalah merger itu adalah untuk itu.

Mohon ijin kami sedikit apa yang telah kami lakukan yang ini adalah sentimen negatif telah terjadi di sektor keuangan ya tapi disampaikan oleh bu Menteri Keuangan bahwa IHSG 26,61% tapi seluruh dunia sama. ada yang lebih buruk tadi juga pak Perry sudah menayangkan sangat detail ya dan juga terjadi net sell di pasar saham yang jumlahnya sudah 10,7 triliun. dan juga net

foreign investor sell di SBN itu jumlahnya 129,1 jadi sentimen negatif itu sudah betul-betul terjadi. Nah ini yang kemarin kita lakukan hanya sekedar Bagaimana men-smoothing agar penurunan itu tidak tajam dan tidak cepat dengan berbagai kebijakan di pasar modal. Kenapa demikian kalau enggak dilakukan tentunya pak Perry akan berat sekali menyangganya dalam nilai tukar ya. Sehingga kemarin ada berbagai kebijakan di antaranya kita perusahaan emiten boleh melakukan buy back yang dalam kondisi normal tidak diperbolehkan ya.

Lantas juga kita auto rejection perdagangan kalau sampai menyentuh harga saham itu turun 5% ya. Itu otomatis disetop perdagangannya dan ini ditunggu sampai beberapa menit mungkin 30 menit baru boleh dibuka lagi. Nah sehingga ini hanya sekedar untuk men-smoothing penurunan lebih dalam. sehingga tekanan outflownya tidak terlalu berat. dan juga ini kemarin ada berbagai kebijakan yang diantaranya shot selling kita larang. shot selling itu tidak punya barang pedagang beli di pagi hari jual di pagi hari barangnya beli di sore hari dengan harapan dapat beli Lebih murah. ini juga sudah kita Larang. Nah ada beberapa hal yang kita lakukan kemarin betul-betul hanya sekedar untuk men-smoothing aja. Nah sambil menunggu sentimennya kembali positif. Kapan kita nggak tahu tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama kalau kita lihat di pasar saham udah mohon maaf kami sambil melirik-melirik dari tadi pagi hari ini sudah hijau sudah beberapa kali hijau dalam seminggu ini jadi Alhamdulillah jadi Sudah sedikit berbagai kebijakan yang kita lakukan ini mudah-mudahan sudah dipandang positif sama investor terhadap Indonesia. itu yang di pasar saham.

Nah untuk di perbankan dan lembaga keuangan kami lakukan kemarin ya karena ini sektor riil yang sudah kena dan seluruh sektor hampir seluruh sektor ya. pertama kami kira hanya di pariwisata saja transportasi restoran tapi ini sudah ...nya sudah ke hampir seluruh sector nah sehingga kami sektor konsumsi pun sudah kena. Sehingga ini kita kemarin melakukan kebijakan agar memberikan ruang kedua belah pihak baik para peminjam maupun para yang memberi pinjaman yaitu bank dan lembaga keuangan. agar apa agar ini kalau terjadi apa-tidak bisa bayar ya ini tidak menjadi masalah yang berlarut-larut. dalam kondisi normal kalau tidak bayar pokok dan bunga atau bunga tidak bisa membayar pokok ini harus diklasifikasikan menjadi non-performing kalau non Performing berarti lembaga keuangan itu harus mencadangkan, kalau harus mencadangkan otomatis beban ya. permodalannya menjadi terganggu untuk itu Kemarin kami mengeluarkan kebijakan lembaga keuangan dikasih insentif, oke. kalau itu bisa di restruktur silakan itu langsung lancar dalam kondisi normal kalau direstrukturasikan tidak langsung lancar minimal kurang lancar dan ada tambahan pencadangan. ini langsung lancar sehingga bank lembaga keuangan mempunyai insentif untuk tidak mencadangkan. ini adalah ruang yang bisa kita berikan agar mempunyai nafas yang Panjang, lembaga keuangan dan perbankan ini untuk sambil menunggu Covid ini bisa ditangani dengan baik. dan ini juga kredit yang mana yang dibolehkan adalah terutama kredit-kredit UMKM ya termasuk sektor informal, termasuk kredit kredit nelayan dan dimana itu sudah jelas yaitu rakyat kecil ya Kalau tidak bisa berusaha pasti untuk makan aja susah.

Nah itu adalah poin yang penting itu boleh direstruktur. direstruktur itu jangka waktu paling lama 1 tahun artinya direstruktur itu, itu boleh diberikan sementara tidak bayar bunga dulu atau tidak bayar pokok atau dikasih kemudahan potongan untuk bayar bunganya, jangka waktunya silakan tergantung masing-masing nasabahnya. Nah bagaimana ini bagi nasabah yang ternyata meskipun ya usahanya terkena baik langsung maupun tidak langsung namun mempunyai spare uang mempunyai tabungan atau mempunyai orang tuanya kaya atau perusahaan induknya cukup kuat silakan itu ruang itu dipergunakan dulu. Dan ini perbankan Kami beri kewenangan untuk melihat itu tentunya perbankan punya catatannya komplit itu ya, sehingga kami harapkan perbankan lembaga keuangan mempunyai ruang yang luas kepada masyarakat yang membutuhkan.

Nah ini di lapangan tidak gampang, tidak gampang. terutama yang kecil-kecil, tukang ojek ya ini biasanya ini nagihnya ini ternyata pakai debt Collector ya. Kita himbau agar sementara debt collector dihentikan. kecuali tadi kalau memang nasabahnya dari awal memang sudah bermasalah dan dalam rangka collection silakan aja dan ini nanti tentunya bisa bekerjasama dengan penegak hukum untuk melakukan itu karena ini apa karena kita harus mendukung pemerintah agar tidak terjadi penularan wabah yang ke mana-mana. Sehingga ini sosial distancing harus kita jaga. Nah prosesnya udah kami sampaikan ini bisa menggunakan elektronik semuanya tidak perlu datang in person ke lapangan Nah Bapak Ibu sekalian ini adalah di lapangan ini yang komunikasi terus kita lakukan bersama-sama dengan lembaga keuangan, nah ini semua lembaga keuangan dan perbankan commit di level direktur utamanya Tinggal bagaimana mengkomunikasikan ke bawah dan ke daerah. Nah memang ada 1, 2 kadang-kadang Mungkin telat mengkomunikasikan di daerah nya belum paham.

Nah inilah yang sekarang ini di lapangan kita tangani bersama-sama dengan pemda dan juga dengan kantor OJK bahkan bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk bisa mensosialisasikan itu semua. dengan cara begitu kita harapkan dua-duanya baik nasabahnya maupun dengan lembaga keuangannya bisa punya nafas yang agak panjang sambil menunggu ini reda sehingga nanti bisa berusaha kembali bahkan kami Terima kasih Bu Menteri Keuangan tadi ada beberapa stimulus dari Kementerian Keuangan soal perpajakan dan bank Indonesia terima kasih Ada stimulus likuiditas karena apa karena ini ruang ini menjadi lebih luas bagi Bagaimana perbankan dan lembaga keuangan untuk bisa mendorong agar menyangga agar sektor riil ini tidak betul-betul terpuruk dan akhirnya melakukan PHK. Bahkan untuk kredit-kredit yang besar itu silakan aja mau di top up, modal kerja baru yang penting jangan sampai ada moral hasad moral hasad penting jadi tentunya bank-bank lembaga keuangan sangat selektif mana yang tentunya tidak apa-apa bisa seleksi yang tentunya memang karena Covid ini ya dan juga Bagaimana memilihnya berapa jumlahnya yang jelas kalau hanya untuk bagaimana untuk operasional pembayaran dan bayar gaji pegawai mungkin itu bisa dilakukan.

Bapak Pimpinan dan bapak bapak ibu sekalian, ini adalah di sektor riil mudah-mudahan ini akan cepat selesai dan tentunya nanti nggak terlalu nggak terlalu berat. nah berikutnya Bagaimana kedepannya alau kita lihat faktanya memang perbankan dan lembaga keuangan ini tidak gampang. pastilah ada

kebijakan kita atau tidak ada kebijakan kita tadi ini pasti beberapa nasabah sudah sulit untuk mengembalikan membayar bunga dan mengembalikan pokoknya. baik itu UMKM maupun itu non UMKM. terimakasih tadi KUR disangga oleh Bu Menteri Keuangan ya Nah ini masih ada sektor-sektor lain yang tentunya harus kita pikirkan ini bagaimana ya.

Nah untuk itu kita harus berjaga-jaga kalau kalau karena penundaan atau listrik sering ini buat ya perbankan itu terganggu likuiditasnya atau lembaga restructuring ini membuat perbankan itu terganggu likuiditasnya nah inilah yang sebenarnya kita harus siap untuk itu sehingga kami dalam Perpu yang dikeluarkan pemerintah itu memberikan ruang kepada kita semua termasuk bu Menteri Keuangan dari segi APBN nya Gubernur Bank Indonesia dari segi kemungkinan memberikan likuiditas meredakan likuiditas pasar dan lembaga keuangan dan juga ini juga tidak lupa LPS Bagaimana bisa meyakini bahwa Confident masyarakat itu harus tetap terjaga. ini perlu sehingga sinergi ini memang harus ada nah sehingga kami dalam Perpu itu ya untuk memberikan ruang kepada OJK bisa lebih preventif kalau-kalau terjadi yang tidak diinginkan dengan memberikan kewenangan untuk melakukan merger lebih dini. Merger lebih dini artinya kalau tidak dilakukan itu pemilik dan pengurus bank masih bisa punya ruang untuk nungkus sampai pengawasan intensif which is itu adalah bisa sampai 12 bulan ya bahkan ada ruang pengawasan khusus. nah ini semua bisa kita percepat ya kita nggak tahu karena kalau terlalu lama kita khawatir confident masyarakat bisa terganggu dan ini menjadi semakin sulit kita untuk menyangganya kalau Confident masyarakat terganggu dan akhirnya juga likuiditas perbankan bisa terganggu karena orang pada ngambil uangnya dan sebagainya. ini yang kita hindari nah untuk itu ini adalah ruang yang kita propose dalam Perpu namun ini tidak mesti harus kita lakukan kalau tidak perlu nah mudah-mudahan tidak perlu ya. jadi ini ibaratnya kita hanya sedia payung sebelum hujan dan hanya memberikan Confident kepada stakeholder bahwa kita punya ruang untuk itu just in case nanti Diperlukan ya. dan tentunya apabila diperlukan kami bersama Bank Indonesia dan bu menteri keuangan dan LPS akan menggunakan ini dengan sangat ...(suara tidak jelas)... tentunya tadi kalau ada ya pengurus-pengurus yang memang mempunyai catatan di kami ya tentunya tidak akan kami berikan ruang untuk itu dan ini adalah ini janji yang kemarin juga sudah kami sepakati bersama untuk itu ya.

Nah mudah-mudahan aja ini tidak tidak harus kita lakukan. Nah berikutnya kami juga mempunyai dalam kondisi yang sangat mungkin dengan sangat genting ya ini kita RUPS itu kita bisa kita lakukan dengan cara melalui elektronik. karena ini biasanya kalau harus merger harus ini bisa harus melakukan segalanya ini adalah ini ini bisa kita lakukan secara elektronik. itu adalah poin pokok penting yang kita lakukan ya yang kita minta dalam perpu itu ya. Dan tentunya nanti bagaimana melihatnya kita secara detail mulai beberapa hari ini sudah melihat individu lembaga keuangan ya dan individu bank untuk kita lihat secara lebih detail bagaimana likuiditasnya ya . kami yakin pasti ini dalam 1 bulan 2 bulan bahkan 3 bulan ini sudah akan kelihatan ya karena memang beberapa sektor usaha ini sudah kelihatannya nggak mampu lagi untuk membayar suku bunga dan pokok ya dan bahkan ini nanti dampaknya kalau dia nggak mendapatkan pendapatan otomatis kan akan kena

kepada profit in loss. Profit in loss itu kalau rugi bisa memakan modal dan ini bisa lambat laun kalau nggak cepat teratasi bisa masuk ke pada solvenNah ini kita yakin kita monitor secara detail per individu dan kita melihat bahwa kalau ada bank yang mempunyai cover cukup kuat kami rasa mempunyai ketahanan yang lebih Panjang, namun kalau ada bank yang mempunyai cover yang kurang kuat tentunya ketahanannya akan berbeda.

Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia itu yang secara garis besar dapat kami sampaikan ya. kami Sebenarnya ada beberapa poin detail yang bisa kami sampaikan namun demikian Mungkin itu pokok-pokoknya saja mungkin besok bisa kita lakukan. di lapangan dapat kami sampaikan beberapa bank dan lembaga keuangan sudah *commit* untuk mengikuti insentif itu karena konsekuensinya kalau nggak ngikut insentif itu maka akan dihitung pencadangannya dan tentunya akan berat bagi permodalannya. secara umum mereka *commit* untuk itu tinggal Bagaimana di lapangan kita prosesnya bisa cepat elektronik dan juga menghindari adanya debt kolektor untuk sementara waktu ya Dan semua itu bisa dilakukan secara penagihannya kalau dilakukan dengan menggunakan telepon atau media lain tanpa menggunakan debt collector tapi kami tahu bahwa di lapangan itu debt collector itu punya permasalahan tersendiri karena mereka kerjanya ya nagih-nagih begitu dan pendapatannya fee-nya berdasarkan jumlah yang ditagih. ini hal lain yang tentunya harus kita koordinasikan dengan di lapangan dengan pemda maupun Dengan aparat Dengan aparat lain supaya ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian Bapak ketua wakil ketua dan Bapak Ibu sekalian terima kasih Apabila ada hal-hal yang ingin kami tindak lanjuti tentunya dengan senang hati nanti akan kami nanti akan kami diskusikan lebih lanjut. demikian wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Silakan lanjut, LPS LPS

Ada gangguan, ada gangguan sinyal disini, terimakasih karena masih lanjut kami persilakan LPS Pak Halim secara garis besar saja pak sebelum kita masuk pendalaman silakan pak Halim silakan.

KETUA DEWAN KOMISIONER LPS (HALIM ALAMSYAH):

Baik terimakasih Bapak ketua

Yang saya hormati para bapak ketua, bapak wakil ketua, para anggota Komisi XI DPR-RI dan ketua OJK dan beserta jajaran seluruhnya

Saya akan menjelaskan sebentar saja secara cepat bahan-bahan sudah kami sampaikan barangkali data potensi ini kami ingin menyampaikan sedikit tugas dan fungsi LPS serta kinerja keuangannya dulu. nanti baru kami akan ... sedikit saja sebelum nanti kita dalam lagi pada waktu Raker di hari Kamis yang akan datang.

Bapak Ibu sekalian seperti diketahui undang-undang LPS memberikan kewenangan kepada LPS untuk melakukan dua hal. Satu, melakukan penjaminan simpanan nasabah yang ada di bank. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang dalam hal ini dirumuskan sebagai merumuskan menetapkan dan melaksanakan penyelesaian bank gagal, baik yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik. Kewenangan ini kemudian diperkuat di halaman berikutnya dalam undang-undang PKKSK nomor 9 tahun 2016 yaitu dengan menyiapkan kewenangan LPS itu untuk juga bisa melakukan selain melakukan likuidasi dan penyelamatan juga diberikan ke kemungkinan kepada LPS untuk memilih apakah sebagian diselamatkan ataukah sebagian dilikuidasi. ini yang dinamakan dengan metode purchase and assumption ataupun dengan Back dan kemudian LPS juga ditugaskan untuk melaksanakan program restrukturisasi perbankan dalam kondisi krisis dan melakukan mendapatkan early intervention atau early akses dalam hal melakukan persiapan penanganan bank sistemik.

Kemudian di dalam undang-undang ada dalam Perpu Nomor 1 2020 beberapa kewenangan LPS ini diperkuat lagi terutama yang dalam kaitannya dengan koordinasi antara LPS dan OJK. terutama dalam menangani bank sekarang LPS bersama-sama dengan OJK itu dapat melaksanakan penanganan bank secara lebih awal khususnya untuk bank yang non sistemik kalau untuk bank sistemik sudah diatur dalam PP KSK sekarang dengan melalui Perpu kewenangan LPS bersama-sama dengan OJK itu diatur di dalam Perpu Nomor 1 2020. selain itu juga LPS juga diberikan untuk dalam melakukan resolusi bank memilih opsi-opsi mana yang terbaik itu nanti LPS dapat tidak hanya mempertimbangkan biaya yang terkecil atau least costest. Seperti diketahui dalam konteks yang sekarang LPS tidak bisa melepaskan diri dari perhitungan bahwa dalam melakukan resolusi di bank itu LPS harus memperhitungkan least costest sekarang dengan perpu 1 2020 dengan kondisi seperti sekarang ini LPS di berikan ruang gerak untuk tidak hanya memikirkan mana yang paling murah tapi juga harus memperhatikan dampak-dampaknya kepada ekonomi, kompleksitas masalah, dampak sosial dan sebagainya.

Nah ini yang barangkali secara sepintas tugas dan fungsi dari LPS. Selanjutnya Kami ingin menyampaikan update sedikit bahwa dalam konteks data bank sebagai peserta penjaminan sekarang ini ada 110 bank umum yang ikut sebagai bank serta penjaminan dan 1.700 BPR. Dengan distribusi simpanan bank umum di slide berikutnya dari 6.129 triliun rupiah sekitar 2,666 triliyun yang dijamin oleh LPS yaitu yang berada dibawah 2 miliar. Dan ini mencakup 99,91% total rekening atau 304 juta rekening. dari sini kita bisa tahu memang 56,5% itu rata-rata merupakan nilai... yang cukup besar di atas 2 miliar. sejauh ini tingkat kepercayaan masyarakat dari beberapa indikator yang kami miliki masih cukup tinggi. selain juga itu tercermin dari cakupan penjaminan yang masih 99,91%. namun dari sisi nilai tadi kami sampaikan memang kita LPS hanya bisa menjamin sampai 43,50%. jadi masih ada beberapa dana-dana besar yang memang tidak bisa kita jamin.

Dalam hal situasi memburuk antara lain misalkan terjadi penarikan dana dalam jumlah yang tidak normal atau mungkin terjadi perpindahan dana antar bank yang juga tidak normal ini LPS diberikan kewenangan untuk mengusulkan

kepada pemerintah dan tentu harus berkonsultasi ke DPR dalam hal ini dengan Komisi XI misalnya untuk menaikkan nilai simpanan.

Yang kedua bisa juga memperluas cakupan jenis rekening yang dijamin jadi untuk dua hal ini di dalam undang-undang yang yang lama sebelum Perpu sudah ada kewenangan ini tinggal nanti respons kebijakan ini apakah diperlukan tentu nanti kita akan diskusikan bersama-sama di kssk berkoordinasi dengan BI OJK dan tentu kementerian keuangan.

Namun jika situasi makin memburuk pemerintah dalam hal ini bukan LPS tentu dapat mempertimbangkan untuk tidak memperluas penjaminan simpanan tidak hanya simpanan yang berbentuk dalam maaf kewajiban tidak hanya berbentuk simpanan tetapi juga kewajiban bank yang non simpanan. sekali lagi tapi ini adalah langkah terakhir karena yang kita tahu ini adalah merupakan semacam full guarantee atau blanket guarantee. dan pengalaman kita dengan blanket guarantee walaupun memang cukup efektif dalam mengendalikan atau penjaga kepentingan masyarakat namun ini juga memiliki (suara tidak jelas)...yang tinggi sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih tinggi dan sistem monitoring yang lebih ketat.

Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kami sampaikan sekarang tugas kami di bidang penanganan bank gagal di slide selanjutnya, sejak LPS beroperasi sampai dengan 29 februari 2020, LPS telah melikuidasi 102 bank yang terdiri dari 101 BPR dan 1 bank umum. Selain itu LPS juga melakukan penyelamatan satu bank umum pada tahun 2008. dan kalau melihat penyebarannya memang kita melihat cukup-cukup terdistribusi merata walaupun memang ada dua daerah yaitu Jawa Barat dengan Sumatera Barat yang cenderung menjadi lebih tinggi.

Selanjutnya kami telah membayarkan total simpanan hampir 2 Triliun Rupiah selama ini yaitu 1,932 triliun dimana untuk bank umum kami telah yang kami proses 357 miliar. sementara untuk BPR 1,574 triliyun dari jumlah ini yang layak bayar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada itu sekitar 81,26% sementara sisanya kita kategorikan tidak layak bayar. dan ini dengan berbagai sebab terutama lebih banyak karena tingkat bunga yang lebih tinggi daripada LPS. sementara dengan kemampuan keuangan kami di slide berikutnya sekarang LPS memiliki total aset 128,3 triliun dimana itu terdiri dari 121,8 berbentuk investasi dan berbentuk kas dan piutang 6,1 triliun, sehingga sebetulnya secara total kami memiliki sekitar 127 triliun yang siap dipakai walaupun tentu kita harus memperhitungkan cadangan sehari-hari. sehingga dugaan kami ini kemungkinan 120 triliun yang barangkali cukup aman apabila digunakan dan seperti kita ketahui apakah jumlah ini cukup atau tidak, sebetulnya memang masih kurang karena sebetulnya kalau dihitung dengan target 2,5% berdasar undang-undang LPS di Pasal 6 83 itu LPS diminta untuk memupuk cadangan penjaminan sehingga setinggi 2,5% dari PDB. Sekarang ini LPS baru mencapai 1,64%.

Oleh karena itu tentu ini menjadi suatu hal yang perlu menjadi catatan. Sampai sejauh ini di slide berikutnya LPS mendapatkan pendapatan itu berasal dari premi tahun lalud sebesar 6,1 triliun ditambah dengan hasil investasi 2,1 triliun dan ini yang menyebabkan LPS masih bisa surplus sebelum pajak sekitar 7,8 triliun.

Ibu dan bapak sekalian, seperti diketahui di slide berikutnya LPS dewasa ini sebetulnya disiapkan untuk bekerja dengan skenario situasi normal menangani 1 bank besar, 1 bank menengah dan 5 BPR pada saat yang pada saat bersamaan. ini adalah formula yang telah kami pelajari dan juga kami diskusikan dengan konsultan. Jadi LPS dalam situasi normal mestinya dapat menangani 1, 1, 5. 1 bank besar, 1 bank menengah, dan 5 BPR. dengan kekuatan funding yang tadi kami sampaikan 2,5 % dari PDB, namun dalam kondisi tidak normal seperti yang kita ketahui LPS dapat saja menangani scenario yang jauh lebih buruk. Oleh karena itu kemungkinan pendanaan yang lebih besar menjadi suatu hal yang tidak dapat terelakan.

Di tabel akan terlihat bahwa sebetulnya dengan situasi yang ada dalam kondisi normal LPS dapat menjual SBN baik ke pasar, kepada pemerintah dalam bentuk buyback, maupun kepada Bank Indonesia. sementara kita juga dapat meminjam kepada pihak lain maupun kepada pihak pemerintah. ini sudah diatur di dalam undang-undang LPS KSK. namun ini hanya berlaku untuk menangani bank sistemik. Nah didalam Perpu Nomor 1 2020 ada beberapa gap yaitu gap bahwa penjualan SBN ke Bank Indonesia yang tadinya tidak diperkenankan itu menjadi diperkenankan untuk menangani bank selain bank sistemik, BSBS itu singkatan dari bank selain bank sistemik. demikian juga LPS dapat melakukan pinjaman ke pihak lain nah ini yang dimungkinkan melalui Perpu sehingga dengan demikian dimungkinkan sekarang dalam kondisi normal LPS sebetulnya memiliki ruang yang lebih dan lebih fleksibel. Sementara kalau dalam kondisi krisis tentu saja semua yang ada bisa dilakukan. Oleh karena itu sekarang LPS dapat saja melepaskan me Apa menerbitkan dan surat hutang atas nama sendiri dan kemudian LPS juga dapat meminjam kepada pemerintah maupun kepada bank Indonesia secara tidak langsung.

Bapak ibu sekalian ini kurang lebih kinerja keuangan LPS dan selanjutnya kami sampaikan polis respons yang selama ini sudah kami lakukan dalam konteks penurunan tingkat bunga pinjaman kami sudah melakukan penurunan dua kali sampai dengan bulan Maret ini menjadi totalnya 50 basis poin tentu ke depan Kami juga masih memantau Bagaimana tren bunga penjaminan ini apakah masih bisa diturunkan atau tidak ini masih terbuka lebar.

Yang kedua kami juga terus memantau dengan cermat apakah kita masih dalam situasi yang aman untuk tetap mempertahankan program penjaminan 2 miliar ini ataukah kita bisa memperluas baik dalam konteks nilainya, jenis simpanannya ataupun kemungkinan yang lebih buruk. demikian juga kami sudah melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan tahunan bagi bank-bank supaya mereka tidak terlalu

Bapak Ibu sekalian Sebelum saya mengakhiri mungkin saya ingin sampaikan sedikit update yang terkait dengan pergerakan BPK dan valuta asing di perbankan kita di slide Nomor 14 itu kami menyampaikan berdasarkan data data sementara per 31 Maret tahun 2020, pertumbuhan year to date simpanan rupiah kita memang cenderung landai, melandai. Secara year to date 1, 67% sementara secara y o y angka rupiah ini tumbuh sekitar 6%. Sementara untuk US dolar itu tumbuhnya lebih cepat year to date 16% sementara untuk yoy sekitar 16,5 sampai 16,6%. tapi untuk informasi ini tentu karena pelemahan kurs rupiah.

Dengan demikian secara Total year to date total ... tumbuh 3,68% sementara yoy sekitar 7,5 sampai 8%. ini tergantung nilai rata-rata kursnya nanti. Jadi ibu bapak sekalian memang secara dari indikator ini memang secara general secara umum pertumbuhan kita masih belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang terlalu dalam tetapi ini masih normal. mudah-mudahan ini masih berjalan terus karena Bank Indonesia sudah memberikan banyak relaksasi dan likuiditas di cek perbankan juga relatif cukup aman.

Sementara itu kami juga memantau Bagaimana spesial rate atau katakanlah suku bunga yang diberikan oleh bank-bank kita kepada para nasabah primanya. ini juga bisa melihat beberapa gejala yang menarik yang pertama adalah tren suku bunga masih masih menurun dan ini sejalan dengan arah atau leader lead yang diberikan oleh Bank Indonesia Namun ada satu hal yang kita perlu awasi yaitu yang berwarna kuning yang warna kuning ini adalah kelompok buku 1 di mana dia penurunannya tidak setajam dibandingkan dengan kelompok buku yang lain karena memang kita menyadari buku 1 cenderung tidak dalam posisi yang baik ketika mendapatkan likuiditas dari pasar. Oleh karena itu kalau kita lihat di grafiknya angka pertumbuhan angka suku bunga spesial ratenya masih relatif melandai walaupun yang relatif tinggi adalah di buku 2 ,tetapi kita lihat(suara tidak jelas).... kemungkinan buku 2 ini akan terus menurunkan suku bunganya dan sementara buku 1 akan tetap berada di situasi yang tidak banyak menurun.

Bapak Ibu sekalian kami juga ingin menyampaikan di slide nomor 17 Bagaimana situasi tren tingkat bunga simpanan buku-buku yang kami selalu lihat. yang patut kita lihat adalah yang ditengah sekali, ini yang satu di atas adalah suku bunga rupiah yang dibawah adalah valas. ada satu fenomena yang menarik perilaku baru buku 1 dan buku 2 dewasa ini cenderung convergent dimana mereka menawarkan suku bunga depositnya relatif tidak banyak jauh berbeda. sementara buku 3 dan buku 4 juga sama. Jadi kita melihat ini ada kecenderungan mungkin belum sangat tinggi tetapi adanya segmentasi antara dua kelompok bersaing. jadi kelompok 1 dan buku 2 cenderung untuk bersaing di dalam ruang yang sama sementara buku 3 dan 4 juga bersaing dalam situasi yang di kelompok yang sama.

ini tentu kami akan lihat terus Bagaimana perkembangannya mudah-mudahan dengan berbagai kebijakan yang ditempuh oleh OJK terutama dan juga oleh bank Indonesia ini akan membuat situasi normal Kembali. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan terima kasih kami sudahi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pak Halim yang telah memberikan persentasinya. jadi aya kira kita nanti masih akan ketemu lagi dengan LPS Pada hari Kamis jadi nanti Pada hari Kamis pendalaman saja. jadi karena mengingat waktu kita harus selesai masuk ke kesimpulan dan lain-lain sebagainya. sekarang kami persilakan pendalaman untuk per fraksi jadi satu fraksi 1 orang dan khusus .pertanyaannya khusus untuk Menteri Keuangan jadi pertanyaan untuk Gubernur Bank Indonesia ke pertanyaan untuk OJK maupun

untuk LPS kita akan lakukan pada raker yang akan datang. Karena besok kita dengan OJK, rabu dengan Bank Indonesia dan LPS. Jadi mohon kepada teman-teman pimpinan dan anggota Komisi XI DPR-RI, pertanyaannya khusus untuk dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Pertama kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilakan pak Dolfie.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P)

Terima kasih pimpinan atas kesempatannya.

Yang terhormat pimpinan Komisi XI dan anggota Komisi XI

Yang terhormat Menteri Keuangan, Gubernur BI, komisioner OJK dan LPS. Ibu Sri Mulyani, Pak Perry, Pak Wim dan Pak Halim.

Terima kasih atas paparannya, tadi sudah disampaikan bahwa dampak dari Covid ini kompleks dan perlu upaya ekstra Ordinary dan upaya Extraordinary ini terlihat di dalam perpu 1 tahun 2020. yang memberi kewenangan yang sangat besar kepada Menteri Keuangan sebagai pemerintah, Bank Indonesia, OJK termasuk juga LPS. tadi saya mencermati yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, BI OJK dan LPS Yang masing-masing intinya adalah memberikan komitmen yang kuat bahwa di dalam menjalankan kewenangan yang diperbesar di dalam Perpu itu perlu adanya kredibilitas tadi Bu Sri Mulyani menyampaikan pentingnya kredibilitas. kemudian Pak Gubernur BI mengatakan perlunya ada langkah-langkah yang prudent. kemudian OJK mengatakan dan LPS Untuk menghindari adanya moral Hazard Oleh karena itu pada kesempatan siang ini saya minta kewenangan yang ditambahkan kepada kementerian keuangan OJK BI dan LPS di dalam Perpu itu syarat dan ketentuannya dibuat sekarang pak ibu. jangan saat menggunakan kewenangan itu baru dicari justifikasi syarat dan ketentuannya. jadi syarat dan ketentuannya harus diberikan sekarang setidaknya Ada beberapa pasal yang penting. Pasal 14 dimana Di situ disebutkan kssk di berikan kewenangan menetapkan skema pemberian dukungan pemerintah syarat dan ketentuannya apa. kemudian di pasal 16 dan pasal 19 kewenangan yang diberikan kepada BI untuk memberikan likuiditas memberikan pada Pasar Perdana, mengatur penggunaan devisa terus memberikan akses pendanaan kepada korporasi dan swasta, pinjaman likuiditas khusus syarat dan ketentuannya diberikan sekarang jangan Nanti pada saat kewenangan itu dilaksanakan ngasih syarat dan ketentuan.

Nah ini kembali kita masuk kepada moral Hazard dan tidak ada aspek kredibilitas di sini kemudian. kan kita sudah punya pengalaman-pengalaman yang lalu dalam hal BLBI dalam hal bank Century dimana justifikasi nya kemudian menjadi kabur. Nah kewenangan LPS yang diatur di pasal 20, 21, dan 22 sekarang pak, Apa itu kewenangan LPS untuk mengambil tindakan dalam kesulitan dan likuiditas, mengambil keputusan penyelamatan bank, kebijakan penjaminan simpanan pemerintah dapat mendengar program penjaminan, syarat dan ketentuannya diberikan kepada kami sekarang ini apa syarat dan ketentuan protokolnya seperti apa. indikatornya seperti apa ukuran-ukuran yang bisa kita lihat bersama apa supaya yang tadi kita concern bersama bahwa Incredible dan tidak ada modal terkait pengecualian kewajiban tertentu

pada pasar modal tujuan pemanfaatan teknologi pasal 24 dan 25 memberikan pinjaman kepada LPS. mohon ketentuan-ketentuan ini dan syarat-syarat menjalankan kewenangan ini dapat disampaikan sebelum kewenangan ini dilaksanakan bapak ibu sehingga kita bisa benar-benar yakin bahwa protokol ini terbebas dari moral hazard dan bisa terjadidi kemudian hari dikenal dengan upaya pemerintah di dalam fiskal tadi yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa kita setidaknya membutuhkan tambahan pembiayaan 545 triliun dengan utang 604 triliun jadi kalau dikatakan ada dari SAL kemudian ada dari BI, kemudian juga ada dari dana dana yang dikuasai oleh negara seperti dana Abadi pendidikan BLU dan BUMN Mungkin kita bisa dikasih gambaran nilai-nilainya itu maksimum berapa. dan kemudian seperti kita ketahui di utang di APBN 2020 beban utang yang ditanggung oleh APBN untuk dibayarkan itu mencapai 382 triliun, bunganya 295 triliun pokok 87 triliun. nah Apakah kewajiban hutang ini tidak bisa direstrukturisasi sehingga bisa mengurangi beban di dalam pembiayaan utang sehingga utang yang 382 triliun yang harus dibayar di tahun 2020 ini apakah nggak bisa juga direstrukturisasi ditunda 100 triliunnya apa 150 triliunnya. Apa nggak ada peluang itu dalam kondisi krisis yang seperti sekarang ini.

Kemudian yang terkait dengan program prioritas tadi salah satunya yang penting adalah penanganan kesehatan kesehatan kepada rumah sakit menciptakan kondisi rumah sakit semakin Terpuruk di dalam mengelola posisi pelayanan masyarakatnya. Nah apakah tidak bisa nanti di dalam program pelayanan kesehatan ini tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit ini juga termasuk diprioritaskan misalnya dituntaskan 80% sehingga rumah sakit yang menangani pasien-pasien ini punya keberdayaan. Sekarang cashflownya sulit, menghadapi wabah, sementara rumah sakitnya sendiri berdarah-darah di dalam cashflow. Nah mohon sementara ini juga diprioritaskan karena toh sudah ada keputusan MA bahwa iuran Kembali ke angka semula dan pada tahun ini juga kan direksi BPJS kesehatan seharusnya sudah dalam proses pergantian jadi Mumpung ada momentum direksi direksi yang baru mungkin tunggak atau tagihan dari rumah ke rumah sakit kepada BPJS 80% bisa di selesaikan dulu agar penanganan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terbengkalai.

Kemudian konsen yang berikutnya adalah dalam rangka program pemulihan ekonomi ini sudah mulai kita laksanakan bahwa stimulus kebijakan ini jangan menjadi narasi bahwa kita hanya menyelamatkan pengusaha kelas atas ini Bu Menteri. Bagaimana narasinya ini juga menyentuh kepada penyelamatan sector riil ke bawah ini masyarakat yang kecil. kalau kita lihat dari sektor pertanian ini menyerap 38 juta tenaga kerja, sector industry, guru dan sebagainya di sini ada 18 juta menyerap Tenaga Kerja dan Perdagangan 23 juta tenaga kerja. dari 3 sektor ini aja 79 juta tenaga kerja yang sudah meng-cover hampir 50% rumah tangga di Indonesia. nah bagaimana dalam skema program pemulihan itu nanti tiga sektor ini juga tersentuh khususnya di sektor pertanian, nelayan untuk dapat kita pada momentum sekarang ini membangun ketahanan pangan kita bu Menteri. mungkin dari saya itu saja pimpinan karena di bidang sistem keuangan banyak sebenarnya Cuma nanti di hari berikutnya ketika rapat dengan mitra terkait. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, baik terima kasih dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pak Dolfie selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar kebetulan kapoksinya saya sendiri tapi saya serahkan di sini ada dua penanya yang sudah mendaftar pak sarmuji dan Pak misbakhun. Pak Sarmuji ada, pak sarmuji ada? Pak sarmuji?

(Pimpinan kalau 2 orang 1 kali PDIP Perjuangan, satu lagi pak Said Abdullah pimpinan)

Tidak diputar satu satu diputar satu satu kalau pak Sarmuji nggak ada silakan pak Misbakhun satu satu per fraksi dulu satu putara. Silakan pak Misbakhun.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.)

Terima kasih

Pak ketua yang saya hormati

Ibu Menteri Keuangan beserta jajaran, pak menkeu kemudian ada pak Gubernur beserta jajaran, Gubernur Bank Indonesia

Kemudian ada ketua dewan komisioner OJK beserta jajaran, dan kemudian yang saya hormati ketua dewan Komisioner LPS beserta jajaran yang saya hormati

Serta ketua Komisi pimpinan Komisi XI dan anggota komisi XI yang saya hormati.

Terima kasih atas semua paparan yang disampaikan ada yang menarik yang disampaikan oleh menteri keuangan tadi.prinsipnya saya memberikan dukungan penuh kepada langkah-langkah pemerintah baik itu melalui kssk Dimana ada keterlibatan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia kemudian ada OJK dan LPS langkah ini adalah Kalau menurut saya perlu memberikan sebuah pemahaman saya sekarang baru memahami apa yang dipikirkan dan apa yang ada dalam pikiran pemerintah.

Yang paling utama adalah yang saat ini yang perlu kita samakan persepsi nya bahwa sizing crisisnya seperti apa sizing crisisnya seperti apa karena kalau menurut saya dari bahan bacaan yang ada dan saya membaca banyak hal ketika work from home ini bahwa apa yang terjadi saat ini akan mengalami situasi lebih dibandingkan pada great depression tahun 1928, kemudian krisis moneter tahun 98 dan kemudian global financial Crisis tahun 2008. kalau saat itu itu hanya be apart of the world bagian-bagian tertentu hanya spot-spot tertentu di dunia yang terkena kalau sekarang ini in total. Sehingga kita perlu mengkalibrasi perlu menyamakan persepsi sizing crisisnya apa ternyata kita mengalami kalau dulu krisisnya adalah likuiditas, maka yang terjadi sekarang adalah supply side and demand Side. apalagi ada sosial distancing dan kemudian ada physical distancing dan kemudian ada lockdown. Ini membuat situasi dunia ini kan tidak bergerak supply side and demand side. pertanyaannya adalah berapa lama ini akan terjadi berapa lama, dengan segala hormatnya Saya minta kepada pemerintah kalau saya mintanya kepada

Menteri Keuangan bahwa ini benar-benar diukur Jangan pernah meng-*under estimate* crisis ini Jangan pernah meng-*under estimate*. yang saya khawatirkan adalah apabila kebijakan ini tidak di sinkronisasi dengan baik maka saya khawatirkan kita akan kehilangan Golden momentum. ada time lag antara policy dan implementasi karena apa yang terjadi adalah akan terjadi tragedi kemanusiaan. Ada rakyat yang tidak bisa rakyat miskin yang tidak makan dan sebagainya dan ini yang terjadi. karena apa kalau saya lihat dari sisi kebijakan apa yang terjadi perkiraan dari banyak pengamat yang ada saat ini itu baru Pada tahapan awal kita akan Mencapai Puncaknya kapan. Nah ini yang belum pernah diperkirakan sejak ada yang ngomong Juni ada yang juli dan kemudian ... (suara tidak jelas)...yang utama bagi kita semua adalah sizing crisis ini seperti apa. dulu pada tahun 98, 98 ini kita hanya sektor moneter yang kena tapi apa yang terjadi saat itu? ekonomi yang dibangun oleh Pak Harto 32 tahun itu langsung turun minus 13 pada saat itu PDB kita cuma sekitar 1500 kita melakukan bill out sekitar 600 triliun 40% dari PDB kita.

Apakah kemudian tidak dibuka opsi yang lain oleh pemerintah untuk melakukan hal karena apa tadi bu menteri sudah menyampaikan dan saya banyak diskusi dengan para ekonom melalui dari rumah ini intinya adalah saya saat ini mengatakan tidak ada keraguan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah ini adalah bukan soal kebijakan ini tapi bagaimana kita mengimplementasikan dengan cepat. Kalau menurut saya sekarang Saya ingin menanyakan mengenai kuantitatif easing pemerintah itu seperti apa konsepnya. Kalau belajar dari kuantitatif easing yang saya baca existing ekonomi plus kuantitatif easing akan menjadi apakah ekonomi itu tetap stabil Mengalami penurunan atau apa. Dan yang perlu harus diingat oleh pemerintah bahwa PDB kita akan mengalami shrinking pak akan mengalami penyusutan dan resiko penyusutan PDB ini harus dihitung sampai berapa persen.

Nah konsep kuantitatif easing inilah yang harus kemudian kita kalau saya mengatakan bahwa mau tidak mau kuantitatif easing yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pencetakan uang baru. Kita mencetak uang baru, tidak bisa tidak. existing kita jaga plus... nanti kita akan menjaga ekonomi itu tidak turun atau Kalau turun sampai seberapa. karena apa kalau kita lari pada lembaga donor internasional pada saat yang sama dunia mengalami kebutuhan yang sama mengalami kebutuhan yang sama. kita datang kita akan antrian nomor berapa belum lagi yieltnya yang mahal mau tidak mau kalau menurut saya harus dicetak emisi Pak. Dan ini menjadi pertaruhan bagi Bank Indonesia yang sudah dikasih kewenangan.

Pada saat seperti ini resiko pencetakan emisi adalah 2 Capital outflow, capital flight dan inflasi. Kalau saya mengatakan inflasi ya, ada 2 inflasi karena kita mencetak uang dan kemudian ditambah dengan plusnya itu adalah supply and demand yang menyebabkan volatile tersebut dan kemudian administratif ... (suara tidak jelas)... impression tetapi misalnya 15% kita katakan inflasinya lebih baik kita membeli beras yang harganya lebih mahal 15% daripada kita mimpi punya beras. Karena apa kalau kita tidak melakukan policy beras itu tidak akan pernah ada.

Lah ini yang harus kita samakan persepsinya karena apa pada tahun 2008 pemerintah Amerika melakukan, pada saat yang sama dalam situasi seperti ini jangan pernah kita berpikir statistik ekonomi kita akan bagus. Tidak,

resiko apapun kita akan berikan dukungan. pertama tadi saya mendukung yang disampaikan oleh Pak Dolfie aturan utamanya kita sepakati bersama di awal. Saya tahu bahwa Mohon maaf Bu Sri Mulyani dengan perasaan yang paling dalam saya sampaikan ada dua institusi Ketika kita bicara bahwa Ketika kita bicara bill out itu mempunyai trauma Bank Indonesia pada saat 2008 menyebabkan kekuasaan pengawasannya hilang dan menjadi OJK dan Bu Sri Mulyani mohon maaf itu akan terjadi. Itu telah terjadi, tapi saya ingin menyampaikan biang ributnya kan kita semua pada saat itu dan kita sekarang memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk melakukan langkah ini. Kalau menurut saya perlu disamakan dulu kuantitatif easingnya seperti apa kalau kuantitatif easing Bu Amerika sudah mengucurkan lebih dari pertama 1,5, 2 triliun 2 triliun saya hitung udah hampir 9 triliun dolar Amerika dan semuanya melalui kuantitatif easing. Semua, kemudian Malaysia yang PDB nya cuma 370 triliun mengucurkan 929 triliyun sepertiga PDB-nya Indonesia. dia mengucurkan 929 itupun masih kurang.

Perlu dipahami dalam konsep ini kalau menurut saya, kuantitatif easingnya ini harus disamakan persepsinya. kalau saya mengatakan jangan ganggu cadangan devisa dulu, kita harus cetak uang. Itu pilihan, inflator iya. Kalau kita mengatakan akan terjadi capital flight jalurnya 3 Pak. perbankan pasar modal dan pasar uang yang keempat adalah penyelundupan ini bisa kita 123 ini secara birokrasi bisa kita atasi.

(waktunya pak misbakhun)

Lah, Intinya saya ingin mengatakan bahwa pemerintah perlu menyamakan persepsi nya sizing yang kita butuhkan itu berapa. Atau ke 405 dimana ada bisnis dan sebagainya siapa prioritas yang akan disampaikan. UMKM ini pak kalau menurut saya yang perlu dilakukan pertama kali oleh pemerintah adalah bill out UMKM pak. Bayarkan listrik apa dan sebagainya tetapi ditambah ke bidang usaha dan kita jangan alergi untuk membantu pengusaha jangan alergi karena merekalah kita bisa tumbuh ekonomi dan kemudian segala aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh negara itu dilakukan oleh pengusaha.

Ini kalau menurut saya pemerintah harus menyamakan persepsi antara 3 ini, kuantitatif easing yang dimaksud oleh pemerintah seperti apa. supaya tadi Kalau saya lihat tadi Pak Perry mempunyai persepsi yang berbeda Bu menteri mempunyai persepsi yang berbeda dan Pak Wimboh masih juga masih belum tahu bagaimana skema ini berjalan antara izin yang diterbitkan Kapan this primary market diambil oleh BI dan kapan itu disalurkan ke dunia usaha ini masih belum saya melihat belum sebuah siklus yang jalan.

Itu yang bisa saya sampaikan Pak Tapi intinya satu saya memberikan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah emergency yang penting yang terutama adalah memahami sizing konsep dan sebagainya harus Kita tentukan diawal.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Baik selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Gerindra Pak Supri mohon waktunya diatur karena kita sudah menunjukkan pukul 4 silakan Pak Supri

F-P GERINDRA (Ir. H. SOEPRİYATNO)

Makasih pak ketua

Yang saya hormati Bu Menteri

Gubernur Bank Indonesia dan ketua OJK dan ketua LPS serta teman-teman sekalian

Jadi ada kata bijak Bu menghidupkan perekonomian itu masih bisa kita atur tapi kalau menghidupkan orang yang mati saya kira itu bukan tugas kita. itu kata-kata bijak kita sehingga kita kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta kepada pemerintah untuk tidak menganggap enteng pandemi ini. kita ini mau melaksanakan apa mau melaksanakan karantina wilayah atau health immunity. yang terus terang aja kebijakan yang sekarang dilakukan pemerintah adalah health immunity. Untuk itulah maka harus dipersiapkan Bu yang pertama rapid tesnya. Rapid tesnya ini sampai sekarang di rumah sakit aja susah Bu. bagaimana kita bicara rapid test dimana rapid test akan dilakukan. kemudian nanti ada kebijakan Bagaimana BPJS, BPJS ini juga nggak punya duit sekarang bu untuk bayar rumah sakit ya. kemudian masalah APD nya, alat pelindung diri, masker dan sebagainya kemudian ventilator nya ini harus dipersiapkan betul apabila BIN sudah mengatakan akhir Mei bisa mencapai 95.000 yang terkena virus ini. kemudian itu yang pertama.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kenapa diterbitkan perpu ini karena ada kepentingan yang memaksa. sehingga .diperlukan kebijakan extra Ordinary. untuk itulah Perpu ini memberikan kewenangan yang luar biasa kepada pemerintahan dalam hal ini Menteri keuangan, kemudian Bank Indonesia OJK dan LPS, perpu ini karena menganggap bahwa pandemi ini lebih berbahaya dari krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997,1998, maupun 2007 dan 2008. sehingga kebijakan kebijakan yang diambil harus prudent memiliki kredibilitas yang tinggi, kemudian memiliki tata kelola dan akuntabilitas yang baik.

Ingat bu ini kata-kata ini penting prudent ya. karenanya apa ini udah buka semua nih Bu. Aturan-aturan yang membatasi itu udah nggak ada lagi. Untuk itu maka pemerintah harus benar-benar prudent, BI harus benar-bener prudent, kemudian LPS juga harus benar-bener prudent. kemudian Perpu nomor 1 tahun 2020 ini akan menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia bagi kreditor bagi .negara-negara luar yang memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia. Ini menjadi tadi saya katakan dan harus memiliki dampak yang positif ya. kalau tidak memiliki dampak yang positif ini Dilihat negatif maka banyak spekulasi yang datang akan memukul pasar keuangan kita baik di pasar modal maupun di nilai tukar Rupiah.

Kemudian yang lainnya adalah yang saya tanyakan kalau Perpu nomor 1 tahun 2020 ini disetujui Apakah APBN itu masih bisa kita bahas APBN Tahun 2021, APBN tahun 2022. Karena perpu ini inget lho berlaku berlaku sampai Tahun 2022 ya ini mengerikan sekali Artinya bahwa Kewenangan bank Indonesia yang luar biasa ini sampai Tahun 2022. Karena perpu ini ya kan berlakunya Sampai kapan sampai tahun 2022. Berarti kewenangan-kewenangan baik KSSK tadi Apakah itu kementerian keuangan Bi OJK sampai Tahun 2022 sehingga ini akan mengerikan sekali kemudian saya belum melihat Bu Apakah sektor infrastruktur yang sekarang lagi dibesar-besarkan oleh pemerintah ini masih berjalan apa enggak. Kemudian IKM juga apa masih jalan yah pembangunan ibukota negara baru ini masih jalan apa enggak jadi pemerintah ini harus punya priority, prioritynya seperti apa tahun 2020 apakah IKM masih terus di jalanin kemudian infrastruktur jalan tol dan sebagainya masih dibangun.

Kemudian masalah defisit APBN tidak dibatasi tetapi pinjaman dibatasi. pinjaman 60% dari GDP. berarti apa perpu ini akan menggerus produk domestic bruto kita. yah sampai 60% lho, sampai 60% itu pinjaman artinya diperbolehkan oleh perpu ini sampai lebih daripada ke 10.000 triliun. Kalau pinjaman ini menggerus PDB kemudian di APBN kita ya fiskal kita pasti sangat terbatas. banyak akan digunakan untuk membayar hutang-hutang negara. Jadi Saya kira ini ya yang akan terjadi Kita menjadi sangat terbatas. Begitulah jadi saya mohon tadi yang disampaikan teman-teman saya juga ingin apa namanya apa membantu dikit bahwa perlu yang namanya postur APBN kemudian termasuk rinciannya termasuk apa namanya ekonomi makro kita ya. asumsi ekonomi makro mohon pemerintah bisa memberikan kepada kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. supaya kita bisa melihat Apa yang dilakukan pemerintah ini terukur apa tidak. tadi yang disebutkan oleh pak misbakhun sizing crisisnya kita bisa melihat. ya jadi posturnya, rinciannya, kalau posturnya tentunya semua sudah tahu ya pendapatan negara pembelanjaan negara, defisitnya berapa, pembiayaan anggaran itu berapa kemudian rinciannya dan juga asumsi ekonomi makronya kita ingin melihat karena ini sudah sangat berubah sekali. Karena kita udah tahu semua bahwa pertumbuhan ekonomi dunia aja sudah negatif dan tadi world bank menyampaikan bahwa Indonesia kemungkinan bisa sampai negatif 3,5%.

Jadi sangat luar biasa Kemudian Menteri juga sudah membuat patokan skenario bahwa kita akan deficit 5,07% artinya kalau kita deficit 5,7% yaitu scenario berat bukan skenario sangat berat. pertumbuhan ekonomi kita masih 2,3% karena skenario berat. Tapi di sini saya lihat bahwa ingat bahwa skenario bisa menjadi sangat berat apabila pemerintah tadi dalam menerapkan kebijakan kesehatannya tidak hati-hati. Tidak prudent ya, besok bicara A besok lagi Menteri yang lain bicara B, besok lagi Menteri yang lain Bicara c. jadi saya kira ini membuat rakyat jadi bingung bu ya. Yang namanya boleh mudik, nggak boleh, boleh lagi, nggak boleh lagi, mumet. terus kemudian boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini, terus terang aja kalau bikin kebijakan kayak begini seolah-olah kita ini main-main ya. Untuk itulah saya sampaikan ya tadi yang pertama tadi bahwa, fiskal kita akan semakin terbatas. Semuanya akan digunakan untuk membayar hutang kemudian apa yang lain-lain tadi bahwa nanti BI akan diberikan mengeluarkan menerbitkan surat SBN kemudian LPS

juga kemudian apa namanya OJK juga akan menerbitkan LPS kemudian bisa dibeli oleh bank Indonesia.

Ya nanti mengenai bank Indonesia, OJK tadi kata ketua bisa disampaikan di apa namanya bisa disampaikan di rapat rapat dengan OJK dan LPS. Untuk itu saya katakan bu yang pertama tadi saya mohon kira-kira postur kemudian asumsi ekonomi makro, kemudian rincian dari postur bisa disampaikan pada kita dalam waktu yang dekat. Sebenarnya kita ini mau mengarah kemana mau mengarah yang berat apa sangat berat itu biar jelas sekali bu.

Sangat berat mungkin deficit APBN kita bisa mencapai lebih dari 7% jadi saya kira itu saja ketua terimakasih ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Nasdem Pak Hasbi, Pak Hasbi Anshory silakan. Pak Hasbi nggak ada? Fraksi Nasdem? Pak Hasbi nggak ada?

Ayo pak hasbi silakan Pak Hasbi.

F-P NASDEM (HASBI ANSHORY, S.E., M.M.)

Ketua dan Anggota Komisi XI yang saya hormati

Ibu Menteri keuangan yang saya hormati

Bapak Gubernur Bank Indonesia

Bapak Dewan Komisaris OJK dan Ketua LPS yang saya hormati

Saya Hasbi Anshory A355 dari Fraksi Nasdem. pertama kita menginginkan kebijakan yang diambil pemerintah itu secara komprehensif baik dari segi fiskal keuangan dan dari segi teknis di Kementerian Kesehatan. karena Saya barusan datang dari Dapil Pak sebagai info di daerah pemilihan itu dana Pemda ada tapi Membeli barang tidak ada. seperti ventilasi ventilator dan ... (suara tidak jelas)...segala macam tidak ada. sampai Sekarang sulit untuk didapat sementara Jambi sudah 2 orang yang positif.

Kemudian masalah yang dihadapi di daerah dan di Jakarta juga saya lihat adalah masyarakat yang terdampak seperti saya berharap pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah juga merumuskan seperti BLT bantuan langsung tunai. daerah sudah melakukan pemberian bentuk BLT cuman masih parsial per kabupaten mereka memberikan yang saya harapkan pemerintah pusat juga bersama-sama karena Ini masalah sosial akan timbul karena pembatasan yang tidak boleh mengisolasi diri di rumah masing-masing.

Kemudian kita juga mengharapkan pemerintah memberdayakan UMKM. UMKM bersama dengan pemerintah daerah melihat produksi dalam negeri yang dibutuhkan oleh daerah masing-masing kemudian konsumsi dalam negeri juga mengikuti sehingga UMKM yang ada di daerah-daerah bisa dimanfaatkan. yang halo pak?

Lanjut? Ya sinyalnya hilang hilang ini pak mohon maaf

Baik. Jadi Yang Pertama poinnya kita mendukung yang dilakukan oleh pemerintah tapi secara komprehensif. Kedua, masalah sosial terhadap masyarakat yang kita mengisolasi diri dalam bentuk bantuan sama dengan pemerintah daerah. itu saja Pak Terima kasih karena ini saya antara dengar dan tidak, terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Pak Hasbi selanjutnya fraksi PKB kami persilakan kapoksinya Bu Ela ada Bu Ela.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.)

Pak Bertu dulu izin pak ketua.

KETUA RAPAT:

Oh Silakan pak Bertu silakan. Silakan Pak Bertu Merlas. Pak Bertu silakan. Pak Bertu ada?

Oke silakan oke pak Bertu.

F-PKB (BERTU MERLAS, ST)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, ketua OJK dan ketua LPS beserta jajarannya.

Masalah korona ini pernah saya sampaikan itu pada raker kita pada bulan Februari yang lalu ya. Yang waktu itu mungkin masih jadi bahan olok-olokan saja waktu bulan Februari lalu. dampak korona ini adalah sebuah keniscayaan adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. kami mendukung langkah-langkah luar biasa pemerintah untuk menangani masalah dampak korona ini namun demikian saya lihat di slide nomor 26 dari yang disampaikan ibu Menteri Keuangan mengenai sector-sector yang terdampak oleh korona ini tadi.

Ada beberapa sektor yang tidak terlalu terdampak ada yang sangat berdampak dan ada yang moderate terdampaknya moderat. Saya minta kepada pemerintah untuk memberikan stimulus atau vitamin kepada sektor-sektor itu tidak sama pak jadi kalau dipotong apa itu di sektor pariwisata misalnya itu diberi keringanan restrukturisasi kredit kreditnya. misalnya di sektor pertanian dia diberikan kemudahan dalam urusan ekspornya dan di sektor sektor lainnya juga demikian Jadi tidak boleh dipukul rata sama di semua

sektor di yang ada di terdampak ini tadi. dan yang saya lihat saat ini masih dipukul rata misalnya PPH nya dipotong ini semua dipukul rata dan semua semua itu saya kira sudah baik dan akan lebih tepat lagi bilamana semua sektor sendi setiap sektornya itu di diberikan stimulus yang berbeda-beda. saya kira demikian saja pimpinan terimakasih.

KETUA RAPAT:

Ibu vera ada ibu Vera? Dari fraksi Demokrat bu Vera ada? kalau bu Vera nggak ada Pak Didik ada pak Didik? dari Demokrat nggak ada. Pak didik Nggak ada sinyal, bu Vera nggak ada. Baik langsung ke PKS aja, PKS

Oh ada, ada silakan ya silakan bu Vera silakan.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.)

Ini ada gangguan sebentar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Kepada yang terhormat Ibu Menteri Keuangan beserta jajarannya.

Gubernur Bank Indonesia, Komisioner OJK dan LPS dan seluruh jajaran di pemerintah

Serta pimpinan Komisi XI dan anggota Komisi XI yang saya hormati.

Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa pandemi ini berdampak.... (suara tidak jelas) saya inget pertama kali kami melakukan rapat dengan Gubernur Bank Indonesia pada saat itu di bulan Desember saya sempat menyinggung mengenai bagaimana antisipasi pemerintah dan sentral bank untuk melakukan penanganan terhadap pandemik ataupun Covid 19 dan itu memang sudah diprediksi pada saat itu namun akhirnya pemerintah melalui Menteri Keuangan melakukan kebijakan atau stimulus pertama. Satu, yaitu khususnya di bidang travel dan itu juga kami lihat tidak berdampak signifikan pada saat ini karena tidak ada penurunan terhadap beberapa masyarakat untuk melakukan perjalanan karena memang pemerintah saat ini melakukan tidak melakukan lockdown tapi secara assesmen masyarakat Indonesia itu aware dan sangat mengerti bahwa mereka tidak melakukan perjalanan atau keluar rumah walaupun pemerintah tidak melakukan lock down. Nah yang perlu saya ingin tanyakan kepada Menteri Keuangan khususnya adalah masyarakat pada saat ini harus kita perhatikan betul ibu Menteri. ekonomi kita belum bisa bergerak secara dinamis dengan adanya social distancing. Ada banyak kritik terhadap pemerintah dari masyarakat tidak hanya sektor kesehatan dan perekonomian juga untuk kita lihat pada saat ini. Pemerintah harus dapat berkoordinasi dengan sebaik mungkin dan kita lihat dari beberapa pemaparan Menteri Keuangan atau OJK Bank Indonesia itu serta LPS mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk bisa memberikan stimulus ataupun relaksasi terhadap kebijakan pandemic Covid 19 ini, dan ini perlu kita berikan

apresiasi namun kondisinya saat ini kita hanya belum melihat Bagaimana langkah nyata yang riil yang akan segera dilakukan terhadap penanganan ekonomi Outlook untuk penanganan Covid 19.

Pandemic Covid 19 ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian yang kita ketahui kita harus segera melakukan refocusing APBN saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. sebelumnya keuangan negara ini sudah menanggung beban hutang terutama khususnya Jiwasraya sampai saat ini saya tidak tahu kabarnya seperti apa. tentunya bagaimana juga dengan defisit BPJS yang kian membesar belum lagi PR yang besar dari Bank Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas moneter. itu adalah secara reguler yang setiap kali kita hadapi namun ini Ditambah lagi dengan badai yang besar yaitu pandemic Covid 19. Nah kami tahu BI sudah melakukan Bagaimana langkah-langkah yang preventiv tentunya terhadap republic Indonesia pada bulan Februari yang lalu dan bila melihat kemampuan APBN yang kita punya kita tidak tahu sejauh mana sekuat mana Apakah APBN kita ini bisa melakukan penanganan beban sebesar seperti apa.

Belum lagi kita akan berhadapan dengan hari raya Lebaran kita pada bulan mendatang di tengah ketidakpastian Serta adanya Covid 19 seperti ini. bagaimana kesiapan khususnya pihak perbankan dan industri keuangan tentunya penurunan terhadap beberapa sektor usaha berpengaruh pada pendapatan masyarakat akibat adanya pandemic Covid 19 ini dan membuka kemungkinan bahwa masyarakat bahwa banyak orang yang tidak menerima THR kemungkinan swasta maupun beberapa industri mereka akan tidak melakukan THR ini sudah isu yang sudah kuatirkan oleh masyarakat namun mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan roda perekonomian kita tahu sedang lesu saat ini.

Saya yakin bahwa pemerintah pusat mengeluarkan satu Perpu yang sangat yang sangat sangat memberikan relaksasi ataupun diskresi yang sangat kuat untuk menangani Covid 19 namun kita juga perlu tahu bagaimana Apakah tidak bisa dilakukan melakukan angka adjustment atau mengeluarkan apbn-p. dan Apakah alasan itu tidak bisa dilakukan ibu menteri mohon maaf kalau memang ini saya salah tapi kami dari partai Demokrat tentunya mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian terhadap dampak Covid19.

Tidak ada orang besar dan orang kecil dalam pemilihan ekonomi ini masyarakat butuh kebijakan yang konkrit dalam menangani bukan hanya sebagai rumor semata yang kita tahu tentunya Kita juga harus mengetahui bagaimana akses speak louder dan words kita perlu realisasi realisasi terhadap fakta yang ada namun juga harus optimis bagaimana pemerintah juga mempunyai komitmen yang tinggi dalam menangani Covid 19 ini.

Yang menjadi pertanyaan besar pada saya adalah ketika pemerintah mengeluarkan si paket kebijakan stimulus pertama. Itu adalah langkah bagaimana saat itu tidak karena kita tahu pariwisata terbesar itu yang berasal dari Cina sehingga pemerintah mengeluarkan 1 kebijakan stimulus terhadap khususnya untuk penerbangan namun itu tidak berdampak luar biasa signifikan karena tidak ada orang yang melakukan perjalanan dan yang kedua stimulus kedua adalah menjaga daya beli Masyarakat khususnya kepada ekspor impor.

Saya ingat sekali Nah itu juga tidak berdampak karena memang daya beli masyarakat tidak banyak mengeluarkan keluar rumah. mereka hanya melakukan kebutuhan pokok saja bagaimana yang saya ingin tanyakan dampak kebijakan stimulus fiskal pertama dan kedua terhadap kondisi ekonomi sampai Maret 2020 dengan dikeluarkannya Perpu Apakah stimulus fiskal 1 dan 2 tetap akan diberlakukan bu Menteri meskipun pemerintah sudah memiliki program pemulihan ekonomi, apakah masih diperlukan stimulus satu dan kedua.

Nah dan juga kami yakin bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan untuk mendukung upaya penyelesaian alokasi belanja daerah dan Relax relaksasi transfer untuk penanganan Covid 19 nah tentunya yang ingin saya tanyakan apakah ini tidak bisa difokuskan dimana belanja daerah khususnya untuk dana desa difokuskan kepada cash program atau BLT pada zaman pemerintah yang lalu dan ini juga dilakukan oleh Amerika saat ini mereka melakukan tindakan mereka melakukan penanganan BLT atau cash program ini sangat efektif. Dan di luar dari existing ataupun 110 triliun akan ada penambahan 65 triliun itu difokuskan untuk daya menjaga daya beli masyarakat. Saya kira program ini apapun namanya nanti dikemas oleh masyarakat cash program ini sangat sangat membantu kepada seluruh lapisan masyarakat bahkan calon orang miskin aja sedang antri saat ini nah diluar dari kebijakan OJK yang luar biasa melakukan relaksasi terhadap pembayaran kredit pada pihak debitur dan lain sebagainya Itu juga sangat baik namun yang saat ini yang dibutuhkan masyarakat lapisan bawah adalah bagaimana mereka bisa menahan daya beli mereka bisa perut tidak lapar sementara kita akan menghadapi bulan puasa nah Ini yang Ingin ini ingin saya pastikan bahwa Kenapa pemerintah tidak melakukan itu Amerika saja juga sekarang melakukan hal yang sama gitu lho. Mereka negara yang luar biasa Kayanya masih mengandalkan sosial net safety net di luar dari penanganan Covid 19 melalui adanya stimulus terhadap rumah sakit dan kesehatan serta pembangunan rumah sakit rumah sakit baru. kami yakin bahwa komitmen yang dilakukan oleh pemerintah beserta Bank Indonesia OJK serta LPS ini untuk segera kita menghadap menangani Covid 19 ini secara yakin bahwa ini akan tetap pasti akan berlalu tapi tidak tahu sampai kapan. Jadi pertanyaan kami adalah yang paling mendasar adalah Bagaimana masyarakat ini sekarang menunggu ibu menteri mereka menunggu Bagaimanakah bisa beli sembako apa setiap Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan berbeda-beda.

DKI memberikan belanja terhadap masyarakat kelas bawah untuk sembako paket sembako kenapa kalau itu tidak dilakukan dari pusat saja walaupun dari pemerintah daerah masing-masing juga akan melakukan hal yang sama. itu juga tidak ada yang salah. saya kira itu saja dan Kami yakin bahwa Partai Demokrat selalu bersama-sama dengan pemerintah untuk bagaimana mendukung masyarakat lapisan kelas bawah tentunya dalam program-program social net yang kita harapkan bisa dilakukan oleh menteri keuangan dalam waktu cepat dan segera mungkin jangan harus menunggu setelah nanti Bagaimana Perpu ini dikeluarkan saya kira itu dulu Bu untuk menghadapi bulan saya apa bulan apa bulan puasa ini. Terima kasih dari saya pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Terima kasih Bu Vera. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PKS Pak Ecky silakan Pak Ecky.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM)

Baik,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati ketua dan pimpinan

Yang saya hormati Ketua Pimpinan dan anggota komisi XI

Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Gubernur Bank Indonesia dan jajarannya

Bapak ketua OJK, Bapak Pak Halim ketua LPS

Halo ya,

Saya Ecky Awal Muharam Fraksi PKS Anggota A-430. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan pesan moral. Saya berduka cita atas nama keluarga besar PKS berduka cita kepada seluruh korban yang telah meninggal. Semoga mereka diterima disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Secara khusus lagi tentu kepada para dokter perawat seluruh tenaga medis yang juga telah menjadi korban. kami mendoakan semoga mendapatkan balasan yang lebih baik disisi Allah. tentunya kepada para pasien yang sedang dirawat ataupun yang mengisolasi diri mengkarantina diri di rumah masing-masing. Saya berdoa Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera.

Saudara-saudara sekalian menghadapi Covid 19 ini tentu kita ditantang semua pihak di tantang apalagi khusus seluruh anggota kssk yang diberikan kewenangan yang luar biasa di dalam Perpu untuk bisa lepas dan bisa melakukan mitigasi risiko dari wabah Covid 19 serta dampaknya karenc kita lihat di Perpu tersebut tidak hanya cerita terkait dengan penanganan Covid 19 tapi justru yang terbesar adalah terkait dengan resiko terjadinya krisis keuangan, karenanya walaupun kami mengkritisi baik dalam perpu tersebut ada beberapa hal dalam prinsip-prinsip good governance, dalam prinsip-prinsip check and balancetidak terpenuhi kami masih punya keyakinan dan sesuai dengan yang kam dengarkan dari itikad seluruh member kssk akan menjaga prident akuntabel tentunya dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hadapan Sang maha Penguasa akan dimintai pertanggungjawabannya kami sangat yakin dan berhusnuzan terhadap komitmen tersebut serta berterima kasih.

Namun terkait dengan rapat pada sore hari ini karena pembahasanya terkait dengan rapat kerja dengan kementerian keuangan bukan dengan kssk atau dengan BI OJK dan LPS. beberapa hal yang ingin kamu sampaikan concern kami yang ingin disampaikan oleh terkait dengan masalah masalah fiscal bukan masalah-masalah moneter.

Yang pertama saya tidak melihat atau belum sempurna bahwa pemaparan terkait yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan belum menggambarkan apa sebetulnya yang akan dilakukan secara lebih mendalam terkait dengan kebijakan fiskal dalam menangani Covid19 ini. secara khusus adalah masalah Covidnya. Bukan dampak bukan semata-mata Dampak krisisnya tadi yang lebih banyak dijelaskan adalah terkait dengan mitigasi risiko terkait dengan dampak yang krisis yang mungkin terjadi. sebagai contoh adalah kami tidak melihat apa adakah itikad dari pemerintah untuk Sharing Pain seluruh Kementerian dijelaskan berapa dan apa yang akan diarahkan digunakan untuk penanganan Covid19 ini. sebagaimana kita ketahui masih banyak belanja modal yang mungkin bisa dihemat bisa ditunda belanja barang yang bisa ditunda kemudian dialihkan di dalam Kementerian yang bersangkutan kepada belanja untuk Covid 19.

Yang kedua peran pemerintah daerah Saya melihat pemerintah transfer ke daerah apalagi dana desa sama sekali jangan dipotong karena apa justru desa adalah ujung tombak menghadapi masalah-masalah akibat dampak Covid19 ini. dialah yang berhadapan di masyarakat. justru seharusnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada kepala desa kepada pemerintah daerah untuk menangani Covid 19 ini bahkan kalau perlu dari celah fiskal defisit itu ditransfer ditambah kepada daerah untuk menangani Covid19.

Jadi pesan Kami adalah jangan sekali-kali memotong transfer ke daerah apalagi terkait dengan dana desa tapi diberikanlah keleluasaan pedoman melalui menteri dalam negeri dan Menteri desa diberikan keleluasaan pemerintah des aitu dan pemerintah daerah untuk bisa menangani Covid19 dan dampak-dampaknya bagi masyarakat desa khususnya masyarakat miskin di pedesaan.

Yang kedua terkait dengan stimulus fiskal, ada stimulus fiskal 150 triliun yang digunakan untuk para pengusaha. kami belum melihat gambaran mohon kepada Menteri Keuangan bisa disampaikan kepada kami dengan asumsi tadi pertumbuhan yang 2 sekian persen dan tentunya dengan postur APBN yang baru Seperti apa sesungguhnya belanja Pemerintah untuk menangani kasus Covid19 ini lebih mendalam lebih detail. sebagai contoh terkait dengan kebijakan fiskal yang diatur langsung dalam undang-undang dimana adanya penurunan tarif PPh badan. pertanyaannya adalah kalau untuk level PPh badan yang tertinggi diturunkan Apakah ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan batasan PTKP untuk menaikkan Batasan penghasilan tidak kena pajak. Justru itu tidak ada jaminan di dalam Perpu karenanya publik harus tahu dan pemerintah memberikan afirmasi karena apa karena Dampak terkait dengan Covid19 ini yang paling pertama kali Terpukul adalah justru golongan bawah. golongan menengah bawah karenanya naikan batasan ptkp selain memang Terima kasih sudah akan ditanggung oleh pemerintah tapi dinaikkan menjadi sampai di angka yang Menurut kami itu layak paling tidak 10 juta penghasilannya.

Yang kedua terkait dengan pajak penghasilan, batasan penghasilan tidak kena pajak dinaikkan. Jangan hanya perusahaan-perusahaan level atas di mana tarif tertingginya tarif progressif tertingginya yang diturunkan tetapi batasan juga dinaikkan itu saran kami yang kedua.

Saran kami yang ketiga adalah terkait dengan cash program dimana kebutuhan alat kesehatan yang sangat mendesak Saya sangat sedih sekali Saya berusaha untuk menyumbang tentu dan teman-teman di DPR disini semua dengan keterbatasannya menyumbang di dapilnya masing-masing kalau di PKS sudah memotong gajinya tetapi barang untuk dibeli juga tidak mudah mendapatkannya dan kalau kami mendapatkannya dengan harga yang tertinggi.

Kami ingin ada kejelasan bahwa dari sisi supply itu memadai dan seperti apa pemerintah dalam hal ini memberikan insentif fiskal ataupun peran fiskal terkait dengan alat-alat kesehatan yang diperlukan khususnya APD dan lain sebagainya. berikutnya adalah terkait dengan penggunaan dana SAL, dana-dana yang ada di BLU dan dana-dana Abadi kami sangat mengerti sangat dimungkinkan itu dilakukan oleh pemerintah tapi kamu juga ingin dan memohon jangan ada pengeluaran pemerintah ataupun BUMN ataupun program pemerintah yang tidak mendesak untuk diselesaikan itu tetap dipaksakan. perpindahan ibukota walaupun apapun skemanya tentu itu adalah merupakan ada government spendingnya Untuk tentu itu ada pembiayaannya. tunda dan tidak perlu malu karena ini ada suatu momentum ada krisis supaya fokus menangani Covid19.

Project-project yang dilakukan oleh BUMN karena BUMN juga akan mengalami pendarahan juga sedapat Mungkin ditunda. semua resources yang dimiliki pemerintah termasuk dana cadangan, SAL, dana yang BUMN semua dikerahkan untuk menangani Covid 19 ini. berikutnya Pimpinan dan anggota yang saya hormati serta para anggota kssk. tadi ada kabar gembira dari Gubernur dan itu pernah disampaikan juga oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia terkait ada beberapa kerjasama dengan beberapa Bank Sentral, bank sentral Tiongkok, Bank Sentral Jepang, bank sentral Singapore dan saya ingin tahu apakah pemerintah Indonesia juga mendapatkan jaminan garansi dari lembaga pendanaan multilateral multinasional. multilateral seperti IMF, world bank, IDB, ADB dan lain sebagainya itu. Adakah stand by loan yang sudah di-*allowance* untuk Indonesia dan jumlahnya berapa.

Ya karena tahu bahwa saat ini jangankan
(dipercepat pak Ecky)

Jangankan mengeluarkan SBN, SBN yang kredibel saja dilempar ke pasar. Tentu ini bisa under subscribe kalau kita membuat SBN atau SUN. karenanya saya mohon dalam pemaparan pemaparan berikutnya kementerian keuangan dan Bi juga ketika berbicara terkait dengan intervensi terkait dengan utang dan sebagainya supaya tidak Misleading itu ditulis nominasi dollarnya. Jangan cuma rupiahnya saja kan rupiah sedang berfluktuasi. jadi Berapa disebutkan Berapa dollar, dan saat ini yang kredibel persentasinya cukup besar yang kredibel sangat besar.

Berikutnya adalah saya ingin mengingatkan pemerintah bahkan presiden pernah menyampaikan pada saat sedang proses pengajuan RUU tax amnesty dan dokumentasinya ada bahwa pemerintah mengetahui dengan pasti mengetahui dan mentenggarai adanya dana set Indonesia yang pada waktu itu disebutkan angka 11.000 di luar negeri. karenanya tetapi dari ketika tax amnesty kita tahu persis dana repatriasi yang sangat sangat sangat kecil karenanya

Saya ingin mengulang kembali pemerintah dengan kekuasaannya bisa mengetuk meminta atau mungkin memaksa kepada warga negara Indonesia yang memiliki memang dana ataupun asset di luar negeri untuk saatnya menunjukkan nasionalisme diri mereka.

Saatnya kita mengakui bahwa negara ini sedang butuh justru jangan mereka. Ketika malah memindahkan malah melepas jadi Indonesia memindahkan ke asing malahkah menjual malahkan menarik dolarnya, tidak. Saatnyalah dihimbau dengan kekuatan pemerintah dipanggillah nasionalisme orang-orang pihak-pihak yang ditengarai memiliki dana di luar negeri ataupun simpanan simpanan di luar negeri dan terakhir sebetulnya banyak sekali ini masih ada 10 poin lagi ada maaf ada 11 poin lagi yang ingin disampaikan tetapi waktunya sangat terbatas yang terakhir pimpinan anggota dan menteri keuangan dan sekalian anggota yang lain. Ya, w tolong walaupun di dalam Perpu tidak ada keharusan untuk meminta persetujuan DPR di dalam langkah-langkah penanganan krisis ini tapi mesti diingat bahwa eksistensi DPR itu mewakili rakyat eksistensi DPR itu adalah amanah undang-undang dasar ya karenanya mohon agar transparan dan tetap bertanggung jawab melalui atau dipaparkan melalui teman-teman di DPR khususnya komisi XI. Demikian yang saya sampaikan wallahul muwafiq lla aqwamith Thariq.

wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Pak ecky, Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Amanat Nasional Pak Jon erizal mohon waktunya juga di silakan pak Jon.

F-PAN (H. JON ERIZAL, SE., MBA)

Baik pak Dito, Terima kasih Pimpinan dan teman-teman komisi XI Ibu Menteri Keuangan, Gubernur bank Indonesia, ketua OJK, dan ketua LPS, serta teman-teman yang mendampingi.

assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

(walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh)

Saya ingin menyampaikan hal yang paling penting dalam menghadapi musibah dan ini Nampaknya kita lupa di Pancasila itu sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. saya belum melihat ada himbuan secara nasional untuk kita khuyuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar musibah ini segera dicabut. Ini poin paling penting karena kalau begini apapun skenario kita yang kita buat kalau tuhan belum memperkenankan pasti ini tidak bisa jalan. jadi saya mengajak ini kalau bisa para pimpinan baik ibu Menteri misalmya menyampaikan ke presiden secara nasional kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing itu poin pertama.

Poin kedua saya ingin juga menyampaikan pimpinan bahwa banyak catatan yang kita siapkan Tapi waktu sangat terbatas oleh karena itu saya

usulkan kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan atau saran kita secara tertulis nanti direspon oleh ibu menteri karena hari ini dengan kementerian keuangan secara tertulis juga jadi hari ini kita menyampaikan secara lisan dulu tapi kita sertakan dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis karena banyak sekali karena kita cukup waktu untuk mempelajari dan membahasnya. Itu usulan saya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berapa hal teknis saja sebenarnya.

Pertama soal Covid ini kita lemah di sosialisasi, kita coba bayangkan sosialisasi yang dilakukan itu banyak di daerah tidak mengerti jangkauan di daerah antara Jakarta dengan pusat sangat terbatas pengertiannya dan banyak tumpang tindih banyak salah saling menyalahkan nah ini jangan sampai terjadi saya mengambil contoh simpel saja. Kalau kita nonton di bioskop begitu dilarang menyalakan handphone mdilarang bersuara semua diam karena apa Itu sudah tersosialisasi dengan baik. nah sosialisasi inilah yang memang kita perlu dalam itu poin pertama karena apapun program yang kita akan lakukan kedepan kalau tidak tersosialisasi dengan baik jangan harap ini bisa berhasil.

Kemudian yang kedua dari awal focusing kita bicara hari ini paparan itu bagaimana mempersiapkan dana dana untuk menghadapi permasalahan yang ada. permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah sakit seperti APD dan lain-lain itu masalah yang tidak mudah pada saat ini. Masalah yang krusial Jadi bukan hanya Uangnya saja Bagaimana persoalan belanjanya nanti. Kalau selama ini saya selalu bertanya bagaimana sumber uangnya belanjanya mudah kalau kondisi normal kalau Sekarang dua-duanya sulit. Ini juga harus di perhatikan karena apa Karena beberapa kali kita berdiskusi dengan Menteri Keuangan maupun Bappenas perpanjangan atau tangan mereka ini tidak bisa sampai kepada kementerian Kementerian terkait gitu. hanya bisa membatasi Oleh karena itu melalui kesempatan ini Bu Menteri, saya ingin mengajak Mari kita batasi betul. tadi sebagaimana rencana realokasi anggaran dari sekarang kita batasi jangan kita serahkan semua ke Kementerian terkait . saya sepekat dengan teman-teman tadi dengan pak misbakhun, pak ecky dan seterusnya itu. bahwa realokasi itu sebesar Apa kementerian masing-masing untuk menurunkan atau mengalokasikan anggaran yang mereka sudah buat untuk dialihkan kepentingan Covid ini.

Jadi Hal ini sangat penting menurut saya kemudian insentif banyak program insentif yang dilakukan tadi. insentif yang dilakukan ini pelaksanaannya seperti apa salah satu tadi saya paham betul bahwa bu menteri menyampaikan ada 150 triliun untuk menstabilkan para usaha-usaha agar tidak terjadi collapse nah ini seperti apa tadi bu menteri menyampaikan sedang mencari pola yang tepat dalam waktu beberapa yang singkat ini. Nah mudah-mudahan pimpinan yang kondisi-kondisi yang strategis seperti itu bisa kelar dalam Minggu ini gitu. Kita ga bisa nunggu lama-lama karena begitu tertunda sehari problem yang itu semakin besar gitu.

Jadi menurut Saya memang teknisnya itu seperti apa memang harus kita lakukan. kalau kita tidak bicara sampai ke teknis Saya yakin nanti kesulitan tentu kita percaya sekarang kredibilitas para pemegang kepentingan di bidangnya masing-masing bu Sri Mulyani, kemudian pak Wimbo, pak Perry, pak Halim itu semua punya kompetensi dan punya integritas yang luar biasa. Tapi once ini di launching dan ini berjalan bukan tidak mungkin nanti ada

perubahan kalau kita bersama-sama bisa melalui ini dengan selamat kita akan menjadi Komisi XI yang terbaik di dunia, OJK yang terbaik di dunia, Gubernur BI yang terbaik di dunia dan tentunya juga LPS dan Menteri Keuangan yang terbaik di dunia .

Ini persoalan yang sangat serius dan sangat berat untuk diatasi bersama jadi keterbukaan informasi pada kita semua ini betul-betul msangat diperlukan jadi jangan sampai ada informasi informasi yang bias inilah yang kita tunggu sebenarnya. Dan kita berharap kesempatan berikut ini kita membahasnya Lebih detail lagi kita berharap masing-masing mulai dari ibu menteri dan bapak -bapak yang lain menyampaikan Lebih detail lagi. Nah kemudian supporting apa yang diperlukan dari kami DPR. Insyaallah kalau hal itu sepanjang untuk kepentingan masyarakat banyak kami dari partai amanat nasional pasti akan mendukung. tapi Kami juga akan meminta agar waspada. Kewenangan-kewenangan yang tajam ini yang ada di tangan ibu bapak ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan hal yang baik itu pun sistemnya itu terencana dengan Apabila terjadi pergeseran ya mohon maaf kalau bapak dan ibu nanti diganti penerusnya juga harus sama jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh tangan-tangan yangmemang punya niat yang tidak berdasarkan kepentingan masyarakat banyak.

Kita melihat beberapa kondisi yang sampaikan tadi tentunya kita prihatin , bahwa UMKM dan masyarakat bawah itu menjadi prioritas utama itu tidak bisa ditawarkan di Komisi XI namun usaha-usaha yang berjalan selama ini dengan baik dan terdampak dengan proses Covid ini tentu tidak bisa juga kita pandang sebelah mata. karena mereka-mereka ini juga memanggul kewajiban yang sangat besar terhadap tenaga kerja tenaga kerja yang ada di di pundak mereka oleh karena itu mereka juga harus diselamatkan sehingga harus ada kebijakan-kebijakan yang dalam hal ini saya usulkan juga ke Bu menteri hati-hati dalam mengambil kebijakan ajaklah kita untuk mendapat informasi karena seperti tadi disampaikan ada insentif waktu itu untuk penerbangan Kalau nggak salah Set 30% diskon. kemudian untuk di 10 daerah wisata tertentu ini juga hati-hati dalam kondisi ini semua wilayah sulit jadi tidak hanya 10 daerah tertentu saja jadi kenyataannya pada saat berubah kondisinya dana insentif itu menjadi tidak efisien.

Oleh karena itu ke depan libatkan kami kami berhadapan dengan masyarakat paling bawah sampai masyarakat ke masyarakat yang ada di Dapil masing-masing Menyampaikan keluhan dan keluh kesah mereka. Sebenarnya ada pemikiran yang saya juga telah menyampaikan itu mau Wa ke beberapa pejabat terkait bahwa sebenarnya bagi usaha-usaha yang berjalan mereka itu hanya perlu merestruktur likuiditas nya. Jadi beban-beban yang dihadapi atau dihadapi sekarang ini tidak perlu direplace atau diganti atau di talangin oleh pemerintah tapi di schedule mungkin ditunda 6 bulan atau sampai kondisi ekonomi membaik kemudian di akumulasi kemudian dibagi secara proporsional ke tahun depannya. Ini juga sudah sangat membantu. Kalau usaha-usaha seperti itu Menurut saya ndak perlu di talangin dari uang negara tapi cukup likuiditasnya yang direstruktur.

Kalau semuanya ditalangi oleh negara deficit 5% pun kita akan kurang. kemudian juga nanti kita perlu data detail seperti yang disampaikan Pak Supri tadi gitu. Apa rencananya dari jumlah tadi disebut Kalau nggak salah ada 190

triliun yang di realokasikan ke Covid ini apakah ini jumlah segitu saja yang bisa gitu. Kemudian 400 triliun lebih yang digunakan untuk Covid ini Apakah cukup. banyak orang membandingkan dengan negara lain seperti Singapura tadi disebut 10% kemudian Malaysia dan seterusnya itu tinggi tapi apakah kita ikut harus ikut mereka, kepentingan kita apa.

Nah inilah jumlah yang kita perlukan itu berdasarkan item-item yang kita rencanakan untuk pembelannya sambil jumlah ini juga bisa memagar jadi menjadi pagar bagi rencana pembelanjaan kedepan sehingga kita di DPR juga bisa ikut mengawasi oh betul APDnya yang sudah sampai sekian dalam kondisi yang tidak normal begini harga menjadi luar biasa. Saya dengar APD itu sendiri ada berharga sejuta ada 2 juta yang sebelumnya hanya dibawah Rp100.000 sekarang harganya sekian apabila uang dengan sebesar itu kita alokasikan misalnya 100 triliun dari rencananya harga 10 atau 20.000 menjadi 1 juta itu kan hasilnya juga jauh dari harapan. ini mungkin tidak cukup. Nah strategi dan informasi seperti ini perlu di paparkan juga ke kami sehingga kita sama-sama melihat oh iya seperti ini jangan nanti rencana datangnya APD contoh saya APD dulu rencananya katakan Rp100.000 ternyata hanya bisa dapat Rp50.000 Karena harganya naik misalnya . nah pendekatan ini kan bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memproduksi sendiri gitu tidak harus ketergantungan. soal bahan baku yang kurang bahan baku Seperti apa Inilah hubungan yang kita lihat Bagaimana hubungan antar negara kita yang kita bina selama ini. Nah kalau hubungan kita baik tentu kita juga dapat prioritas tapi kalau kita kalah bersaing dengan negara-negara yang lain juga dalam tanda petik nggak termasuk di twenty malah negara-negara kecil nah kita pertanyakan juga hubungan baik selama ini dengan negara luar. jadi menurut saya Pak pimpinan memang banyak sekali yang harus kita sampaikan pada saat ini. saya ada 15 lembar ini sebenarnya mencatat tapi saya akan bikin tertulis dan nanti akan disampaikan melalui sekretariat untuk disampaikan detail pertanyaan dan masukan ini agar bisa juga direspon oleh kementerian keuangan dan untuk yang lain-lain tentu pada saat kita membahas itu insya Allah kami juga sudah menyiapkan hal yang sama. demikian wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Pak Jon yang sangat bijaksana betul jadi saya sepakat nanti mungkin yang lain bisa mempersiapkan pertanyaan secara tertulis karena kita sekarang semuanya virtual dari kediaman masing-masing tetapi kita harus sadar kemanusiaan juga. Sekretariat kita berada di kantor DPR yang mungkin harus kita pertimbangkan juga karena protocol Covid tidak boleh terlalu lama mereka ada disana, baik terakhir kami persilakan Ibu Wartiah. Ibu wartiah ada?

F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.)

Ada ada ada ini saya ini pak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang kami hormati bapak pimpinan Komisi XI beserta rekan-rekan komisi XI Ibu Menteri Keuangan, Bapak ketua OJK, ketua LPS dan Bapak Gubernur BI

Alhamdulillah kita bisa rapat virtual pada sore hari ini resiko terakhir pak ketua jadi sudah banyak hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu tetapi saya karena masih di Dapil merasakan suasana Bagaimana keadaan di dapil saya ya. disini untuk diketahui saya kira juga mungkin di seluruh Indonesia kami kekurangan APD di sini pak kemudian alat kesehatan yang mendukung untuk mengetahui masyarakat yang terkena Covid 19.

Kemudian yang kedua tentu saja saya ingin sampaikan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada rekan-rekan paramedis sebagai pahlawan kemanusiaan dalam hal Covid19 hari ini. kemudian yang ketiga Saya ingin sampaikan juga pada kesempatan hari ini bagaimana perhatian kita kepada masyarakat yang terdampak oleh Covid19. Menurut kami di daerah mungkin juga di seluruh Indonesia yang dirasakan di sini satu sisi memang pemerintah untuk menjaga agar tidak meluas dampak Covid19 tetapi di sisi lain berdampak kepada sosial ekonominya dimana disini ojek online kemudian buruh buruh pekerja menjerit ya pedagang di pasar satu sisi harus tidak keluar tapi sisi lain Mereka kalau tidak keluar tidak bisa makan jadi ini soal perut.

Kemudian berikutnya kepada pimpinan kami sampaikan tentu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung sepenuhnya kebijakan yang disampaikan oleh ibu Menteri Keuangan bersama yang lainnya yang pertama adalah saya ingin sampaikan kesimpulan yang disampaikan tadi yaitu kebijakan fiskal APBN merespon kejadian Covid 19 dengan melakukan refocusing program realokasi anggaran serta penyediaan stimulus untuk tujuan kesehatan perlindungan masyarakat dan dukungan dunia usaha. Saya ingin sampaikan di sini pak ketua dan ibu menteri keuangan kita bicara masalah pendidikan hari ini Pak kami berinteraksi dengan teman-teman yang ada di dunia pendidikan satu sisi ada work from home atau mereka juga kuliahnya melalui rumah tetapi alasan yang lain juga mereka masyarakat terutama mahasiswa pak, pulsa-pulsa mereka ini ya ini juga soal keuangan mereka ini dia kalau dari mereka yang mampu tidak jadi masalah tetapi dari sisi lain juga mereka sudah kesulitan di sini mulai sudah apa namanya adanya beberapa masukan-masukan kepada dosen mereka menanyakan kira-kira Kapan keadaan seperti ini akan selesai.

Saya kira ini perlu di perhatikan oleh semua kita prediksi Berapa lama keadaan ini akan selesai begitu. Kemudian yang lain-lain saya juga melihat di sini ada sekitar 110 triliun untuk perlindungan sosial. pertanyaan kami untuk ibu Menteri Keuangan kalau kita bicara PKH maka tentu sudah jelas orang-orangnya tetapi hari ini tentu kita juga harus mengantisipasi adanya lonjakan anggota PKH yang baru karena mereka tidak bisa bekerja dan juga data-data perlu diperhatikan karena adanya tumpang tindih data-data yang ada di daerah.

Bapak ibu sekalian pada kesempatan Hari ini saya juga sama dengan yang lain merespon dan berikan apresiasi kepada pertanyaan-pertanyaan yang terdahulu namun di sisi lain saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis yang nanti untuk mempermudah jawaban secara tertulis juga sebab

waktu yang sangat tidak pas untuk kami pada sore hari ini sekali lagi untuk diantisipasi oleh Menteri Keuangan khusus di Nusa Tenggara Barat yaitu mengenai nanti antisipasi terhadap TKW atau buruh migran yang akan datang balik dari Malaysia maupun dari tempat lainnya ke daerah-daerah ini juga perlu ada perhatian lebih karena satu sisi Ada apa istilahnya isolasi Mandiri tetapi di sisi lain mereka juga butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Saya kira ini saja dari saya pak ketua mudah-mudahan ke depan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini mendapat dukungan kita semua agar Apa yang di harapkan segera dapat tercapai atau segera dapat di apa namanya dicairkan gitu Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Terima kasih Bapak Ketua Pimpinan.

wallahul muwafiq Ila aqwamith Thariq.

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Baik terima kasih

Silakan pak Ramson 1 menit

F-P GERINDRA (RAMSON SIAGIAN)

Ya begini pertama tadi kesehatan 75 triliyun kita minta kepada pemerintah di sini bu Menteri Keuangan agar supply alat pelindung diri itu bisa lancar ke lapangan seperti di Puskesmas Kecamatan aja kosong tadi saya Sumbangkan 27 pasang, maksud Saya dari segi sisi supplier harus diperkuat dialihkan industri industri tertentu yang bisa beralih fungsi untuk industri APD.

Terus yang kedua untuk 110 triliyun itu perlu ditambah masyarakat berpenghasilan informal sekarang ini tolong di data karena mereka hilang penghasilannya ini sangat rawan ini betul-betul perlu diperhatikan oleh pemerintah dari kita minta 110 triliyun untuk para pengusaha jika memungkinkan jadi untuk nanti masyarakat ini

Terus yang kedua

(sudah cukup pak ramson)

Berapa lama untuk Berapa lama nanti proses Covid 19 ini Baik juga kebijakan dari Gubernur BI itu dengan analisis prediksi Untuk berapa lama itu yang diperlukan segera tolong dari pihak pemerintah melakukan tindakan-tindakan langsung di lapangan. Jadi jangan terlalu lambat karena birokrasi kita yang biasanya lambat tolong ditekan dipercepat lintas menteri itu aja pak terima kasih

KETUA RAPAT:

Oke Baik, baik terima kasih baik dari pimpinan Ada yang ingin mengajukan pendalaman kalau nggak ada kita kan masih ada jawaban dari

pemerintah dari menteri bu Menteri Keuangan Setelah itu kita masuk kesimpulan nah sekarang karena waktu sudah jam 5 kebetulan di sekretariat ini juga tim sekretariat masih ada di gedung DPR yang tadi informasinya memang tidak boleh terlalu lama saya minta kebijakan dari bapak-bapak mulai melalui fraksi dulu apakah kita putar satu pertanyaan lagi apa cukup satu pertanyaan kita langsung jawaban dari pemerintah. Saya persilakan dari PDIP dulu Pak Dolfie. masukannya gimana pak Dolfie. satu putaran lagi atau cukup satu putaran?

(muter sekali lagi muter sekali lagi)

(tapi dibatasi pak ketua)

(pimpinan sesuai, pimpinan ijin bicara pimpinan)

Ya

Baik, baik Kalau dari PDIP satu putaran kemudian kalau dari Fraksi Golkar saya juga setuju 1 putaran kemudian dari Gerindra Gerindra Pak Supri 1 putaran atau 2 putaran? Pak Supri nggak ada, Nasdem, Pak Hasbi? Pak Hasbi nggak ada PKB bu Ela?

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.)

Boleh nambah sedikit pak ketua.

KETUA RAPAT:

PKB silakan bu Ela.

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.)

Sebentar sedikit pak ketua. langsung saja ijin.

KETUA RAPAT:

Tadi saya meminta kesepakatan 1 putaran atau 2 putaran

F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.)

Karena masih ada waktu tadi 30 menit lagi boleh satu putaran lagi.

KETUA KOMISI XI (H. DITO GANINDUTO, M.B.A.)

Sepakat ya? jawaban pemerintahan

Saya sepakat nanti yang belum mendapat kesempatan bisa mengajukan pertanyaan tertulis ke sekretariat nanti akan dijawab secara

tertulis oleh pemerintah juga jadi waktu kami persilakan kepada Menteri keuangan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari anggota dan pimpinan Komisi XI DPR-RI. Waktu kami persilahkan Bu Sri Mulyani.

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI)

Terimakasih pak Dito. pimpinan dari hari Sabtu kami sudah mendapatkan juga pertanyaan tertulis yang dari komisi XI kami sudah Kirimkan juga jawaban tertulis. kalau dari pertemuan hari ini ada tambahan pertanyaan tertulis tadi kami juga akan memberikan jawaban Tertulis secara segera. Saya akan cepat saja untuk menanggapi.

Pak Dolfie kami setuju bahwa memang seluruh peraturan-peraturan untuk penggunaan kewenangan itu harus dibuat dan kita sudah membuat matriksnya untuk turunan dari perpu ini dan sekarang dibuat antara Kemenkeu, BI, OJK, LPS, sehingga jangan sampai moga-moga semoga insyaallah tidak terjadi bahwa kita terpaksa membuat aturan pada saat kita harus membuat keputusan. Kita harapkan untuk 2 minggu kedepan sudah harus komplit semua. Termasuk MOU kami dengan BI , kemudian rambu-rambu mengenai tadi yang disampaikan penggunaan pasal 20, 21, 22 dan yang lain-lain.

Untuk postur APBN defisit 5,0%, 0,7% itu kami tentu akan mengelolanya secara hati-hati. Defisitnya mungkin kita perkirakan kalau kondisinya akan membaik walaupun tadi pak misbakhun menyampaikan jangan under estimate tapi kalau kondisinya akan membaik kita mengharap defisitnya mungkin tidak sampai 5% tapi kalau 5% kita juga sudah akan mengidentifikasi pembiayaannya.

Pak dolfie menanyakan apakah bisa melakukan restrukturisasi dari apa yang kita miliki. Begitu kita melakukan restrukturisasi kita nanti dalam situasi seperti selektif default nanti malah meningkatkan yielt lebih besar lagi. Jadi kita mencari opsinya pak Dolfie tapi saya sangat menghargai concern dari pak Dolfie dan seluruh komisi XI mengenai beban utang ini.

Untuk penanganan Kesehatan nanti kami akan detailkan memnag kemarin didalam instruksi presiden 75 triliyun itu gelondongan. Karena dari BNPB dari sebagai ketua gugus tugasnya secara nasional itu memang baru mengeluarkan permintaan anggaran sebesar 3,1 triliyun. Itu pun focus untuk APD dan persisi yang dikatakan oleh semua tadi pimpinan fraksi atau wakil fraksi persoalan sekarang bergeser dari tadinya nggak ada anggaran menjadi tidak adabarangnya. Namun kami mengenai permasalahan APD ini sudah melakukan selama dua minggu terakhir koordinasi bea dan cukai melalui Menko dengan menteri perindustrian. Kita sudah mengidentifikasi berapa jumlah produksi melalui para perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Ada target kapasitas produksi yang kita sudah identifikasi itu 17,36 juta per bulan untuk APD yang ini bisa untuk kebutuhan dalam negeri 16,5 juta per bulan dengan kebutuhan impor dan nanti bagian yang dihasilkan akan di ekspor. Ini yang sekarang diorganize antara Kementerian industri Kamis ya dari sisi bea dan cukai untuk bisa membuat langkah-langkah mendorong untuk produsen produsen di dalam negeri. Dan ini tidak hanya prodeuser besar pimpinan tetapi juga pengusaha-pengusaha kecil.

Termasuk juga dari sisi surgical gown atau pakaian untuk operasi ini kita juga identifikasi jadi point kami banyak tadi pertanyaan Apakah pemerintah tidak atau sudah mengidentifikasi, sudah. Kita sudah tahu perusahaannya di mana mereka kapasitasnya berapa dan bagaimana mereka melakukan seperti yang saya sampaikan tadi bahan bakunya dan kapan produksinya bisa dihasilkan. Untuk penanganan kesehatan yang lain seperti kesiapan 134 rumah sakit sudah ada rambu-rambu seperti kalau untuk upgrading gedung itu hanya dilautu pintu yaitu oleh Menteri PUPR

Untuk alat kesehatannya akan dilakukan tadi banyak yang bicara tentang ventilator. Bapak dan ibu sekalian itu benar, ventilator masker APD ini sekarang rebutan. Makanya harganya naik, kita coba untuk melakukan tapi ventilator mungkin agak sulit karena teknologinya di Indonesia tidak ada satupun pabrik yang mampu membuat Alkes ventilator ini. Kalau sekarang ITB UI sedang melakukan bersama-sama dengan pihak lain seperti BPNPT ini sekarang tetap akan di dorong namun dari sisi kualifikasi dan kualitasnya mungkin nanti akan tergantung dari standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. poinnya memang benar Kami menggunakan yang 75 triliun itu di dalam rangka untuk kesiapan dari rumah sakitnya termasuk membayar BPJS lebih awal supaya mereka bisa melakukan pelunasan kepada rumah sakit. Pak Dolfie tadi mengusulkan 80% kami akan cek statusnya BPJS didalam memenuhi semua tunggakan dari rumah sakit.

Kemudian juga untuk insentif tadi banyak semuanya menyampaikan concern dan perhatian yang sangat luar biasa untuk para tenaga medis dan itu yang menyebabkan kita memberikan tadi tunjangan tambahan untuk dokter spesialis 15 juta, dokter umum dan dokter gigi 10 juta kemudian perawat 7,5 juta dan tenaga medis non perawat 5 di rumah sakit 5 juta plus tunjangan kematian. Tentu kita tidak mengatakan bahwa nyawa bisa dihargai dengan uang tapi itu adalah bagian dari perhatian pemerintah.

Tadi pagi dilaporkan di dalam sidang kabinet banyak dokter yang meninggal itu justru bukan dokter yang menangani di depan tapi dokter yang ternyata praktek di rumahnya dan tidak tahu pasien yang datang ke rumahnya itu ternyata adalah orang tanpa gejala atau OTG sehingga dia langsung kena dan mereka itu yang banyak meninggal termasuk dokter gigi, dokter mata yang sekarang di instruksikan mulai hari ini kalau mereka pun praktek dirumah dia harus menggunakan alat pelindung diri.

Untuk pemulihan ekonomi narasi yang pak Dolfie sampaikan tadi concern bahwa ini lebih heavy kepada yang di atas, tidak. Karena bapak presiden sudah menekankan dan oleh karena itu sebetulnya Bansos 110 plus untuk UMKM dan bahkan kepada yang dilakukan OJK yang nanti mungkin ada risiko yang harus ditanggung itu kita tekanannya adalah kepada masyarakat dan para UMKM . terutama untuk bansos itu untuk bisa menanggung kmereka yang selama ini pedagang kaki lima, dari sisi ojek, supir ojek dan lain-lain.

Tantangan paling berat adalah data kalau PKH kita punya data dari sisi kartu sembako kita punya data, namun berapa jumlah ojek online kita tahu. mungkin kita bisa nanya para unicorn seperti grab atau gojek namun ini tidak mencakup seluruh pekerja informal yang ada di seluruh Kawasan ini. Terutama yang terdampak itu adalah DKI Jabodetabek. Oleh karena itu data ini menjadi

tantangan Gubernur DKI mengatakan membutuhkan 2 minggu untuk melakukan pendataan komplit by name by address namun kita tidak mau menunggu juga. Makanya dilakukan beberapa Langkah-langkah seperti tingkat memberikan listrik yang bebas kepada seluruh penghuni 450 ini tujuannya walaupun kita belum punya data komplit kita sudah meringankan beban untuk masyarakat kecil secara segera. Jadi kami setuju narasi yang dikatakan Pak Dolfie nanti kami akan lakukan.

Termasuk tadi mengenai sektor sektornya pertanian industri perdagangan nanti kita akan lihat dan dari siapa Pak Erizal atau apa yang menyampaikan supaya stimulusnya dibeda-bedakan pak Bertu kalau nggak salah tadi menyampaikan itu. Nanti kita akan membuat, kenapa kami belum hari ini presentasi di Komisi XI dengan lengkap karena memang kita Minggu lalu itu fokus membuat tadi langkah fiskal yang bold yang untuk presiden bisa umumkan supaya orang tidak lagi bicara tentang oh kami nggak punya dana. itu di putus dulu persoalan itu jadi dana harus ada dan itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemudian baru kita tutup dengan perputusannya ini yang sekarang kita kejar dengan tadi aturan-aturannya turunannya.

Jadi kalau saya sampaikan Pak Misbakhun menanyakan size-nya itu akan seperti apa. Dan apakah ini semuanya dalam bentuk kuantitatif atau easing atau ini is about money kita akan coba secara seimbang nanti dengan pak Gubernur. Persoalannya itu ada dimana dan instrument apa yang paling pas untuk menangani tapi persoalan ini memang tidak semuanya masalah uang. Karena ada masalah logistik adalah masalah delivery ada masalah stock tadi yang disampaikan jadi kita akan menyeimbangkan terus, namun saya paham dan saya berterima kasih tadi pak Misbakhun secara sangat bold mengatakan jangan sampai trauma masa lalu membuat kita tidak berani atau tidak mengambil keputusan. Kita mencoba untuk tidak begitu tapi kami juga akan tetap melakukan secara hati-hati dan transparan.

Oke jadi kita juga akan melakukan exercise mengenai berbagai skenario yang kita hadapi namun kami juga tidak mau terlalu terbuka dalam artian kemudian menimbulkan dan menggerakkan market. Karena kemarin waktu dengan media kami dengan pak gub tujuannya baik untuk bicara tentang tentang forward-looking scenario namun media nulisnya kurs bisa Rp20.000 ekonominya kan kontraksi. Jadi kami juga harus sekarang hati-hati. Bagaimana menyampaikan ke public supaya kita semuanya tahu bahwa kita akan bergerak didalam sebuah dinamika yang akan terus terjadi.

Namun kita tidak mau apa kalah terhadap langkah-langkah dan perkembangan dari persoalan yang muncul itu makanya kita akan terus melakukan kalibrasi ini. Jadi itu tadi rambu-rambu kita akan buat seperti tadi yang disampaikan dan dalam situasi ini kewenangan akan dilakukan secara hati-hati. Kemudian untuk pak Supri kami terima kasih kebijakan dari kesehatan tadi untuk antisipasi seperti proyeksi dari BIN ini akan kita terus jadi kan sebagai salah satu antisipasi mengenai kebutuhan di lapangan. Hari ini pak Menteri dalam negeri sudah melaporkan 28 provinsi sudah melakukan realokasi APBD namun untuk APBD di level Kabupaten Kota Baru sekitar 200-an, 230 kami akan bersama-sama dengan Pak Mendagri untuk bisa meyakinkan bahwa antisipasi di daerah dan pusat akan semakin sinkron. paling tidak dari sisi

uangnya kita sinkron. Dan oleh karena itu kita akan lakukan tadi rambu-rambu yang dimintakan oleh para bapak bapak dan ibu sekalian.

Untuk kebijakan yang harus prudent, tata kelola yang baik dan harus ada check and balance kami sepakat nanti kita akan tuangkan dan mungkin usulkan pak ketua Pimpinan kalau memang ada sesi lanjutan nanti masing-masing pendalaman kalau memang dibutuhkan kita akan membuat 1 sesi bersama lagi supaya kita bisa memberikan paparan yang lengkap sesudah ada gambaran dari kam, namun dalam Minggu ini dan minggu depan memang fokus Kami adalah menyelesaikan seluruh aturan dibawahnya sebagai suatu desain Bersama dari Kami berempat untuk bisa menangani berbagai macam kemungkinan perkembangan yang terjadi.

Untuk tadi juga saya setuju Pak Supri jangan sampai ini menjadi ajang spekulasi dari Perpu ini, tapi harus dilihat sebagai hal yang positif . kita akan coba untuk melihat dari berbagai faktor untuk menghilangkan atau untuk mencegah terjadinya spekulasi maupun moral Hazard di dalam menggunakan perpu ini. untuk berbagai program-program strategis seperti IKN, infrastruktur kami kan sekarang sedang menyusun untuk camp PPKF 2021. Jadi yang sekarang focus kita adalah apa yang kita lakukan dalam masa dimana sekarang pergerakan dari kebijakan itu sangat cepat kemarin karantina local, self distancing, sekarang pembatasan sosial skala besar kemudian ini fokus mengenai mudik bagaimana supaya tidak mudik tapi bisa hidup atau yang sudah terlanjur mudik mereka di desa sudah punya tempat karantina untuk isolasi selama minimal 14 hari.

Kita sekarang menggunakan itu semua tadi beberapa menanyakan tentang dana desa dan sekarang memang fokus kita menggunakan dana desa itu selain tadi Bu Vera bicara tentang BLT kita juga meminta supaya desa memiliki tempat karantina untuk para pemudik. Supaya mereka pulang nggak langsung kumpul sama keluarga supaya dia harus karantina 14 hari supaya mereka bisa masuk ke rumahnya. Nah tempatnya dimana apakah pakai sekolah apakah pakai balai desa dan yang lain-lain. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Menteri desa.

Kemudian postur APBN pak supri mengenai postur rician asumsi makro kami akan sampaikan sekaligus juga kita membahas mengenai camp PPKF 2021 Karena untuk membangun 2021 kami harus punya at least gambaran 2020 itu seperti apa. Meskipun saya akuin sulit banget, kami bisa saja membuat berbagai skenario tapi terus terang ini sulit banget karena situasinya bergerak dan masalahnya bukan pure ekonomi, masalahnya banyak tadi Kesehatan dan keselamatan jiwa. Jadi ini yang membuat kita harus melihat berbagai aspek dan fungsi Berdasarkan model penyebaran dari Covid dan seberapa lamanya.

Kemudian untuk pak Hasbi dari Nasdem saya rasa kita akan terus melakukan langkah yang komprehensif yang tadi disampaikan termasuk tadi untuk program kesehatan nanti kami akan buat presentasi yang lebih lengkap karena yang kesehatan nanti kami akan buat presentasi yang lebih elngkap karena yang Kesehatan mungkin kami akan ngambil dari menko PMK dan dari gugus tugas. Kemudian kami akan gunakan juga untuk daerah dari

Kementerian Dalam Negeri dan untuk bidang keuangan tentu Kami akan melihat di kami sendiri.

Untuk 190 triliun KL yang akan melakukan realokasi dan apa refocusing tadi banyak yang menyampaikan ditetapkan saja sama Kementerian Keuangan dan Bappenas. kami berdua sama bappenas sedang koordinasi untuk bisa mendapatkan pertama tentu kalau memang ada program, yang sangat prioritas kita akan tetap akan jaga. kami juga meminta kepada kementerian yang memiliki belanja modal yang besar untuk melakukan slowing down atau menurunkan supaya tidak terjadi year Tapi kita masih punya fiscal space. jadi umpamanya kalau Menteri-menteri PU ada proyek yang harusnya selesai 12 bulan saya minta kepada Pak Bas Apakah ini bisa dibuat proyeknya menjadi multiyears 24 bulan sehingga tahun ini kita hanya akan belanja separuhnya atau 40% Sedangkan yang lainnya akan masuk tahun depan ini coba kita lakukan supaya para menteri bisa menciptakan space fiskalnya yang nanti kita akan coba satu untuk bisa mengurangi tadi belanja-belanja yang tidak prioritas. Termasuk belanja barang seperti traveling itu jelas akan turun kita sekarang sudah turunkan 50% dan kita masih melihat kemungkinan untuk menurunkan lagi.

Untuk pak bertu tadi nyampaikan supaya desain nya stimulus berbeda-beda kami akan perhatikan di dalam Kita mendvelop skema tersebut. Bu vera skema untuk stimulus 1 kalau memang nggak bisa dipakai seperti tadi kita memberikan diskon 30% dan sekarang memang tidak ada travelling yaitu nggak kan keluar juga nggak ada masalah tapi kita sekarang focus kepada jadi ini yang mau ditolong siapa jadi maksudnya announcement waktu bulan Januari memang merespon situasi waktu itu. Namun kalau ternyata situasi berubah dan instrument itu tidak lagi terpakai ya tidak ada masalah berarti kita akan fokus kepada masalah yang sekarang menjadi urgent seperti tadi Bansos yang menjadi sangat urgent dan masalah Kesehatan.

Kemudian APBN nya 2020 itu nanti kita turunkan dalam bentuk Perpres dari Perpu tadi bu Vera, nanti akan dilihat dalam bentuk tadi berbagai belanja-belanja yang dimintakan pak supri tadi kita akan lihat nanti bagaimana rincian dari belanja KL berubah dan bagaimana 450 triliun atau 250triliyun tambahan belanja itu bisa diakomodasi.

Kemudian tadi bu vera menyampaikan juga tentang bansos untuk dana desa sudah saya jawab dan saya rasa kita sudah sepakat ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Pak ecky pesan moralnya Tadi kita juga terima dan kita semuanya nggak pernah punya pretensi atau intention untuk mengatakan nyawa itu ada harganya dalam bentuk rupiah atau dolar jadi makanya masalah kesehatan dan keselamatan jiwa menjadi prioritas kita. Terus yang kedua bahwa minta supaya kssk dalam menggunakan kewenangannya hati-hati karena kita tidak hanya diawasi DPR kita tentu saja diawasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita juga akan insyaallah mencoba untuk prudent.

Kemudian mengenai hal-hal yang khusus Kesehatan nanti kami bisa sampaikan Pak Ecky langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang sebetulnya ada namun hari ini memang fokus kita untuk memberikan sesuai dengan agenda adalah indicator ekonomi akibat Covid jadi memang

kami tidak memasukkan secara detail berbagai langkah-langkah yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.

Pesan pak Ecky mengenai TKDD dan dana desa akan kami perhatikan namun kami akan tetap melihat dari sisi keseluruhan picture karena dari 250 Triliyun pun menggunakan yang banyak yang akan dilakukan melalui daerah atau akan dilakukan di daerah. untuk kebijakan PPh badan diturunkan tapi PTKP tidak diturunkan eh tidka dinaikkan kami akan hati-hati bukan masalah apa-apa kalau badan itu tentu mereka bukan korproasi yang untung tetapi tetap bisa bisa menghire dan akhirnya masyarakat juga yang akan tetap bisa menikmati benefitnya.

Kegiatan untuk ptkp selama ini sudah dinaikkan dan Indonesia itu sudah termasuk yang memiliki PTKP paling tinggi di dunia di kawasan ASEAN dalam hal ini. Jadi kami mungkin ini sifatnya mungkin harus kita respon namun saya sangat hati-hati. Namun saya sangat memahami dan menyetujui bahwa concern dari pak ecky adalah untuk masyarakat paling bawah.

Kita mengidentifikasi 20% paling bottom itu diberikan dukungan melalui PKH dan dinaikkan benefitnya kartu sembako kita naikkan menjadi 35 bahkan sampai 40% paling bawah dan itu masalah data akan menjadi sesuatu yang menjadi prioritas paling besar.

Tadi mengenai alat-alat kesehatan sudah kami sampaikan mengenai suplai sidnya yang tadi telah saya sampaikan beberapa seperti APD master Indonesia punya banyak sekali kapasitas untuk menjadi bahkan sekarang produsen dunia karena di seluruh dunia itu ternyata nggak semua negara maju karena dulu industri tekstil dan lain-lain sudah dikeluarkan dianggap bahwa value addednya kecil kecil sekarang mereka nyesel jadi sekarang mereka sangat tergantung pada ekspor impor APD dari negara-negara berkembang dan Indonesia termasuk produsen APD terbesar didunia,

Nah jadi ini akan menjadi sesuatu yang sangat potensial untuk dana Abadi nanti kita akan lihat Langkah-langkah pertama mengenai desain APBN dan berapa estimasi defisit kita dan financingnya dari mana yang berasal dari dana Abadi dari BLU dan walaupun dari Bi kita sekarang sama Pak Gub sedang membuat rambu-rambunya . supaya tadi yang kami sampaikan kami dengan bank sentral tetap Kredibel dan memiliki respect terhadap peranan masing-masing fiscal dan moneter yang harus kita jaga disiplinnya.

Untuk informasi berapa stand by loan yang sedang dan akan sedang d kita negosiasikan dan pasti kami akan sampaikan nanti dalam jawaban tertulis supaya juga kita mendapat ada yang masih sedang dalam negosiasi tapi poinnya adalah kalau market sedang sangat volatile dan harganya tidak rasional kami harus mampu untuk apa mensecure pembiayaan yang sifatnya aman dan tetap bisa dipertanggungjawabkan. untuk dana dana dana dari warga negara Indonesia yang di luar negeri nanti mungkin bisa disampaikan dari jawaban tertulis dari tax amnesty yang lalu.

Pak Erizal kami akan sampaikan ke presiden mengenai usulan khushyuk berdoa saya rasa presiden, pak Wapres sudah sering menyampaikan di berbagai kesempatan namun mungkin secara ceremonial karena kita ini mungkin karena tidak mau ya yang disebut tadi ibadah dari rumah jadi berdoanya tetep sendiri-sendiri karena kalau sampai terjadi pengumpulan

massa malah dikhawatirkan bisa menimbulkan penularan tapi ini pesan yang nanti akan kami sampaikan ke presiden.

Kemudian sosialisasi akan terus ditingkatkan sekarang ini terutama mengenai tadi social distancing atau pembatasan sosial skala besar pssb yang sekarang ini sedang terus akan di sampaikan sampai ke daerah-daerah. Saya rasa itu dari 150 skema nya seperti apa pak Erizal Kami nanti akan sampaikan tadi dalam presentasi memang masih didalam opsi-opsi karena memang seperti yang saya sampaikan kami baru selesai dengan perpunya dan ini sekarang sedang di turunkan dalam bentuk kebijakan yang nanti akan berbicara dengan industrinya dengan OJK dengan BI dengan LPS supaya kami bisa desainnya itu lebih baik dan memeberikan insentif yang betul-betul kepada industry yang benar-benar membutuhkan.

Tadi disampaikan mengenai restrukturisasi ini apakah sampai dengan 6 atau 12 bulan dan bentuknya seperti apa ini Yang ini banyak yang program-program untuk bantuan itu seperti listrik diberikan 3 bulan dulu tapi presiden juga setuju kalau memang nanti kelihatan 3 bulan situasi belum membaik bisa saja diperpanjang menjadi 6 bulan dan hal-hal yang kita lakukan untuk dari sisi perusahaan pun relaksasi itu rata-rata 6 bulan sampai 12 bulan kita akan melihat masing-masing memiliki skenario yang mungkin berbeda-beda tadinya kita berharap bahwa kita tetap hati-hati karena resource kita terbatas jadi kita juga tidak memberikan tak terbatas namun kita secara bertahap namun kita juga menyiapkan kalau kemungkinan situasinya memburuk tapi kita berharap situasi akan membaik sesudah 3 bulan kedepan. Jadi data detailnya nanti akan kami sampaikan apakah cukup atau tidak cukup nanti akan sangat tergantung dari kondisi yang sekarang dihadapi oleh industry dan ekonomi tersebut. Jadi ini akan yang kami akan coba terus mengupdate komisi XI.

Ibu wartiah tentu tadi masalah aPD tadi pagi juga diidentifikasi bahwa ternyata bantuan APD yang kemarin dikirim melalui TNI Polri yang disalurkan dari pabrik ternyata sampai di provinsi tidak turun sampai ke Puskesmas. Persis yang dikatakan bu wartiah tadi. Jadi tadi presiden mengintruksikan supaya untuk gugus tugas BNPB memobilisasi lagi polisi dan TNI untuk membawa APD itu bisa sampai ke rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan.

Kemudian tadi ibu mengenai refocusing realokasi nanti kita coba lihat itu tadi dari Menteri kominfo juga menyampaikan banyak juga yang para mahasiswa pelajar yang menghadapi masalah pulsa dan oleh karena itu indusri ini juga minta insentif agar bisa memberikan discount pulsa terutama kepada mahasiswa dan pelajar. Kami akan masukkan informasi-informasi ini didalam paket apa yang sedang dan kita lakukan. Mungkin itu bapak pak ditto yang bisa kami sampaikan karena yang lain saya rasa sudah nanti kalau ada tambahan-tambahan dan pertanyaan tertulis kami juga akan sampaikan menyusul jawaban tertulis yang tadi pagi Sudha kami kirim pertanyaan yang kami dapatkan pada hari Sabtu.

Mungkin itu pak Dito dari kami, terima kasih.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM)

Pak ketua mengingatkan sudah jam 17.30 ya dan banyak temen-temen yang belum sholat ashar yang muslim dan kasihan secretariat-sekretariatnya. Terimakasih.)

KETUA RAPAT:

Ya oke baik kami sampaikan kepada ibu Menteri keuangan yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari rekan-rekan dari komisi XI DPR RI. Betul tadi yang disampaikan oleh pak Ecky. Tinggal beberapa menit lagi kita udah masuk maghrib tapi tadi ashar mungkin udah bergantian secretariat juga kita mungkin bisa pendalaman lebih lanjut besok dengan OJK tapi tidak usah dengan pemaparan langsung pendalaman, kemudian rabu dengan Bank Indonesia, Kamis dengan LPS. Dan nanti seperti yang disampaikan oleh bu Menteri keuangan nanti dalam masa sidang ini karena ini semua bergerak terus kita akan mengadakan pertemuan lagi untuk mendapatkan pemaparan lebih detail lagi dari ibu Menteri keuangan. Baik.

Besok OJK besok OJK jangan lupa yang sudah kita sepakati Bersama besok dengan OJK jam 13.00 rabu dengan Bank Indonesia jam 11.00 dan Kamis dengan LPS jam 13.00 langsung pendalaman saja karena pemaparannya sudah disampaikan semua tadi.

Baik apakah kita bisa masuk ke kesimpulan sebelum maghrib nih? Pak Dolfie setuju ya masuk ke kesimpulan ya.

ANGGOTA KOMISI XI:

Pak setuju pastikan bahwa boleh menulis apa melanjut apa mengajukan pertanyaan tertulis pimpinan lewat secretariat mungkin ditunggu sampai besok)

Baik tadi sudah kita sepakati Bersama untuk temen-temen yang belum sempat mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan bisa membuat pertanyaan secara tertulis dikirimkan ke secretariat untuk dilanjutkan kepada pemerintah pertanyaan tertulis tersebut atau yang tadi sempat Mungkin abis pak Jon masih ada yang belum silakan untuk bikin tertulis yang nanti akan dijawab secara tertulis pada pertemuan lebih lanjut dengan Menteri keuangan.

KETUA RAPAT:

Baik kalau gitu kita langsung masuk ke kesimpulan setuju?

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak ketua saya pikir nggak perlu kesimpulan sekarang ini kan suasana sangat dinamis yang penting kita udah dapat informasi tukar informasi nanti kan ada rapat berikutnya lagi)

Baik, nggak jadi kalau yang namanya Raker harus ada kesimpulan pak Ramson. silakan sekretariat. Sekretariat silakan kesimpulan.

Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR-RI Bersama Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia ketua dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan kepala Lembaga Penjamin Simpanan Senin 6 April 2020. Komisi XI DPR RI Bersama Menteri Keuangan Gubernur bank Indonesia, kepala dewan komisaris OJK kepala LPS menyepakati

1. Komisi XI DPR-RI mendukung Menteri Keuangan untuk melakukan berbagai upaya perumusan kebijakan keuangan negara dalam rangka Penanganan dan pencegahan krisis ekonomi akibat wabah Covid 19 di Indonesia.

Apa bisa diterima nomor 1? saya putar dulu per fraksi dulu PDIP. Setuju? Pak Dolfie?

Oh semua dulu oke semua dulu oke.

(RAPAT : SETUJU)

2. Dalam kondisi memaksa dalam dalam kondisi memaksa yang diakibatkan oleh pandemic Covid 19 menteri keuangan akan melaksanakan seluruh kewenangannya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan akuntabilitas dan menjaga moral hazard dan pelaksanaan kebijakan publik dan ekonomi nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri keuangan, Bank Indonesia dan OJK akan berusaha untuk tetap menjaga fundamental ekonomi di tengah wabah Covid-19 dengan mengoptimalkan APBN 2020
4. Menteri Keuangan di dalam mencari sumber pembiayaan yang pada situasi tidak normal memperhatikan kondisi pasar SBN yang bergejolak, biaya dan resiko dari penarikan utang tersebut sehingga meningkatkan kualitas dan daya tahan dan APBN selanjutnya.
5. Menteri Keuangan akan mempercepat proses refocusing anggaran dan prioritas KL agar dapat dialihkan untuk Penanganan dan pencegahan wabah Covid-19
6. Menteri Keuangan akan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh kebijakan Penanganan dan pencegahan Covid 19 sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku
7. Menteri Keuangan bersama Gubernur BI, OJK, dan LPS untuk melakukan langkah-langkah pencegahan krisis sektor jasa keuangan akibat Covid19 dan melaporkan secara berkala kepada Komisi XI DPR-RI

8. Menteri Keuangan bersama Gubernur BI ketua OJK kepala LPS akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar melalui perumusan kebijakan yang memberikan Covid di tengah wabah Covid19
9. Menteri keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis maksimal 7 hari kerja

Kita Kembali ke nomor satu dulu.

Ya silakan.

ANGGOTA KOMISI XI:

Karena tadi kita rapat ini dengan Menteri Keuangan saja kalau bisa kesimpulannya dengan Menteri Keuangan ketua jadi besok, iya dibatasi dengan Menteri Keuangan saja ketua.

KETUA RAPAT:

Baik kalau gitu satu-satu ya nanti yang khusus dengan Menteri keuangan saja.

1. Komisi XI DPR-RI mendukung Menteri Keuangan untuk melakukan berbagai upaya perumusan kebijakan keuangan negara dalam rangka Penanganan dan pencegahan krisis ekonomi akibat wabah Covid 19 di Indonesia.

ini kan dengan Menteri keuangan setuju?

ANGGOTA KOMISI XI:

Pimpinan pimpinan, mungkin redaksionalnya dirubah sedikit pimpinan.

Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri Keuangan dalam melakukan penyelamatan perekonomian nasional dalam menghadapi dampak wabah Covid 19.

ANGGOTA KOMISI XI:

Pak ketua cukup 1 kesimpulan lah kita kan rapatnya akan regular nih lagi berkembang suasana belum jelas, 2 minggu lagi belum jelas keadaan ini.

KETUA RAPAT:

Oke jadi komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri Keuangan dalam melakukan penyelamatan perekonomian nasional dalam menghadapi dampak wabah Covid 19

ANGGOTA KOMISI XI:

Usul pimpinan kalau kalimat seperti ini itu menjadi focus terhadap dampaknya saja dan ini akan menjadi kritik sosial kritik masyarakat public tapi jadinya seperti ini penyelamatan tidak fokus kepada penyelamatan perekonomian dulu dalam melakukan penanganan wabah Covid 19 serta dampak-dampaknya terhadap penyelamatan itu.

Jadi fokusnya justru yang dipertanyakan oleh public itu adalah sikap pemerintah terkait dengan penanganan Covid 19 dulu baru kemudian dampak-dampaknya dan penyelamatan perekonomian jadi harus secara komunikasi publik itu menjadi penting bahwa pemerintah khususnya Menteri keuangan dalam kebijakan-kebijakan fiskalnya adalah untuk menangani Covid 19 begitu baru kemudian dampaknya dan penyelamatan perekonomian itu pimpinan jangan langsung lari ke dampak maksud Saya

KETUA RAPAT:

Jadi gimana kalimatnya pak Ecky?

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM)

Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri keuangan dalam membuat kebijakan untuk penanganan wabah Covid19, sudah belum ini diketik

Membuat kebijakan keuangan dalam penanganan wabah Covid 19 ya koma ya serta koma mitigasi mitigasi dampak-dampak Covid 19 serta penyelamatan perekonomian nasional.

KETUA RAPAT:

Jadi dalam menghadapi dampak keuangan ini dihilangkan lagi? Karena sudah diatasnya ya. Perekonomian nasional titik gitu aja kan ya.

Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri keuangan dalam membuat kebijakan untuk penanganan wabah Covid19, Membuat kebijakan keuangan dalam penanganan wabah Covid 19 ya koma ya serta koma mitigasi mitigasi dampak-dampak Covid 19 serta penyelamatan perekonomian nasional. Begitu pak ecky?

Ya silakan pak Ramson

F-P GERINDRA (RAMSON SIAGIAN)

Kesimpulan kita singkat aja yang penting sekarang langkah-langkah di lapangan. kesiapan Alkes pangan obat vitamin selain disprin nanti soal-soal ekonomi diamankan itu belakangan dah. ini masih jauh kok nggak mungkin sekarang bisa diprediksi siapa amerika aja nggak bisa udah setiap malam saya

cek terus setiap hari itu Saya terbiasa nonton TV CNN jadi kita jangan terlalu muluk-muluk sekarang nih. kita kasih otoritas dari DPR RI kepada bu Menteri Keuangan dan yang terkait tapi kita cek terus regular 10 hari atau 2 minggu jadi jangan terlalu panjang-panjang. Makasih pak ketua.

(saya usul pak ketua)

Ya pak misbakhun

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.)

Saya usul saya hampir sependapat ramson Kalau menurut saya kita cukup satu kesimpulan ini pak komisi XI mendukung upaya Menteri Keuangan membuat kebijakan keuangan negara dalam penanganan wabah Covid 19. Mitigasi dampak dampak Covid19 serta penyelamatan perekonomian nasional itu aja kalau menurut saya itu sudah sangat luas.

(yang akan dilaporkan dan dibahas secara regular dah gitu aja pak)

Itu aja udah sangat luas Pak

F-P GERINDRA (RAMSON SIAGIAN)

Jalan di Lapangan itu penting jalan di lapangan itu. Makasih

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.)

Itu aja udah sangat luas itu menurut saya dengan apa yang kita simpulkan itu memberikan ruang yang cukup kepada Ibu Menteri Keuangan untuk mengambil kebijakan dan berikutnya di dalam rapat-rapat Yang reguler itulah kita baru mendetailkan sesuai tadi dengan eksposur resikonya dengan perkembangan yang ada apakah ini akan membaik atau ini memburuk atau kemudian landai-landai saja sehingga kita bisa memprediksi secara presisi pressure presisi dampaknya itu. Takutnya kita over expose atau under estimate tadi terima kasih

KETUA RAPAT:

Ya saya bacakan lagi Komisi XI DPR-RI mendukung upaya menteri keuangan dalam membuat kebijakan keuangan negara dalam penanganan Covid 19, mitigasi dampak dampak Covid 19 serta penyelamatan perekonomian nasional yang akan dilakukan dan dibahas secara reguler dengan Komisi XI dengan Komisi XI DPR-RI cukup setuju?

F-P GERINDRA (RAMSON SIAGIAN)

Jalan di lapangan pak ketua jalan itu tadi kesiapan Alkes pangan obat obat vitamin itu perlu disiapkan di lapangan. Makasih.

ANGGOTA KOMISI XI:

Itu kan nanti dibahas.

ANGGOTA KOMISI XI:

Iya itu kan penanganan wabah nya sudah masuk

KETUA RAPAT:

Kita Kembalikan ke pemerintah dulu ibu menteri

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI)

Saya setuju pak menurut saya hal seperti ini karena memang begitu sangat terbuka dan dinamis kan yang penting kesepahaman antara pemerintah kami dengan komisi XI akan dilakukan rapat reguler seperti yang diharapkan teman-teman tadi supaya kami juga dapat menjelaskan. Dischedule kan apakah setiap 2 minggu di buat rapat kerja untuk mengupdate itu pak, ini cukup baik.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P)

Usul pimpinan-pimpinan pimpinan tadi ada yang penting yang disampaikan bu Sri Mulyani tadi waktu pembahasan pimpinan usul

KETUA RAPAT:

Ya pak dolfie silakan usul silakan pak dolfie Kalau boleh ditambah satu lagi yang poin yang penting tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan pemerintah waktu pembahasan adalah pemerintah bersama Bi OJK dan LPS akan menyusun peraturan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencegah dan menangani krisis keuangan 2 minggu.

ANGGOTA KOMISI XI:

Menteri keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia, ketua DK OJK dan kepala LPS akan menyusun peraturan-peraturan syarat dan ketentuan yang diperlukan pelaksanaan dari Perpu menyusun pelaksanaan syarat dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaan dari perpu

KETUA RAPAT:

Jangan dulu mungkin bu perpu soalnya

ANGGOTA KOMISI XI:

Jadi Menyusun syarat dan ketentuan dalam melaksanakan kewenangannya dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan dalam waktu 2 minggu tadi ibu usulin 2 minggu ya Bu.

ANGGOTA KOMISI XI:

Ya kita upayakan dua minggu Pak kita membuat timeline internalnya 2 minggu

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.)

Pak ketua saya ijin pak ketua nomor 2 ini sudah masuk substansi Perpu pak ketua. Perpunya belum disetujui belum belum masuk ini sudah masuk ke substansi perpu sementara perpu Belum kita setujui kita prinsipnya setuju kepada Perpu tapi jangan sampai kita mendahului dari yang itu gitu lho kalau menurut saya

F-P GERINDRA (RAMSON SIAGIAN)

Mau disetujui atau tidak disetujui DPR sebelum masuk ke masa persidangan itu sah sebagai undang-undang lihat undang-undang Dasar 45 kalau tidak ad aitu Bagaimana bisa membuat tindakan-tindakan ini pemerintah. saya tahu Pak ramson ini sudah berjalan

ANGGOTA KOMISI XI:

Yang sudah berlakukan sekarang undang-undang PPKSK penjabaran inikan bisa untuk lebih menjabarkan yang ada di undang-undang PPKSK

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.)

kita tahu itu itu

KETUA RAPAT:

Baik, baik tunggu-tunggu. Jadi bagaimana dari pemerintah Bu yang nomor 2 ya.

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):

Ya ini kalau tadi kan kami sampaikan karena memang sesuai peraturan perundang-undangan nomor ini kan sensitifitas politik kalau dari pemerintah dengan Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dia sudah menjadi dasar hukum dan kami harus melaksanakannya makanya kami akan tetap melakukan tadi turunan dari Perpu ini dalam hal termasuk persyaratan dan ketentuan untuk melaksanakan kewenangan kewenangan yang diatur di dalam perpu namun proses politiknya dan legislasinya dengan DPR tentu itu adalah dinamika yang ada di Senayan

Kami tidak bermaksud bahwa Kalau kami melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan untuk syarat ketentuan dalam pelaksanaan kewenangan itu kami mendahului proses politik DPR tidak Pak karena memang yang tadi disampaikan Pak Dolfie yang lain-lain kita kekosongan atau kebutuhan untuk tata kelola yang baik supaya kalau kewenangan itu dipakai kita sudah memiliki rambu-rambu yang jelas jadi memang ini ya kami serahkan kepada DPR Komisi XI tapi understanding nya Pak Dolfi memang kami memiliki timeline internal seperti itu saya dengan Pak Gub sudah mulai bicara tentang MOU-nya dengan OJK nanti mengenai penggunaannya struktur dari penggunaan dana pemulihan dan kemungkinan rambu-rambu mengenai Ips tadi Apabila mereka membutuhkan pinjaman itu kemudian akan kita susun dan memang kita punya timeline dua minggu pak dolfi. tapi apakah perlu ditulis di sini yang kemudian menimbulkan komplikasi politik tadi itu saja.

ANGGOTA KOMISI XI:

Begitu pimpinan saya usul pimpinan usulnya adalah masuk menjadi poin 1 dengan 1 kata aja, kalimatnya yang tadi komitmen untuk good governance itu transparan dan sebagainya Salah satu bentuk yang poin 3 tadi ada kan good governance ketika poin good governance itu maka poin nomor dua yang diusulkan pak dolfi itu masuk tidak mungkin kan kalau tidak membuat peraturan seperti itu.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.)

Saya usulnya begini, saya usul ijin bu menteri saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dolfie dan sebagainya tapi saya takutnya ibu malah terikat dengan time frame 2 minggu itu Buk, saya takutnya (mending time framenya dicabut) saya takutnya saya takutnya tapi

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI)

Nggak tapi kalau Pak misbakhun Dengan hormat tadi untuk mewadahi pak misbakun pak dolfie pak ecky menurut saya mungkin bisa di-modify dengan Menteri Keuangan akan apa melaksanakan seluruh kewenangan yang diatur oleh undang-undang dengan prinsip tata Kelola yang baik.

Ini kan hari ini kan maunya dengan Menteri Keuangan untuk kesimpulannya Jadi mungkin disebutkan tadi kan Menteri Keuangan dalam membuat kebijakan keuangan negara dalam penanganan Covid dan mitigasi serta penyelamatan ekonomi. nah yang keduanya dalam melaksanakan kewenangan tersebut Menteri keuangan akan berpegang kepada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi itu tadi itu kan.

KETUA RAPAT:

Ya redaksionalnya dibenerin dulu tadi

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):

Coba ditulis dulu kemudian baru itu ya nomor 2 tolong ya nomor 2 titik

ANGGOTA KOMISI XI:

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, tersebutnya me-refer pada nomor 1 dalam melaksanakan tolong ditulis nomor 2 atas mas, nomor 2 jangan di bawah dalam melaksanakan kewenangan tersebut itu artinya point nomor satu kewenangan nomor satu. Menteri Keuangan akan menganut prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas. itu ya?

(setuju buk)

Nomor 3 udah nggak perlu lagi

F-P GERINDRA (RAMSON SIAGIAN)

Cukup pak ketua jangan terlalu rewel semua udah cukup tuh setuju cukup

KETUA RAPAT:

Menerapkan tata kelola yang baik transparansi dan akuntabel
Bentar pak jon dulu pak jon dulu silakan pak jon

F-PAN (H. JON ERIZAL, SE., MBA)

Terima kasih pimpinan saya sangat sependapat dengan ... (suara tidak jelas)... supaya kita juga akan ada rapat reguler kalau 2 minggu belum selesai bisa 3 minggu gitu tapi ada timelinenya karena kita sering berbicara seperti ini jika aturan pelaksanaannya itu belum selesai nanti ngambang kita nggak ada pegangan gitu jadi saya sepakat dengan idenya Pak Dolfie tadi itu ada tim lain bahwa itu mengikat nggak mengikat kita ada rapat reguler bahwa misalnya 2 minggu belum selesai pada saat kita meeting berikutnya bu menteri bisa menyampaikan ada kendala di mana di mana di mana tapi harus ada timeline kita kan pengalaman ini pimpinan. Jangan dihilangin itu saya sependapat pak dolfie bahwa, saya saya selesaikan dulu jadi tanggung jawab kita bahwa kita rapat dan Menteri Keuangan kita dorong atau kita dukung mengambil kebijakan-kebijakan tapi ada hal yang harus dilakukan kalau yang tadi transparan dan itu sudah standart umum sulit ukurannya gitu ya Ada terukur gitu Jadi kita ada untuk control, terimakasih pimpinan.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM)

Pimpinan Ecky Awal Muharram pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak ecky silakan.

KETUA RAPAT:

Kalau komitmennya sehat memang apa yang diusulkan pak dolfie itu benar tetapi legal standing rapat kita sekarang kan tadi sudah dianulir menjadi keputusan bersama dengan Menteri Keuangan tidak mengatur terkait dengan kssk bahwa secara substansi komitmen poin yang diusulkan pak dolfie itu memang harus dilakukan soal disetujui atau tidak di disetujui masuk dalam kesimpulan ya Apakah itu komitmen itu bab lain karena apa kita ini sekarang aturan ini kan nggak kssk betul Menteri Keuangan sebagai member of KSSK dan kssk dan ketuanya di situ menurut saya ya kalau disepakati Silakan masuk tetapi poin nomor 2 sesungguhnya Sudah bagus.

Saya yakin Bu menteri pak Gubernur Pak OJK ke dan LPS komitmen dengan nomor 3 nanti kita tagih lagi kita saya berbaik sangka bahwa itu akan

Dilaporkan pada saat dua minggu yang akan datang ketika rapat berikutnya demikian pimpinan.

ANGGOTA KOMISI XI:

Pimpinan bikin tiga aja nggak apa-apa kesimpulan 3 nggak harus pendek kan supaya jelas gitu lho terima kasih

KETUA RAPAT:

Baik, kami kembalikan ke pemerintah dulu Bagaimana ibu

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):

Ya sebetulnya kami nggak ada masalah Bapak. Toh nanti kalau 2 minggu kami diundang untuk rapat kami laporkan ini aturan-aturan yang sudah kita keluarkan seperti ini dan kemudian kami juga bisa menyampaikan namun tadi kan komplikasi nomor 3 nomor komplikasi nomor 3 bukan berdasarkan bukan karena masalah itu Pak tapi karena masalah tadi proses politik mengenai perputra sendiri.

Jadi ini persoalan di dalam DPR sendiri saya sih dari kami nggak ada masalah gitu karena kami memang berusaha untuk benar-bener mengejar persoalan kesiapan dan kelengkapan Semua peraturan pelaksanaan itu bisa betul-betul kita keluarkan secara cukup cepat tapi tetap hati-hati. Dan ada timeline itu supaya mendisiplinkan kita juga Pak karena bagaimanapun juga kan ini banyak hal-hal yang memang sangat sensitif yang dikatakan pak Misbakhun mengenai pengalaman masa lalu yang kita kadang-kadang merasa oh saya nggak mau masuk lagi kesitu kayak gitu Pak. jadi hal itu bagus saya lebih senang nanti kami di Komisi XI menjelaskan Pak Ini draft aturannya seperti ini Komisi XI nanti menyampaikan oh ini kita dukung politik ini nggak usah itu menurut saya juga bagus juga jadi kita merasa punya kepemilikan proses politik dan dilakukan secara Bersama-sama. Tapi tadi yang nomor 3 itu kan ada sebagian dari Komisi XI menganggap itu belum diomongin kok kita udah gitu loh pak. Terbuka aja kalau saya silakan.

KETUA RAPAT:

Baik jadi keputusan di sini itu perpu akan dibahas di Banggar.....(suara tidak jelas)... pak said coba masuk komentar dulu kalau menurut saya memang perpu ini dibahasnya di banggar dan dengan Komisi XI. Pak said coba kasih komentar dulu Pak Said.

F-PG (H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A.)

Kalau saya tetap saja tidak apa-apa poin 3 itu karena poin 3 itu bagian concern kita semua juga apapun produk pemerintah toh akan terus-menerus secara reguler sebagaimana disampaikan oleh ibu Menteri Keuangan juga akan dilaporkan dan dibahas di Komisi XI. Alangkah baiknya poin 3 tetap saja kalau toh akan kalau perlu seharusnya tidak perlu data waktu 2 minggu dalam kurun waktu secepatnya dalam kurun waktu secepat-cepatnya itu lebih lebih wise menurut saya.

KETUA RAPAT:

Saya bacakan sekali lagi nomor satu coba Sekretariat.

Komisi XI DPR-RI mendukung upaya menteri keuangan dalam membuat kebijakan keuangan negara dalam penanganan Covid 19 mitigasi dampak-dampak Covid19 serta penyelamatan perekonomian nasional yang akan dilaporkan dan dibahas secara reguler dengan Komisi XI DPR-RI. Setuju?

Pemerintah setuju bu?

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut Menteri Keuangan akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik transparansi dan akuntabel. Setuju?

Akuntabilitas, oke setuju.

(RAPAT : SETUJU):

Menteri keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia, ketua DK OJK akan menyusun peraturan pelaksanaan syarat dan ketentuan dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencegah dan menangani krisis system keuangan dalam waktu secepatnya.

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Baik dengan demikian telah kita sepakati Bersama pada rapat kerja pada hari ini kami persilahkan closing statement bentar saya ketok dulu.

(RAPAT : SETUJU)

Kami persilahkan closing statement dari bu Menteri Keuangan

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):

Bapak pimpinan dan para Anggota dan pimpinan fraksi.

Kami berterima kasih atas rapat kerja hari ini yang merupakan suatu rapat yang sangat produktif di dalam forum untuk bisa menjelaskan langkah-langkah di bidang keuangan negara untuk menangani merebaknya Covid19 dan dampak ekonomi sosial dan keuangan. Saya ingin menyampaikan bahwa hubungan ini hubungan yang baik secara politik akan bisa terpelihara pada saat kita akan terus-menerus melakukan kelengkapan peraturan perundang-undangan untuk bisa menjaga masyarakat di bidang kesehatan kemanusiaan keselamatan masyarakat dan di dalam menjaga ekonomi dan keuangan Indonesia.

Semoga semua ikhtiar ini kita bisa lakukan dengan baik dan tentunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita berdoa untuk selalu bersama kita dan memberikan Ridho-Nya

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik kami sampaikan pada ibu menteri keuangan dan seluruh jajarannya Bapak Gubernur Bank Indonesia beserta seluruh jajarannya ketua dewan Komisioner OJK dan seluruh jajarannya serta kepala LPS dan seluruh jajarannya pimpinan dengan Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja pada sore hari ini dengan mengucapkan Hamdalah rapat kerja pada sore hari ini Senin tanggal 6 April 2020 saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.05 WIB)

Terima kasih
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Terima kasih semuanya Bu Menteri, semuanya sehat-semuanya.

Jakarta, April 2020
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

ttd

Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 196205211982031001